LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025





Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara
yang Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan

KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Pemerintah Pusat atas pelaksanaan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang wajib disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Data-data capaian yang tertuang dalam laporan ini telah disesuaikan dengan hasil reviu yang dilaksanakan oleh APIP Kabupaten Tapanuli Utara, dan Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 dalam laporan ini merupakan laporan *un-Audited.* Melalui laporan ini, kami berupaya menyajikan informasi yang transparan, akuntabel, dan komprehensif mengenai capaian pembangunan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta berbagai inovasi yang telah dilaksanakan.

Sepanjang tahun pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berkomitmen untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berbagai capaian yang diraih merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan dan keterbatasan. Namun demikian, hal tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif serta dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.

Akhir kata, besar harapan kami agar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan utuh mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sekian dan terimakasih

Horas...Horas...Horas...

Tarutung, 31 Maret 2026

BUPATI TAPANULI UTARA,

DR. JONIUS T.P. HUTABARAT, S.Si., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ---------- i
DAFTAR ISI ---------- iii
DAFTAR TABEL ---------- v
BAB I PENDAHULUAN ---------- 1
1.1 Latar Belakang ---------- 3
1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah ---------- 42
1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal ---------- 82

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ---------- 93
2.1 Capaian Kinerja Makro ---------- 93
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 96
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar ---------- 96
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Pelayanan Dasar ---- 104
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Pemerintahan Wajib ---------- 115
2.2.4 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ---------- 118
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah ---------- 121

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ----- 194
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten ---------- 194
3.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian ---------- 201

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ---------- 203
4.1 Pendidikan ---------- 203

4.2 Kesehatan ---------- 206
4.3 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ---------- 217
4.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ---------- 230
4.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ---------- 233
4.6. Sosial ---------- 244
BAB V PENUTUP ---------- 249

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nama dan Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara	7
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Tahun 2025	13
Tabel 1.3	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara	14
Tabel 1.4	Data PNS Menurut Jabatan	16
Tabel 1.5	Data PNS Menurut Golongan	18
Tabel 1.6	Data PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan	25
Tabel 1.7	Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Golongan	28
Tabel 1.8	Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Kualifikasi Pendidikan	32
Tabel 1.9	Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Jabatan	34
Tabel 1.10	Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara Pada Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025	37
Tabel 1.11	Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Tapanuli Utara Pada Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025	39
Tabel 1.12	Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Utara Pada Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025	41
Tabel 1.13	Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	64
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	95
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sebelum)	122
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesudah)	124
Tabel 2.4	Skala Nilai Peringkat Kinerja	128

Tabel 2.5 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Target Perjanjian Kinerja (sebelum) ---------- 129
Tabel 2.6 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Target Perjanjian Kinerja (sesudah) ---------- 131
Tabel 2.7 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah ---------- 135
Tabel 2.8 Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif ---------- ---------- 139
Tabel 2.9 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi UMKM dalam Perekonomian ---------- --- 140
Tabel 2.10 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan ---------- 141
Tabel 2.11 Distribusi Persentase PDRB atas Dasar harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Utara 2021-2025---------- 141
Tabel 2.12 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja---------- 143
Tabel 2.13 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Industri ---------- 145
Tabel 2.14 Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Utara 2021-2025 ---------- 145
Tabel 2.15 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya PDRB (ADHB) Sub Sektor Pertanian ---------- 147
Tabel 2.16 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2021-2025---------- 147
Tabel 2.17 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya PDRB (ADBH) Sub Sektor Perikanan ---------- 149
Tabel 2.18 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau-- 151
Tabel 2.19 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan ---------- 154
Tabel 2.20 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat---------- 157

Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2021-2025----- 158
Tabel 2.22 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan ---------- 159
Tabel 2.23 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender ---------- 159
Tabel 2.24 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas ---------- 160
Tabel 2.25 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan------- 161
Tabel 2.26 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Karakter Siswa Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal ---------- 164
Tabel 2.27 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembangunan Keluarga ---------- 165
Tabel 2.28 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat ---------- 165
Tabel 2.29 Pengukuran Kinerja Sasaran Terpeliharanya Ekosistem Kebudayaan---------- 166
Tabel 2.30 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata Melalui Pengembangan Industri Kepariwisataan 167
Tabel 2.31 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan---------- 168
Tabel 2.32 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah ---------- 173
Tabel 2.33 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah---------- 173
Tabel 2.34 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegrasi---------- 175
Tabel 2.35 Interval Nilai, Kategori dan Makna Indeks Pelayanan Publik ---------- 175
Tabel 2.36 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah ---------- 176

Tabel 2.37 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembangunan Teknologi Informasi ---------- 177
Tabel 2.38 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri ---------- 181
Tabel 2.39 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup ---------- 182
Tabel 2.40 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah untuk Melakukan Tindakan Pengurangan Tingkat Bahaya dan Kerentanan Daerah akibat Bencana---------- 184

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD)

Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Tapanuli Utara termasuk kedalam keresidenan Tapanuli yang dipimpin oleh seorang Residen Bangsa Belanda yang berkedudukan di Sibolga. Saat itu, Keresidenan Tapanuli dibagi menjadi 4 (empat) Afdeling (Kabupaten), salah satu diantaranya adalah *Afdeling Batak Landen* dengan Ibukotanya Tarutung, dan 5 (lima) *Onder Afdeling* (wilayah) yang meliputi yaitu : *Onder Afdeling* Silindung (Wilayah Silindung) ibukotanya Tarutung;

1. *Onder Afdeling Hoovlakte Van Toba* (Wilayah Humbang) ibukotanya Siborongborong;
2. *Onder Afdeling* Toba (Wilayah Toba) ibukotanya Balige;
3. *Onder Afdeling* Samosir (Wilayah Samosir) ibukotanya Pangururan;
4. *Onder Afdeling Dairi Landen* (Kabupaten Dairi) ibukotanya Sidikalang.

Tiap-tiap *Onder Afdeling* mempunyai satu Distrik (Kewedanaan) dipimpin seorang *Distrikchoolfd* bangsa Indonesia yang disebut Demang dan membawahi beberapa *Onder Distrikten* (Kecamatan) yang dipimpin oleh seorang Asisten Demang. Menjelang Perang Dunia II, distrik-distrik di seluruh keresidenan Tapanuli dihapuskan, para Asisten Demang yang ada di kantor Demang tersebut ditetapkan menjadi Asisten Demang di *Onder* Distrik bersangkutan. Kemudian tiap Onder Distrik membawahi beberapa negeri yang dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang disebut Negeri *Hoofd*.

Negeri-negeri ini terdiri dari beberapa kampung, yang dipimpin seorang Kepala Kampung yang disebut Kampung *Hoafd* dan juga diangkat serupa dengan pengangkatan Negeri *Hoofd.* Negeri dan Kampung *Hoofd* statusnya bukan pegawai negeri, tetapi pejabat-pejabat yang berdiri sendiri di negeri/kampungnya. Tugas utama Negeri dan Kampung *Hoof*d ialah memelihara keamanan dan ketertiban, memungut pajak/blasting/rodi dari penduduk Negeri/Kampung masing-masing. Pada waktu pendudukan tentara Jepang Tahun 1942-1945 struktur pemerintahan di Tapanuli Utara hampir tidak berubah, hanya namanya yang berubah seperti:

- Asisten Resident diganti dengan nama *Gunseibu* dan menguasai seluruh tanah batak dan disebut Tanah Batak Sityotyo.
- Demang-demang *Terbeschiking* menjadi *Guntyome* memimpin masing-masing yang disebut *Gunyakusyo*.
- Asisten Demang tetap berada di posnya masing-masing dengan nama *Huku Guntyo* dan kecamatannya diganti dengan nama *Huku Gunyakusyo*.
- Negeri dan Kampung *Hoofd* tetap memimpin Negeri/Kampungnya masing-masing dengan mengubah namanya menjadi Kepala Negeri dan Kepala Kampung.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sejarah perkembangan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara diawali dengan terbitnya *Besluit* Nomor 1 dari Residen Tapanuli DR. Ferdinan Lumbantobing pada tanggal 5 Oktober 1945 yang memuat Pembentukan Daerah Tapanuli dengan pengangkatan staf pemerintahannya, juga pengangkatan Kepala-kepala Luhak dalam Daerah Tapanuli. Afdeling Tanah Batak dirubah menjadi Luhak Tanah Batak, dan sebagai Kepala Luhak diangkat Bapak. Cornelius Sihombing (Alm). Dalam catatan sejarah Tapanuli Utara, beliaulah dianggap sebagai Bupati pertama Tapanuli Utara.

Kemudian sesuai dengan UU Drt. Nomor 7 Tahun 1956, di Daerah Propinsi dibentuk daerah otonom kabupaten. Salah satu kabupaten yang dibentuk dalam UU Drt. tersebut adalah Kabupaten Tapanuli Utara. Mengingat begitu luasnya wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, maka untuk meningkatkan daya guna pemerintahan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di daerah ini, maka pada tahun 1964 Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Dairi sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi.

Pada tahun 1998 untuk kedua kalinya Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Kemudian pada tahun 2003, Kabupaten

Tapanuli Utara untuk yang ketiga kalinya dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana uraian singkat sejarah perkembangan Pemerintahan Republik Indonesia di Kabupaten Tapanuli Utara yang diawali dengan terbitnya *Besluit* Nomor 1 dari Residen Tapanuli DR. Ferdinand Lumbantobing pada tanggal 5 Oktober 1945 yang memuat Pembentukan Daerah Tapanuli dan pengangkatan Kepala-kepala Luhak dalam daerah Tapanuli, maka tanggal 5 Oktober ditetapkan menjadi Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2003.

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai tindaklanjut sebagaimana yang diamanatkan pada :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7 — 109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, Dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2029
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 tentang 2025 tentang Perubahan P-APBD Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
17. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

18. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 100.3.3.2/105/III/2026 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025.

b. Data Geografis Daerah

Data geografis Kabupaten Tapanuli Utara meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Tapanuli Utara menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan serta potensi penggunaan lahan. Kabupaten Tapanuli Utara terletak di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara pada ketinggian antara 150-1.700 meter di atas permukaan laut.

Secara geografis letak Kabupaten Tapanuli Utara diapit atau berbatasan langsung dengan lima kabupaten yaitu, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Secara astronomis Kabupaten Tapanuli Utara berada pada posisi 1º20'- 2º 41' Lintang Utara dan 98º05' - 99º16' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara adalah 3.800,31 Km^2 yang terdiri dari luas daratan 3.793,71 Km^2 dan perairan Danau Toba seluas 6,60 Km^2. Perhitungan luasan ini didasarkan pada amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanui Utara di Provinsi Sumatera Utara, yang mengamanatkan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom KabupatenKabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Secara administratif Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 241 desa sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Nama dan Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Terhadap Total Luas
I	**Parmonangan**	**257.3**	**6,7**
1	Desa Manalu Purba	18.70	7,2
2	Desa Manalu Dolok	30.75	11,9
3	Desa Manalu	7.90	3,0
4	Desa Huta Julu	30.95	12,0
5	Desa Aek Raja	19.75	7,6
6	Desa Huta Tinggi	29.00	11,2
7	Desa Lobu Sunut	12.35	4,8
8	Desa Sisordak	12.45	4,8
9	Desa Hutatua	19.60	7,6
10	Desa Pertengahan	21.60	8,3
11	Desa Huta Julu Parbalik	16.50	6,4
12	Desa Horisan Ranggitgit	14.20	5,5
13	Desa Purba Dolok	12.30	4,7
14	Desa Batuarimo	11.30	4,3
II	**Adiankoting**	**502.9**	**13,2**
1	Desa Pagaran Lambung I	30.37	6,0
2	Desa Sibalanga	40.37	8,0
3	Desa Pagaran Lambung II	13.40	2,6
4	Desa Pagaran Lambung III	15.50	3,0
5	Desa Pagaran Pisang	26.87	5,3
6	Desa Adian Koting	31.50	6,2
7	Desa Dolok Nauli	62.75	12,4
8	Desa Banuaji IV	17.87	3,5
9	Desa Banuaji I	31.25	6,2
10	Desa Banuaji II	16.26	3,2
11	Desa Pansur Batu	36.42	7,2
12	Desa Pardomuan Nauli	48.00	9,5
13	Desa Siantar Naipospos	39.68	7,8
14	Desa Pagaran Lambung IV	56.25	11,1
15	Desa Pansur Batu II	24.27	4,8
16	Desa Pansur Batu I	12.14	2,4
III	**Sipoholon**	**189.2**	**4,9**
1	Desa Rura Julu Toruan	26.10	13,7
2	Desa Rura Julu Dolok	11.89	6,2
3	Desa Simanungkalit	13.35	7,0
4	Desa Hutauruk	6.92	3,6
5	Kel. Situmeang Habinsaran	17.49	9,2
6	Desa Situmeang Hasundutan	18.41	9,7
7	Desa Lobu Singkam	36.77	19,4
8	Desa Pagar Batu	17.49	9,2
9	Desa Sipahutar	3.19	1,6
10	Desa Hutaraja	3.57	1,8
11	Desa Tapian Nauli	5.19	2,7

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Terhadap Total Luas
12	Desa Hutaraja Hasundutan	18.42	9,7
13	Desa Hutaraja Simanungkalit	3.53	1,8
14	Desa Hutauruk Hasundutan	6.88	3,6
IV	**Tarutung**	**107.6**	**2,8**
1	Desa Siandor-Andor	8.50	7,8
2	Desa Hutapea Banuarea	8.25	7,6
3	Desa Parbubu Pea	1.25	1,1
4	Desa Parbubu II	4.50	4,1
5	Desa Parbubu Dolok	7.94	7,3
6	Desa Hutatoruan VIII	3.50	3,2
7	Desa Parbubu I	4.75	4,4
8	Desa Hutatoruan I	2.00	1,8
9	Desa Sosunggulon	2.62	2,4
10	Desa Parbaju Toruan	4.55	4,2
11	Desa Hapoltahan	1.44	1,3
12	Desa Hutatoruan IV	0.87	0,8
13	Desa Aek Siansimun	4.56	4,2
14	Kelurahan Hutatoruan V	1.50	1,3
15	Kelurahan Hutatoruan VI	3.25	3,0
16	Kelurahan Hutatoruan XI	0.20	0,1
17	Kelurahan Hutatoruan IX	0.85	0,7
18	Kelurahan Hutatoruan X	1.04	0,9
19	Kelurahan Hutatoruan VII	2.00	1,8
20	Kelurahan Partali Toruan	0.62	0,5
21	Desa Parbaju Tonga	3.50	3,2
22	Desa Simamora	3.40	3,1
23	Desa Hutagalung Siwaluompu	3.20	2,9
24	Desa Siraja Oloan	3.75	3,4
25	Desa Hutauruk	2.19	2,0
26	Desa Parbaju Julu	3.50	3,2
27	Desa Partali Julu	2.00	1,8
28	Desa Sitampurung	7.75	7,2
29	Desa Jambur Nauli	8.76	8,1
30	Desa Sihujur	5.00	4,6
31	Desa Hutatoruan III	0.44	0,4
V	**Siatas Barita**	**92.92**	**2,4**
1	Desa Simorangkir Julu	3.00	3,2
2	Desa Simorangkir Habinsaran	2.00	2,1
3	Desa Enda Portibi	2.70	2,9
4	Desa Sitompul	3.50	3,7
5	Desa Sangkaran	3.00	3,2
6	Desa Lumban Siagian Jae	1.50	1,6
7	Desa Lumban Siagian Julu	0.70	0,7
8	Desa Pansurnapitu	9.95	10,7
9	Desa Sidagal	9.88	10,6
10	Desa Lumban Siagian Jae	27.97	30,1
11	Desa Lumban Siagian Julu	26.77	28,8
12	Desa Siraja Hutagalung	1.95	2,1
VI	**Pahae Julu**	**165.9**	**4,3**
1	Desa Pangurdotan	6.54	3,9
2	Desa Lumban Gaol	9.54	5,7
3	Desa Lumban Tonga	8.38	5,0

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Terhadap Total Luas
4	Desa Sitolu Ama	6.00	3,6
5	Desa Simanampang	8.04	4,8
6	Desa Lobu Pining	13.29	8,0
7	Desa Hutabarat	6.34	3,8
8	Desa Lumban Dolok	9.15	5,5
9	Desa Simardangiang	8.59	5,1
10	Desa Sibaganding	8.79	5,3
11	Desa Lumban Garaga	9.64	5,8
12	Desa Janji Matogu	8.55	5,1
13	Desa Lumban Laean	8.75	5,2
14	Desa Onan Hasang	7.83	4,7
15	Desa Pantis	7.51	4,5
16	Desa Lontung Dolok	8.54	5,1
17	Desa Simataniari	8.28	4,9
18	Desa Simasom Toruan	7.52	4,5
19	Desa Simasom	14.62	8,8
VII	**Pahae Jae**	**203.2**	**5,3**
1	Desa Suka Maju	19.76	9,7
2	Desa Sitolu Ompu	45.00	22,1
3	Desa Siopat Bahal	8.00	3,9
4	Kelurahan Pasar Sarulla	3.00	1,4
5	Desa Nahornop Marsada	8.50	4,1
6	Desa Setia	34.00	16,7
7	Desa Parsaoran Samosir	14.00	6,8
8	Desa Pardomuan Nainggolan	4.00	1,9
9	Desa Parsaoran Nainggolan	6.00	2,9
10	Desa Pardamean Nainggolan	6.00	2,9
11	Desa Sigurunggurung	4.00	1,9
12	Desa Silangkitang	12.54	6,1
13	Desa Tadolok Nauli	38.40	18,9
VIII	**Purbatua**	**191.8**	**5,0**
1	Desa Bonani Dolok	25.75	13,4
2	Desa Selamat	32.00	16,6
3	Desa Purbatua	16.00	8,3
4	Desa Pardomuan Janji Angkola	5.00	2,6
5	Desa Parsaoran Janji Angkola	31.00	16,1
6	Desa Janji Nauli	34.00	17,7
7	Desa Sitolu Bahal	14.00	7,3
8	Desa Robean	12.00	6,2
9	Desa Huta Nagodang	6.80	3,5
10	Desa Sidua Bahal	7.00	3,6
11	Desa Sibulan-Bulan	8.25	4,3
IX	**Simangumban**	**150.0**	**3,9**
1	Desa Silosung	10.00	6,6
2	Desa Simangumban Jae	32.00	21,3
3	Desa Dolok Sanggul	30.00	20,1
4	Desa Aek Nabara	13.00	8,6
5	Desa Simangumban Julu	35.00	23,3
6	Desa Lobu Sihim	14.00	9,3
7	Desa Dolok Saut	10.00	6,6
8	Desa Pardomuan	6.00	4,0

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Terhadap Total Luas
X	**Pangaribuan**	**459.2**	**12,1**
1	Desa Parlombuan	23.25	5,0
2	Desa Lumban Sinaga	20.00	4,3
3	Desa Pansur Natolu	21.00	4,5
4	Desa Silantom Julu	29.00	6,3
5	Desa Silantom Tonga	12.20	2,6
6	Desa Rahut Bosi	18.50	4,0
7	Desa Batu Nadua	20.00	4,3
8	Desa Sampangul	10.50	2,2
9	Desa Harianja	12.00	2,6
10	Desa Batu Manumpak	39.00	8,4
11	Desa Pariksabungan	7.00	1,5
12	Desa Pakpahan	9.00	1,9
13	Desa Najumambe	25.00	5,4
14	Desa Purbatua	21.00	4,5
15	Desa Lumban Sormin	11.00	2,4
16	Desa Sibingke	12.00	2,6
17	Desa Godung Borotan	14.30	3,1
18	Desa Parratusan	22.00	4,7
19	Desa Sigotom Julu	14.30	8,7
20	Desa Silantom Jae	22.00	2,6
21	Desa Padang Parsadaan	40.00	2,6
22	Desa Parsorminan I	10.63	2,3
23	Desa Rahut Bosi Onan	18.50	4,0
24	Desa Hutaraja	10.50	2,2
25	Desa Sigotom Timur	14.30	3,1
26	Desa Sigotom Dolok Nauli	14.30	3,1
XI	**Garoga**	**567.5**	**14,9**
1	Desa Sibaganding	20.25	5,1
2	Desa Padang Siandomang	69.25	12,2
3	Desa Parinsoran Pangorian	54.25	9,5
4	Desa Aek Tangga	49.25	8,6
5	Desa Simpang Bolon	69.83	12,3
6	Desa Garoga Sibargot	74.25	13,0
7	Desa Gonting Garoga	29.25	5,1
8	Desa Sibalanga	49.25	8,6
9	Desa Parsosoran	28.04	4,9
10	Desa Lontung Jae I	39.25	6,9
11	Desa Lontung Jae II	34.25	6,0
12	Desa Gonting Salak	30.25	5,3
13	Desa Parmanuhan	11.21	1,9
XII	**Sipahutar**	**408.2**	**10,7**
1	Desa Onan Runggu I	30.50	7,4
2	Desa Sipahutar III	11.50	2,8
3	Desa Siabal-Abal I	17.91	4,3
4	Desa Siabal-Abal II	12.82	3,1
5	Desa Aek Nauli II	4.32	1,0
6	Desa Aek Nauli III	6.65	1,6
7	Desa Aek Nauli I	10.40	2,5
8	Desa Sabungan Nihuta V	27.47	6,7
9	Desa Siabal-Abal III	14.00	3,4
10	Desa Sipahutar II	6.00	1,4
11	Desa Sipahutar I	11.00	2,6

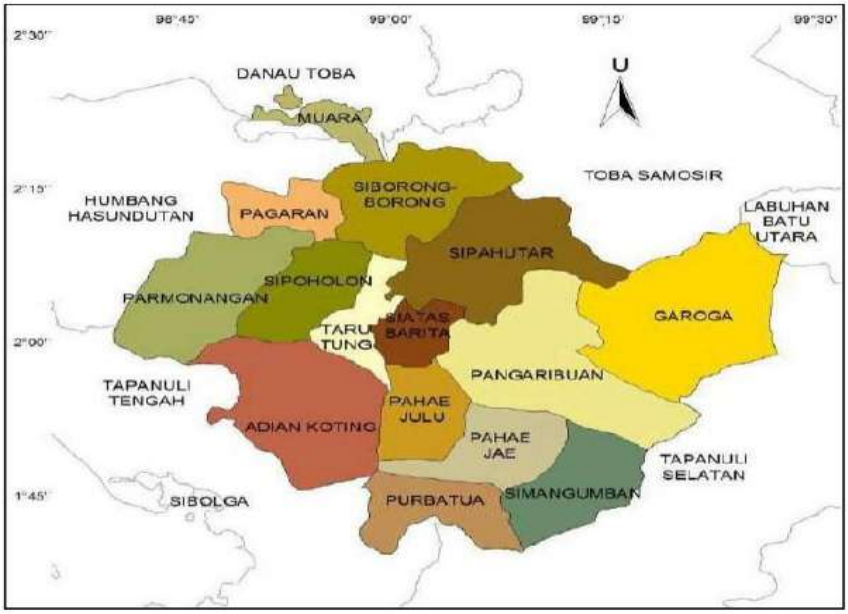
No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Terhadap Total Luas
12	Desa Onan Runggu III	30.50	7,4
13	Desa Onan Runggu II	30.50	7,4
14	Desa Onan Runggu IV	6.50	1,5
15	Desa Sabungan Nihuta I	7.00	1,7
16	Desa Sabungan Nihuta II	17.00	4,1
17	Desa Sabungan Nihuta III	16.00	3,9
18	Desa Sabungan Nihuta IV	39.60	9,7
19	Desa Tapian Nauli II	20.50	5,0
20	Desa Tapian Nauli III	44.25	10,8
21	Desa Tapian Nauli I	10.50	2,5
22	Desa Siabal - Abal IV	7.50	1,8
23	Desa Aek Nauli IV	6.03	1,4
24	Desa Aek Nauli VI	12.59	3,0
25	Desa Siabal -Abal V	7.18	1,7
XIII	**Siborongborong**	**279.9**	**7,3**
1	Desa Lumban Tonga-Tonga	8.90	3,1
2	Desa Paniaran	9.70	3,4
3	Desa Bahal Batu III	14.40	5,1
4	Desa Bahal Batu II	15.40	5,5
5	Desa Bahal Batu I	11.30	4,0
6	Desa Sitabo-Tabo	6.97	2,4
7	Desa Siborongborong I	10.00	3,5
8	Desa Siaro	6.40	2,2
9	Desa Sitampurung	13.50	4,8
10	Kel. Pasar Siborongborong	5.00	1,7
11	Desa Pohan Tonga	14.70	5,2
12	Desa Lobu Siregar II	16.10	5,7
13	Desa Hutabulu	14.30	5,1
14	Desa Lobu Siregar I	22.30	7,9
15	Desa Pohan Jae	27.30	9,7
16	Desa Pohan Julu	31.50	11,2
17	Desa Parik Sabungan	17.51	6,2
18	Desa Siborongborong II	14.63	5,2
19	Desa Sigumbang	8.50	3,0
20	Desa Sitabotabo Toruan	4.43	1,5
21	Desa Silait-Lait	7.07	2,5
XIV	**Pagaran**	**138.0**	**3,6**
1	Desa Sibaragas	8.80	6,3
2	Desa Lumban Motung	7.45	5,4
3	Desa Banualuhu	7.40	5,3
4	Desa Lumban Julu	9.70	7,0
5	Desa Lubis	5.80	4,2
6	Desa Lumban Ina-Ina	9.70	7,0
7	Desa Pagaran	8.90	6,4
8	Desa Parhorboan	9.50	6,8
9	Desa Sipultak	6.03	4,3
10	Desa Dolok Saribu	19.00	13,7
11	Desa Lumban Silintong	15.00	10,8
12	Desa Simamora Hasibuan	12.14	8,7
13	Desa Sipultak Dolok	6.32	4,5
14	Desa Hasibuan	12.31	8,9

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Terhadap Total Luas
XV	**Muara**	**79.75**	**2,1**
1	Desa Huta Lontung	9.60	12,0
2	Desa Bariba Niaek	3.59	4,5
3	Desa Silali Toruan	3.75	4,7
4	Desa Hutana Nagodang	4.96	6,2
5	Desa Unte Mungkur	4.59	5,7
6	Desa Batu Binumbun	2.78	3,4
7	Desa Simatupang	4.20	5,2
8	Desa Aritonang	4.36	5,4
9	Desa Dolok Martumbur	4.37	5,4
10	Desa Sitanggor	4.99	6,2
11	Desa Huta Ginjang	11.74	14,7
12	Desa Silando	8.88	11,1
13	Desa Papande	4.40	5,5
14	Desa Sibandang	4.61	5,7
15	Desa Sampuran	2.93	3,6
	JUMLAH.....	**3,793.71**	

Sumber : RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

Kecamatan Garoga menjadi kecamatan terluas dari 15 kecamatan yang ada yaitu sekitar 567,58 Km^2 atau 14,96 persen dari luas kabupaten dan kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Muara sekitar 79,75 Km^2 atau 2,10 persen, sementara Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga menjadi desa terluas yaitu sekitar 74,25 Km^2 dan Kelurahan Hutatoruan III Kecamatan Tarutung merupakan desa terkecil dengan luas 0,44 Km^2. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki bentang alam dengan struktur alam yang melintasi Pegunungan Bukit Barisan, memanjang dari Utara ke Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara



Sumber : RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

c. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara adalah 335.039 jiwa terdiri dari laki-laki sejumlah 166.032 jiwa dan perempuan sejumlah 169.007 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Siborongborong dengan penduduk sebanyak 55.593 jiwa, sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Purbatua dengan penduduk sebanyak 8.626 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tarutung	22.124	23.006	45.130
2.	Siatas Barita	7.741	7.864	15.605
3.	Adiankoting	7.691	7.787	15.478
4.	Sipoholon	12.863	13.191	26.054
5.	Pahae Julu	7.070	7.333	14.403
6.	Pahae Jae	5.995	6.335	12.330
7.	Simangumban	4.304	4.354	8.658
8.	Purbatua	4.215	4.411	8.626
9.	Siborongborong	27.694	27.899	55.593
10.	Pagaran	10.066	10.232	20.298
11.	Parmonangan	7.823	7.703	15.526

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
12.	Sipahutar	14.975	15.016	29.991
13.	Pangaribuan	15.814	16.227	32.041
14.	Garoga	9.970	9.672	19.642
15.	Muara	7.687	7.977	15.664
J u m l a h		**166.032**	**169.007**	**335.039**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2025

1.c.1 Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Data laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

Tabel 1.3
Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Tapanuli Utara

No	Kecamatan	Tahun 2023-2024 (%)	Tahun 2024-2025 (%)
1	Tarutung	1,39	0,315
2	Siatas Barita	1,33	0,245
3	Adian Koting	1,05	0,344
4	Sipoholon	2,02	0,720
5	Pahae Julu	2,47	0,223
6	Pahae Jae	1,50	0,081
7	Simangumban	0,38	1,079
8	Purbatua	0,84	0,480
9	Siborongborong	2,26	1,392
10	Pagaran	1,53	0,684
11	Parmonangan	1,49	0,480
12	Sipahutar	1,07	0,484
13	Pangaribuan	2,06	0,776
14	Garoga	1,94	0,820
15	Muara	0,71	0,682
Jumlah		**1,62**	**1,075**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2025

d. Jumlah Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN)

1.d.1 Jumlah Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai turunannya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021, Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 berjumlah 44 unit yang terdiri dari :

Perangkat Daerah	**:**	**Jumlah**
Sekretariat Daerah Kabupaten	:	1
Sekretariat DPRD	:	1
Inspektorat Daerah Kabupaten	:	1
Dinas	:	20
Badan	:	6
Kecamatan	:	15
Jumlah	**:**	**44**
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Tapanuli Utara :	:	50
UPTD Dinas PUPR	*:*	*5*
UPTD Dinas Ketenagakerjaan	*:*	*1*
UPTD Dinas Ketahanan Pangan	*:*	*4*
UPTD Dinas Lingkungan Hidup	*:*	*4*
UPTD Dinas Perhubungan	*:*	*2*
UPTD Dinas Perpustakaan	*:*	*3*
UPTD Dinas Pariwisata	*:*	*2*
UPTD Dinas Pertanian	*:*	*2*
UPTD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	*:*	*4*
UPTD Dinas Kesehatan	*:*	*22*
UPTD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	*:*	*1*

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2025

1.d.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

1.d.2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Tapanuli Utara yang terdata sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 3.975 orang, dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4
Data PNS Menurut Jabatan

No	PD / UNIT KERJA	ESELON (YANG TERISI)						JFU	JFT	JLH
		II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B			
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	1	6	7	-	1	-	76	18	109
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	1	5	-	1	-	22	23	52
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	-	1	3	-	2	-	15	5	26
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	3	2	-	17	3	26
5	Badan Pendapatan Daerah kab. Tapanuli Utara	-	1	1	2	7	-	15		26
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	8	-	13	2	29
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	2	-	18	9	35
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	9	-	12	-	26
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapanuli Utara	-		1	3	1	-	20	2	27
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	1	-	21	4	32
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	2	5	11	3	26
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	2	-	9	5	22
13	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	4	3	16	60	611	695

No	PD / UNIT KERJA	ESELON (YANG TERISI)						JFU	JFT	JLH
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	2	3	39	5	55
15	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	1	4	17	7	35
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	10	1	21	-	37
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	2	-	10	5	22
18	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara	-	1	-	4	3	1	7	3	19
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	2	2	36	71	117
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	1	-	8	5	19
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	2	1	-	8	3	16
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	5	4	4	56	10	81
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	7		117	1655	1785
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	1	4	19	3	33
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	2	-	8	7	23
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	1	-	9	6	21
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	2	1	29	6	44
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	1	1	1	10	2	17
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	3	8	-	17		29
30	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	-	-	2	5	-	-	28	173	208
31	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	1	2	1	5	-	9
32	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	3	-	7	-	12
33	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara		-	1	1	5	2	6	-	15
34	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	3	-	7	-	12

No	PD / UNIT KERJA	ESELON (YANG TERISI)						JFU	JFT	JLH
35	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	3	3	15	-	23
36	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	3	3	14	-	22
37	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	1	4	2	7	-	14
38	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	1	2	3	-	8
39	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	-	2	6	-	10
40	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	4	2	8	-	16
41	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	6	18	-	31
42	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	1	-	1	8	-	10
43	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	1	5	1	11	-	18
44	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	-	10	-	17
45	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	11	23	30	-	66
TOTAL		**1**	**30**	**53**	**109**	**143**	**90**	**903**	**2646**	**3975**

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2025

Tabel 1.5
Data PNS Menurut Golongan

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																JLH
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	1	1	1	5	8	14	35	19	6	5	6	8	-	109
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	1	4	8	6	5	9	6	11	1	-	52
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	1	7	1	6	5	2	3	-	-	26

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																JLH
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	5	4	5	6	1	4	-	-	-	26
5	Badan Pendapatan Daerah kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	4	7	4	4	2	2	2	-	-	26
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6	8	5	-	1	1	-	29
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	5	4	5	7	4	8	1	1	-	35
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	5	4	3	-	1	-	26
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	-	2	2	2	3	6	-	4	2	3	2	-	-	27

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																JLH
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	1	-	-	3	2	3	10	4	3	4	1	1	-	32
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	4	1	6	4	6	2	1	1	-	26
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	5	6	2	1	1	-	22
13	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	6	8	50	134	161	110	169	31	16	10	-	695
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	6	4	1	4	9	6	4	6	8	5	1	1	-	55
15	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	6	2	4	4	11	5	-	1	-	35
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	1	-	-	2	6	10	6	5	3	2	1	1	-	37
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	5	1	4	2	5	3	1	1	-	22

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																JLH
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
18	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	3	3	2	-	-	19
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	13	3	19	7	28	7	14	14	8	2	2	-	117
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	5	3	1	1	-	19
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	5	1	1	-	16
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	3	3	4	20	14	13	9	8	5	1	1	-	81
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	2	14	11	22	32	86	349	236	428	172	284	149	-	1785
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	3	4	4	3	2	9	4	3	-	-	33
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	6	5	1	-	-	23

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																JLH
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	4	3	5	2	-	-	21
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	6	4	4	11	12	5	1	-	-	44
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	1	2	3	-	2	2	4	1	-	-	17
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	3	8	7	4	5	1	1	-	-	29
30	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	-	-	1	-	-	-	47	14	34	23	21	46	9	10	3	-	208
31	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	2	1	-	-	-	9
32	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	1	-	1	4	-	1	1	3	-	1	-	-	12

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																JLH
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
33	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	3	2	1	-	-	-	15
34	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	2	2	1	-	-	12
35	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	5	8	2	2	1	4	-	-	-	23
36	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	1	11	2	1	1	4	1	-	-	-	22
37	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	5	2	1	2	3	1	-	-	-	14
38	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	-	-	-	-	8
39	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	2	-	-	-	10
40	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	5	2	-	1	-	-	16
41	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	2	-	-	7	5	5	6	4	1	1	-	-	31

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																JLH
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
42	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	3	3	1	2	-	1	-	-	-	-	10
43	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	9	-	4	1	2	1	-	-	-	18
44	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	6	2	2	2	3	1	-	-	-	17
45	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	7	11	7	15	22	3	1	-	-	66
TOTAL		-	-	**2**	**11**	**41**	**35**	**143**	**285**	**446**	**720**	**562**	**847**	**334**	**363**	**186**	-	**3975**

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2025

Tabel 1.6
Data PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	1	-	14	-	-	8	4	64	18	109
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	4	-	-	2	-	30	16	52
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	-	-	6	-	-	1	-	14	5	26
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	-	-	3	-	-	5	-	14	4	26
5	Badan Pendapatan Daerah kab. Tapanuli Utara	-	-	7	-	-	4	-	9	6	26
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	2	-	-	7	-	14	6	29
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	3	-	-	5	-	17	10	35
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	1	5	-	-	-	-	15	5	26
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapanuli Utara	1	2	12	-	-	-	-	9	3	27
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	-	1	5	-	-	3	-	15	8	32
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	-	-	2	-	-	3	-	14	7	26
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	-	-	3	-	-		-	17	2	22
13	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	-	-	33	7	-	267	10	327	51	695
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	7	4	17	-	-	2	-	22	3	55
15	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	5	-	-	4	1	20	5	35
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	-	1	15	-	-	4		12	5	37

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	5	1	12	4	22
18	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara	-		1	-	-	2	-	13	3	19
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	-	5	39	-	-	3	-	61	9	117
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	-	-	5	-	-	-	-	9	5	19
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	13	3	16
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	-	1	29	-	-	10	-	31	10	81
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	1	3	181	2	19	18	-	1508	53	1785
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	-	2	9	-	-	2	-	13	7	33
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	3	-	15	5	23
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	-	12	7	21
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	-	-	4	1	-	14	-	20	5	44
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	-	1	5	-	-	1	1	5	4	17
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	-	-	10	-	-	1	1	15	2	29
30	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	-	1	17	-	-	99	3	64	24	208
31	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	-	4	-	-	-	1	-	4	-	9
32	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	1	-	4	-	-	2	-	5	-	12
33	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara	-	-	7	-	-	-	1	7	-	15
34	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	-	-	3	-	-	2		4	3	12
35	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	-	-	13	-	-	2	1	4	3	23

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
36	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	-	-	13	-	-	4	-	3	2	22
37	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	-	-	6	-	-	1	-	7	-	14
38	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	2	-	-	-	1	4	1	8
39	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	-	-	4	-	-	2	1	2	1	10
40	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	-	-	6	-	-	2	-	6	2	16
41	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	-	1	11	-	-	5	-	11	3	31
42	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	-	1	3	-	-	2	-	3	1	10
43	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	-	-	10	-	-	3	-	5	-	18
44	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	-	-	10	-	-	-	1	5	1	17
45	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	-	-	20	-	1	5	2	33	5	66
TOTAL		**11**	**28**	**548**	**10**	**20**	**506**	**28**	**2507**	**317**	**3975**

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2025

1.d.2.2 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Tapanuli Utara 31 Desember 2025 sebanyak 2.937 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.7
Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Golongan

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																	JLH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	8
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5	Badan Pendapatan Daerah kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	12
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																	JLH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	8
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	560	-	42	20	-	-	-	-	-	-	-	622
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
15	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	17	-	2	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	99

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																	JLH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	10	-	1834	-	-	-	-	-	-	-	-	1844
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	13

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																	JLH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	70	-	4	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	79
30	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	-	-	-	-	-	-	172	-	4	14	-	-	-	-	-	-	-	190
31	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
32	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
33	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
35	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
36	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
37	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
38	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
39	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
40	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
41	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
42	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																	JLH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
43	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
44	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**87**	**-**	**779**	**-**	**2037**	**34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2937**

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2025

Tabel 1.8
Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Kualifikasi Pendidikan

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JLH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	3	-	5	-	8
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
5	Badan Pendapatan Daerah kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	11	-	12
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-		-	0

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JLH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	3	-	5	-	8
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
13	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	560	13	26	23	622
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
15	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
18	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	-	-	17	-	-	2	1	79	-	99
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	-	3	-	5
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	10	3	1831	-	1844
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	3	-	1	-	4
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	-	6	-	8
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	-	6	-	8
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	-	11	-	13
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	-	-	70	-	-	4	-	5	-	79

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JLH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
30	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	-	-	-	-	-	172	1	3	14	190
31	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
32	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
33	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
34	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
35	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
36	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
37	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
38	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
39	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
40	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
41	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
42	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
43	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
44	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
45	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL		**-**	**-**	**87**	**-**	**-**	**779**	**18**	**2016**	**37**	**2937**

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2025

Tabel 1.9
Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Jabatan

No	PD / UNIT KERJA	JABATAN			JUMLAH
		TEKNIS	PENDIDIKAN	KESEHATAN	
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	8	-	-	8
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	0
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	0

No	PD / UNIT KERJA	JABATAN			JUMLAH
		TEKNIS	PENDIDIKAN	KESEHATAN	
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	2	-	-	2
5	Badan Pendapatan Daerah kab. Tapanuli Utara	4	-	-	4
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	12	-	-	12
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tapanuli Utara	3	-	-	3
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	3	-	-	3
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	0
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	8	-	-	8
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	3	-	-	3
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	2	-	-	2
13	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	-	-	622	622
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	0
15	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	4	-	-	4
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	3	-	-	3
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	1	-	-	1
18	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	0
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	99	-	-	99
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	0
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	5	-	-	5
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	1	-	-	1
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	20	1824		1844
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	4	-	-	4
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	8	-	-	8

No	PD / UNIT KERJA	JABATAN			JUMLAH
		TEKNIS	PENDIDIKAN	KESEHATAN	
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	2	-	-	2
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	8	-	-	8
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	13	-	-	13
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	79	-	-	79
30	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	3	-	187	190
31	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	0
32	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	0
33	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara	1	-	-	1
34	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	0
35	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	0
36	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	0
37	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	0
38	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	2	-	-	2
39	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	0
40	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	2	-	-	2
41	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	2	-	-	2
42	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	0
43	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	1	-	-	1
44	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	1	-	-	1
45	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	0
TOTAL		**304**	**1824**	**809**	**2937**

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2025

e. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.e.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 1.449.723.647.639,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.439.342.162.185,60 atau mencapai sebesar 99,28 persen. Secara terinci target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.10
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara Pada Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Pendapatan Asli Daerah	**154.000.000.000,00**	**156.540.675.918,60**	**101,64**
Pajak Daerah	38.503.750.000,00	37.626.009.629,67	97,72
Retribusi Daerah	94.877.368.000,00	96.559.544.688,00	101,77
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.057.524.807,00	9.057.524.807,00	100,00
Lain-Lain PAD yang Sah	11.561.357.193,00	13.297.596.793,93	115,01
Pendapatan Transfer	**1.261.743.272.124,00**	**1.249.320.018.091,00**	**99,01**
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	976.179.427.000,00	995.460.589.375,00	101,97
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	207.905.004.000,00	178.830.291.034,00	86,01

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.658.841.124,00	75.029.137.682,00	96,61
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**33.980.375.515,00**	**33.481.468.176,00**	**98,53**
Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.980.375.515,00	28.481.468.176,00	98,27
Jumlah	**1.449.723.647.639,00**	**1.439.342.162.185,60**	**99,28**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKAD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025, un-Audited

1.e.2 Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Target belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 1.394.378.083.538,86 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.338.924.060.440,91 atau mencapai sebesar 96,02 persen. Secara terinci target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.11
Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Tapanuli Utara Pada Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Belanja Operasi	**1.029.204.042.106,86**	**1.010.903.595.640,83**	**98,22**
Belanja Pegawai	695.133.162.874,84	680.660.593.870,00	97,91
Belanja Barang dan Jasa	315.377.058.947,02	312.464.431.934,83	99,07
Belanja Bunga	1.305.525.006,00	1.305.525.006,00	100,00
Belanja Hibah	15.790.059.080,00	15.127.032.130,00	95,80
Belanja Bantuan Sosial	1.598.236.199,00	1.346.012.700,00	84,21
Belanja Modal	**63.350.601.533,00**	**60.428.751.848,08**	**95,38**
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.553.056.681,00	20.939.549.180,71	92,84
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.497.281.776,00	6.342.671.277,29	84,59
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.859.905.960,00	18.687.651.374,08	99,08
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.440.357.116,00	14.458.880.016,00	100,12
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Belanja Tidak Terduga	**20.482.560.075,00**	**15.383.387.034,00**	**75,10**
Belanja Transfer	**281.340.879.824,00**	**252.208.325.918,00**	**89,64**
Jumlah	**1.394.378.083.538,86**	**1.338.924.060.440,91**	**96,02**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKAD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025, un-Audited

1.e.3 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Target pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. (55.345.564.100,14) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. (40.813.098.514,94) atau mencapai sebesar 73,74 persen. Secara terinci target dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.12
Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Utara Pada Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Penerimaan Pembiayaan	**10.404.650.909,86**	**10.624.390.091,06**	**102,11**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.404.650.909,86	10.624.390.091,06	102,11
Pengeluaran Pembiayaan	**65.750.215.010,00**	**51.437.488.606,00**	**78,23**
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	64.750.215.010,00	51.437.488.606,00	79,43
Jumlah	**(55.345.564.100,14)**	**(40.813.098.514,94)**	**73,74**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKAD Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2025, un-Audited

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan yang ditampilkan juga didasarkan pada hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan kondisi tersebut dan hasil pelaksanaan RKPD maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang menyeluruh

   Pemenuhan infrastruktur dasar adalah proses membangun, memelihara, dan meningkatkan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti jalan, jembatan, gedung, sistem air bersih, sistem sanitasi, sistem energi, dan komunikasi. Pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah, bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan infrastruktur dasar guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan infrastruktur dasar juga penting untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan mobilitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah berupaya maksimal dalam pemerataan bagi pembangunan infrastruktur akan tetapi masih perlu akselerasi dalam Pemenuhan terkait Infrastruktur Jalan Mantap, Pemenuhan Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Sampah, Penyediaan Rumah layak Huni, Penyediaan Rumah bagi korban Bencana Alam, Peningkatan Kualitas Prasara Sarana Utilitas Umum.

2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian serta ketahanan pangan yang berkelanjutan

   Pertanian merupakan sektor yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Sektor pertanian juga merupakan tulang punggung perekonomian dan penyumbang PDRB (atas dasar harga berlaku) terbesar bagi Kabupaten Tapanuli Utara yakni 44,91 persen

dari total PDRB tahun 2023. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor pertanian dihadapakan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian, seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim global, kecilnya status kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, dan kurangnya penyediaan pupuk dan obat-obatan pertanian serta masih rendahnya pemanfaatan potensi alat dan mesin pertanian. Pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas masih diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Sarana dan prasarana pertanian merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung perkembangan atau kemajuan pertanian terutama untuk mencapai tujuan terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dukungan sarana dan prasarana pertanian bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan.

3. Lemahnya kapasitas dan daya saing produk UMKM serta pengembangan Industri Kecil Menengah

   UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan IKM (Industri Kecil dan Menengah) merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan UMKM terbukti menjadi penggerak roda perekonomian nasional dengan kontribusi dan perannya dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding entitas bisnis lainnya, membuktikan bahwa UMKM mampu menekan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan. Sektor UMKM dan IKM menjadi salah satu sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam perjalanannya, di era globalisasi saat ini UMKM dan IKM semakin dihadapkan dengan perubahan gaya hidup dan selera pasar, Perubahan tersebut menuntut peningkatan

kapasitas pelaku UMKM dan IKM untuk kreatif dan inovatif menghasilkan produk-produk berkualitas sesuai perkembangan pasar. Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan IKM di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilakukan melalui pendampingan dan pelatihan.

4. Belum optimalnya layanan Pendidikan dan Kesehatan

   Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sudah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan seperti peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendidik dan Kesehatan melalui rekrutmen, pelatihan, dan insentif yang tepat, peningkatan aksesibilitas serta sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan, program-program pemberdayaan masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan misalnya melalui kampanye edukasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan, namun masih perlu optimalisasi dalam meningkatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan terutama dalam meningkatkan capaian rata rata lama sekolah dimana perlu aksesibilitas pendidikan yang merata serta pemerataan tenaga pendidik maupun kesehatan di daerah terpencil maupun sangat terpencil.

5. Belum optimalnya penanganan stunting

   Stunting merupakan masalah Kesehatan yang terjadi pada anak-anak akibat malnutrisi kronis dan kekurangan gizi. Berbagai upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menurunkan prevalensi stunting seperti pengalokasian anggaran bagi program -program gizi dan kesehatan anak serta ibu hamil, pemantauan pertumbuhan serta imunisasi anak, fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga esehatan berkualitas, serta upaya pembangunan sanitasi dan akses air bersih, namun sesuai data studi status gizi Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara masih memiliki angka stunting yang tinggi sehingga perlu penanganan yang tepat melalui koordinasi yang terpadu dari berbagai pihak serta

perencanaan yang tepat bagi pengalokasian anggaran dalam mengatasi permasalahan stunting.

6. Belum optimalnya gerakan sadar wisata

   Keterlibatan serta peran serta masyarakat sebagai pelaku wisata di seluruh destinasi wisata yanga ada masih belum optimal, baik dalam pemenuhan aksesbilitas, amenitas serta atraksi wisata. Dukungan Pemerintah masih sangat dibutuhkan dalam hal peningkatan kapasitas kelompok kelompok serta masyarakat pelaku wisata.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Setelah ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025–2030, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 2030, dan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, maka dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun bersamaan dengan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029, yang memuat visi dan misi

Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, maka visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029, yaitu :

"Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara Yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan"

dan misi Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

1. Memajukan Ekonomi Masyarakat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
2. Memajukan Ekonomi Melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi
3. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan
4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Risiko Bencana
5. Penerapan Kajian Budaya dan Kearifan Lokal Mulai dari Pendidikan Dasar untuk Memperkuat Karakter Terbaik Masyarakat sehingga Mampu Meminimalisir Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial
6. Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan Kekayaan Budaya dan Kearifan Lokal
7. Memperkuat Reformasi Birokrasi untuk Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan
8. Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia
9. Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang Maju. Berbudaya. dan Berkelanjutan						
1	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat					
	1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat				
		1.1.1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif			
				Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal
		1.1.2	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian			
				Meningkatnya Usaha Kecil Menengah menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)
				Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah yang sudah memiliki legalitas usaha	Pertumbuhan Wirausaha	
				Meningkatnya Koperasi yang aktif	Persentase Koperasi Aktif	Program Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
		1.1.3	Meningkatnya nilai tambah perdagangan			

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya informasi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		1.1.4	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja			
				Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya (%)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		1.1.5	Meningkatnya daya saing industri			
				Meningkatnya Realisasi Invetasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2	**Memajukan Ekonomi Melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi**					
	2.1	Meningkatnya produktivitas pertanian				
		2.1.1	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor Pertanian			
				Meningkatnya Distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Tersedianya dan berkembangnya Prasarana Pertanian (Peternakan)	Prasarana Pertanian yang Tersedia/ Dikembangkan	
				Meningkatnya Distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
					Peningkatan Produksi Hortikultura	
					Peningkatan Produksi Perkebunan	
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (peternakan)	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	
		2.1.2	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor Perikanan			
				Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaaan Perikanan Budidaya
		2.1.3	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau			
				Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan masyarakat
				Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Penanganan kerawanan pangan
				Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Penyuluhan pertanian
3	**Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata. Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan**					
	3.1	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia				

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
		3.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan			
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Program Pengelolaan pendidikan
					tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam SD	
					tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam SMP	
					tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	
				Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks pemerataan guru (IPG) jenjang PAUD	Program Pendidik dan Tenaga pendidikan
					Indeks pemerataan guru (IPG) jenjang SD	
					Indeks pemerataan guru (IPG) jenjang SMP	
					Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan Jenjang PAUD	
					Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan Jenjang SD	

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
					Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan Jenjang SMP	
				Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Program Pembinaan Perpustakaan
		3.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat			
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Progam pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	
					Laporan kinerja administrasi dan keuangan BLUD	
				Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis Tenaga Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		3.1.3	Meningkatnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan			

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
		3.1.4	Meningkatnya Kesetaraan Gender			
				Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	
				Meningkatnya pemanfataan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan. Evaluasi. dan/atau Penyusunan Kebijakan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
4	**Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Risiko Bencana**					
	4.1	Meningkat**nya** layanan infrastruktur dasar yang **berkelanjutan**				
		4.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas			
				Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan yang Ditangani	Program Penyelenggaraan jalan
					Persentase Jembatan yang Ditangani	
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
					Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	
					Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Terpasang	
					Koordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	
		4.1.2	**Meningkatnya Pemenuhan** akses hunian layak. terjangkau dan berkelanjutan			
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman	Program Pengolahan dan Pengembangan SPAM
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi Aman	Program Pengolahan dan Pengembangan SPAL
				Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana	Program Pengembangan Perumahan
				Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	Program Kawasan Pemukiman
				berkurangnya kawasan kumuh daerah	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Program Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
5	**Penerapan Kajian Budaya dan Kearifan Lokal Mulai dari Pendidikan Dasar untuk Memperkuat Karakter Terbaik Masyarakat sehingga Mampu Meminimalisir Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial**					
	5.1	Meningkatnya Pendidikan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal				
		5.1.1	Meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal			
				Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program Pengembangan Kurikulum
				Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Buku Teks Utama Bahasa dan Sastra daerah sesuai kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
	5.2	Terwujudnya Keluarga Berkualitas				
		5.2.1	Meningkatnya Pembangunan Keluarga			
				Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Program pengendalian penduduk
					Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Program pembinaan keluarga berencana
					Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	
		5.2.2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat			
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
				Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
				Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	
				Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	
6	**Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan Kekayaan Budaya dan Kearifan Lokal**					
	6.1	**Terjaganya** kelestarian budaya dan kearifan lokal serta Pengembangan Pariwisata				
		6.1.1	Terpeliharanya ekosistem kebudayaan			

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
		6.1.2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang holistik			
				Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	Program Peningkatan Daya tarik destinasi wisata
				Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
				Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif
7	**Memperkuat Reformasi Birokrasi. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan**					
	7.1	**Terwujudnya** pemerintahan yang transparan dan akuntabel				
		7.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan			
				Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Program pengelolaan keuangan daerah
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	
				Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
					Persentase Penurunan SILPA	
				Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	
				Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program pengelolaan barang milik daerah
				Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program penyelenggaraan pengawasan
				Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi
					Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
		7.1.2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah			
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	
				Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berbasis kelitbangan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	Program penelitian dan pengembangan daerah

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
		7.1.3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
				Meningkatnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan	Persentase capaian realisasi pajak daerah	Program pengelolaan pendapatan daerah
				Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan Pajak Daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	
				Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	
		7.1.4	Meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas			
				Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program kepegawaian daerah
				Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	
				Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai baik	
				Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar. Manajerial dan Fungsional	Program pengembangan sumber daya manusia
				Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Pelatihan dan Pendidikan yang Dilaksanakan	
				Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	
				Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	
		7.1.5	Meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Daerah			
				Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial yang dilaksanakan	Program perlindungan jaminan sosial
				Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase PMKS di Luar Panti Sosial yang ditangani	Program rehabilitasi sosial

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	Program pendaftaran penduduk
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	
				Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak umur 0-18 tahun	Program pencatatan sipil
				Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggunjawaban nasional	Program pengelolaan arsip
		7.1.6	Meningkatnya pembangunan teknologi informasi			
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase jumlah PD yang melaksanakan diseminasi dan layanan informasi publik melalui website PPID	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang sudah terintegrasi	Program pengelolaan aplikasi informatika
				Meningkatnya kelengkapan data statistik sektoral yg memenuhi prinsip standar SDI	Persentase Kelengkapan Data Statistik Sektoral yang memenuhi prinsip standar SDI	Program penyelenggaraan statistik sektoral
8	**Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia**					

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
	8.1	Meningkat**nya** kemandirian desa dengan memanfaatkan potensi lokal				
		8.1.1	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri			
				Meningkatnnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program penataan desa
				Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Program peningkatan kerjasama desa
				Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Program administrasi pemerinatahan desa
					Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	
9	**Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana**					
	9.1	Meningkat**nya** kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana				
		9.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
				Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Udara	
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
		9.1.2	Meningkatnya Kapasitas Daerah untuk melakukan			

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
			tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana			
				Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	

Sumber data : P-RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Tabel 1.13
Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2025

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
1.	Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penanganan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota 2. Terselenggaranya pengelolaan dan upaya pengembangan Sistem Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1. Terselenggaranya Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 2. Terselenggaranya penataan bangunan melalui pemberian izin sesuai ketentuan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaranya pemenuhan PSU Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
		Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah pemenuhan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Peningkatan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pemanfaatan Sistem Informasi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan	Meningkatkan Petumbuhan UMKM	Program pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang Diikutsertakan dalam Pelatihan dan Pengembangan Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3. Jumlah pemenuhan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4. Terlaksananya pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
					Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5. Jumlah pemenuhan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 6. Terlaksananya pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Peningkatan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pemanfaatan Sistem Informasi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan	Meningkatkan Petumbuhan UMKM	Program pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang Diikutsertakan dalam Pelatihan dan Pengembangan Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
		Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatkan Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pendampingan dan fasilitasi serta forum dialog pemerintah dengan badan usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatkan Kontribusi PDRB sector Industri Pengolahan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatkan Koperasi Berkualitas	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Berbadan Hukum yang Diawasi dan Diperiksa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang Diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
3.	Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan	Menurunnya Daerah Rentan Pangan	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Dinas Pertanian
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Dinas Pertanian
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatkan Diversifikasi Pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Jenis Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Dinas Ketahanan Pangan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
		Meningkatnya Produksi Pertanian	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	Dinas Ketahanan Pangan
			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terbangunnya Infrastruktur Pertanian	Dinas Pertanian
				Pengembangan Prasarana Pertanian		Dinas Pertanian
4.	Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Pemenuhan standar pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 2. Jumlah Perlengkapan sekolah yang Tersedia 3. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 4. Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 5. Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian 6. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 7. Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
					8. Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat 9. Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah dibangun 10. Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 11. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 12. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 13. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 14. jumlah Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 15. Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 16. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	
					Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 17. Jumlah Unit Sekolah	

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
					Baru (USB) yang Telah Dibangun 18. Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 19. Jumlah laporan pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 20. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 21. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 22. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 23. Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 24. Jumlah Ruang unit Kesehatan Sekolah yang Telah dibangun 25. Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi 26. terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					27. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia 2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
					Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 5. Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 6. Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	
					7. Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS 8. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 9. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
					Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 11. terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 12. Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 13. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 14. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
					15. Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 16. Terlaksannaya Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 17. Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 18. Tersedianya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 19. Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 21. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana	

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
					BOS Sekolah Menengah Pertama 22. Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 2. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan
					3. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 4. Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 5. Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia 6. terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 7. Terlaksanya Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 8. Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 9. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 10. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah	

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
					Dibangun 11. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	
					Sekolah yang Telah Dibangun 12. Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 13. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi 14. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan PAUD 15. Terlaksannya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 16. Tersedianya Personil Peserta Didik PAUD 17. Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat 18. Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
					3. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	
		Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia	Dinas Kesehatan
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin Rumah Sakit Tipe C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Fasilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Tarutung
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	RSUD Tarutung

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
					Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan mutunya	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
				Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan	Dinas Kesehatan
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri	Dinas Kesehatan
				Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri yang diberikan	
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Diperiksa	Dinas Kesehatan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	sampainya informasi Program-program bangga kencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	adanya pendukung sarana dan prasarana PKB dan PLKB	Dinas Pengendalian Penduduk,
						Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelaksahaan Pelayanan dan Konseling KB kepada masyarakat	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Tersedianya Data Capaian Progra bangga Kencana di Desa yang sudah menjadi Kampung KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
5.	Pengembangan Wisata	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Dinas Pariwisata
6.	Meningkatkan Capaian Kinerja Pembangunan	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang sesuai dengan rencana	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Presentase Pelaksanaan Pembangunan yangsesuai dengan rencana 2. Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota yang dihasilkan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Cakupan kebutuhan Pengawasan Internal yang terlayani 2. Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Inspektorat Daerah
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1. Cakupan kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang terlayani 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Inspektorat Daerah
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Sekretariat daerah
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Sekretariat daerah
		Meningkatkan kualitas pelayanan public	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	OPD Penanggung jawab
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Seluruh Kecamatan
			Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlindunginya Korban bencana	Dinas Sosial
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
7	Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatkan pemanfaatan riset dalam pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di implementasikan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di implementasikan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di implementasikan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber data : P-RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1.3.1 Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang Dituangkan Dalam RPJMD

1.3.1.1 Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, satuan pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan non formal dan informal. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional, bahwa untuk melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi khusus daerah, perlu melakukan identifikasi, pemetaan, dan penetapan daerah khusus. Yang dimaksud dengan daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Penetapan Daerah Khusus ini bertujuan untuk memastikan intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah sebagai acuan pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan nasional di daerah. Angka Partisipasi Kasar merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/MI cenderung terjadi peningkatan APK dari tahun 2020 sebesar 110,77 persen menjadi 115,53 persen pada tahun 2024, Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs juga terjadi fluktuasi dari tahun 2020 sebesar 99,16 persen menurun menjadi sebesar 84,02 pada tahun 2024. Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA cenderung terjadi peningkatan dari tahun 2020 sebesar 93,03 persen menjadi sebesar 111,97 persen pada tahun 2024. Pada jenjang pendidikan PT terjadi fluktuasi dan cenderung sedikit meningkat dari tahun 2020 sebesar 22,11 persen menjadi sebesar 40,73 persen pada tahun 2022 dan menurun di tahun 2023 menjadi sebesar 26,34 persen. Angka Partisipasi Murni adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya (bersekolah tepat waktu). APM juga didefinisikan sebagai perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM pada jenjang pendidikan SD/MI menurun dari 99,91 persen pada tahun 2020 menjadi 99,27 persen pada tahun 2024. Kemudian APM pada jenjang SMP/MTs menurun dari 86,14 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 80,31 persen pada tahun 2024. serta APM pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA terjadi penurunan dari 80,27 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 84,17 persen pada tahun 2024. APM jenjang pendidikan PT mengalami penurunan dari 19,19 persen pada tahun 2020 menjadi 15,00 persen pada tahun 2024. Literasi dan numerasi di Kabupaten Tapanuli utara mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Untuk literasi SD dari tahun 2022 sebesar 45,72 menjadi sebesar 58,39 pada tahun 2024. Untuk literasi SMP dari tahun 2022 sebesar 49,94 menjadi sebesar 68,59 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu dalam hal membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara mengalami peningkatan untuk tingkat sekolah dasar (SD)d dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk numerasi SD dari tahun 2022 sebesar 23,59 menjadi sebesar 54,18 pada tahun 2024, untuk numerasi SMP dari tahun 2022 sebesar 37,59 menjadi sebesar 61,67 pada tahun 2024. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin baiknya kemampuan memahami dan menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol matematika dasar dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Tapanuli Utara mengalami fluktuasi cenderung menurun dari tahun 2020 sebesar 12,80 persen menjadi 8,81 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya proposi penduduk yang memiliki kualifikasi perguruan tinggi dibandingkan dengan seluruh usia angkatan kerja. serta rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi minat masyarakat untuk meraih pendidikan tinggi namun masih perlu menjadi perhatian karena capaian ini masih kategori kecil. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi merupakan indikator untuk melihat apakah penduduk yang bekerja sudah sesuai dengan kompetensinya.

1.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Upaya pembangunan dari sisi kesehatan salah satunya dilakukan melalui Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan

pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan : 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis resiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran serta kendali mutu dan kendali biaya. Untuk mendapatkan keadaan di mana masyarakat bisa sehat dan berkeadilan, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengaplikasikan kebijakan bidang kesehatan di antaranya adalah meningkatkan kuantitas jaringan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan (medis dan non medis). Pendekatan lain yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah dengan meningkatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat terutama terhadap golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin) dan yang tinggal di pedesaan. Upaya lain yang dilakukan termasuk tindakan pencegahan dan penyembuhan penyakit. Dengan demikian pembangunan yang sedang digiatkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat berakselerasi positif dan bersinergi terhadap kegiatan pembangunan di bidang lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di antaranya adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan dan konsumsi makanan bergizi masyarakat. Tetapi faktor yang terpenting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan tersebut terletak pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut. Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Kesehatan berimplikasi pada produktivitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya

yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya upaya yang telah dilaksanakan pada waktu sebelumnya.

Pada dasarnya pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah dan merata. Melalui peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih dini lagi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi/balita. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di setiap wilayah.

Selain itu, hal pokok yang juga harus diperhatikan adalah perluasan akses kesehatan, khususnya kepada masyarakat kurang mampu dan perempuan di wilayah perbatasan/terluar/terpencil. Berdasarkan dari data BPS, pada tahun 2020 hingga tahun 2024 hanya terdapat 2 rumah sakit yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian, untuk Puskesmas terdapat sebanyak 20 unit dan Puskesmas Pembantu relatif sama sebanyak 60 unit pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya untuk membangun fasilitas kesehatan di seluruh wilayah agar memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat. Dokter Umum yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami fluktuasi cenderung meningkat dari 34 Dokter pada tahun 2020 menjadi 46 Dokter pada tahun 2024. Kemudian Dokter Gigi mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 13 Dokter Gigi menjadi 21 Dokter Gigi pada tahun 2024. Perawat di Kabupaten Tapanuli Utara meningkat dari tahun 2020 sebanyak 117 orang menjadi 333 perawat pada tahun 2024. Bidan di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami

meningkat dari 426 orang pada tahun 2020 menjadi 977 orang pada tahun 2024. Ahli Farmasi mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 14 orang menjadi sebanyak 33 orang pada tahun 2024. Ahli Gizi mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 16 orang menjadi 38 Ahli Gizi pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan lainnya, serta melakukan pemerataan distribusi di seluruh kecamatan.

Secara nasional target AKI adalah 306 per 100.000 penduduk. berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan bahwa jumlah ibu melahirkan setiap tahunnya tidak mencapai angka 100.000 sehingga angka kematian ibu merupakan jumlah ibu meninggal per kelahiran bayi. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, jumlah kematian ibu semakin menurun dari 8 ibu meninggal pada tahun 2020 menjadi 1 orang pada tahun 2024. Adapun penyebab kematian ibu tersebut akibat kelainan jantung dan pembuluh darah. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapanuli Utara cukup rendah dan hal ini kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Faktor penyebab rendahnya AKB dimaksud diantaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan utamanya di daerah terpencil dan sangat terpencil, dan tenaga kesehatan utamanya bidan di desa. Pada tahun 2024, Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapanuli Utara ada sebanyak 14 bayi per 3.791 dengan angka konversi yakni 3,70. Adapun penyebab kematian bayi adalah BBLR, Prematuritas, Asfiksia, Infeksi dan lain-lain. Morbiditas atau angka kesakitan dapat menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. angka ini juga dapat berperan untuk menggambarkan keadaan kesehatan secara umum, mengetahui keberhasilan program pemberantasan penyakit, dan sanitasi lingkungan serta memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan.Angka Kesakitan di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan setiap tahunnya dari 32,96 pada tahun 2020 menjadi 19,41 pada tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

menyatakan bahwa Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. penyebaran Tuberkulosis terjadi melalui batuk atau bersin dari orang yang menghirup droplet yang dikeluarkan oleh penderita. Meskipun TB menyebar dengan cara yang sama dengan flu tetapi penularannya tidak mudah. Infeksi TB biasanya menyebar antar anggota keluarga yang tinggal serumah.

Bed Occupancy Rate (BOR) merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit dengan kondisi ideal adalah antara 60 85 persen. Kondisi BOR untuk RSUD Tarutung tahun 2024 adalah 69,76 persen. Average Lenght of Stay (ALOS) adalah rata-rata lama rawat seseorang pasien. indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi juga dapat memberikan gamabaran mutu pelayanan apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan lebih lanjut. secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari. kondisi ALOS untuk RSUD Tarutung tahun 2024 adalah 5,25 hari.

1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas penting dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pekerjaan umum mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur publik, sementara tata ruang adalah proses perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan. selama tahun 2020 hingga tahun 2024 persentase jalan dalam kondisi baik cenderung menurun dari 46,46 persen menjadi 30,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memperbaiki kondisi jalan belum optimal. Persentase irigasi dalam kondisi baik merupakan angka perbandingan antar luas jaringan irigasi dalam kondisi baik, terhadap keseluruhan sehingga diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan,

pengambilan, pembagian dan penggunaan air irigasi beserta pembuangannya. Persentase irigasi dalam kondisi baik meningkat dari 69,00 persen pada tahun 2020 menjadi 73,29 persen pada tahun 2023. Persentase drainase dalam kondisi baik merupakan persentase jumlah drainase di Kabupaten Tapanuli Utara dalam keadaan kondisi baik sehingga drainase dapat mengalirkan aliran dengan lancar. Berdasarkan data di atas terlihat persentase kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang terhadap RTRW meningkat dari tahun 2020 - 2022 namun mengalami penurunan pada tahun 2023. Hal ini dapat disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan akibat masih minimnya kecamatan yang memiliki RDTR.

Untuk Persentase Penduduk yang mendapatkan Akses Air minum aman ditahun 2020 berada pada persensentase 32,80 dan di tahun 2024 mengalamai kenaikan menjadi 34,28 persen, dikarenakan katagori aman merupakan Akses Air bersih yang memperoleh peolahan sedangkan persentase Rumah tangga yang mendapatkan Akses Aman di tahun 2020 dengan persentasi 10 persen dan ditahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 1 persen menjadi 11 persen, hal ini mengacu pada Sanitasi yang memiliki tangki septiktank.

1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk sebagai fasilitas penunjang antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman serta pertamanan. Pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan

perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, juga teratur. Indikasi rumah yang layak huni adalah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan sarana perumahannya maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya, seperti: lantai rumah, penggunaan air bersih, sanitasi dan sumber penerangan. Peningkatan jumlah rumah tinggal layak huni ini didukung dengan peningkatan persentase rumah tangga yang memenuhi persyaratan rumah layak huni, di antaranya rumah tinggal yang berakses sanitasi, rumah tinggal yang menggunakan air bersih, rumah tinggal yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan dan rumah tinggal yang menggunakan lantai (semen dan papan). Guna mendukung peningkatan akses air bersih Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan berbagai upaya dalam membantu masyarakat memberikan ketersediaan fasilitas air bersih dan sehat untuk kehidupan masyarakat. Persentase Rumah Layak Huni mengalami peningkatan dari 64,21 persen pada tahun 2020 menjadi 71,39 persen pada tahun 2022, lalu menurun pada tahun 2023 menjadi 69,24 persen. Lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2023 masih tersisa sebanyak 6,74 persen atau seluas 723 ha. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari tugas pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, melindungi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten menggambarkan berapa persen jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran terhadap luas wilayah kabupaten. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten pada tahun 2023 sudah mencapai 100 persen, artinya seluruh wilayah sudah tercakup pelayanan bencana kebakaran. Persentase aparatur pemadam

kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi menurun dari 60 persen pada tahun 2020 menjadi 54 persen pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa masih banyak aparatur pemadam kebakaran yang belum memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) menggambarkan berapa persen tingkat respon penanganan kebakaran dengan maksimal waktu 15 menit dari seluruh kasus kebakaran.

1.3.1.6 Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Sasaran pelayanan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS yaitu perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengurangi timbulnya permasalahan sosial, dimana keadaan di daerah ini menunjukkan masih banyak penduduk yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak. Pembangunan PMKS ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat

dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Persentase PMKS yang tertangani adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat layanan sosial berupa bantuan barang atau jasa, rehabilitasi, pemberdayaan maupun rujukan karena suatu hambatan, kesulitan ataupun gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Persentase PMKS yang tertangani mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 sebesar 2,98 persen menjadi sebesar 61,96 persen pada tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya sumber dana yang diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 berupa bantuan sosial.

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1.3.1 Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang Dituangkan Dalam RPJMD

1.3.1.1 Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, satuan pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan non formal dan informal. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional, bahwa untuk melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi khusus daerah, perlu melakukan identifikasi, pemetaan, dan penetapan daerah khusus. Yang dimaksud dengan daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Penetapan Daerah Khusus ini bertujuan untuk memastikan intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah sebagai acuan pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan nasional di daerah. Angka Partisipasi Kasar merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/MI cenderung terjadi peningkatan APK dari tahun 2020 sebesar 110,77 persen menjadi 115,53 persen pada tahun 2024, Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs juga terjadi fluktuasi dari tahun 2020 sebesar 99,16 persen menurun menjadi sebesar 84,02 pada tahun 2024. Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA cenderung terjadi peningkatan dari tahun 2020 sebesar 93,03 persen menjadi sebesar 111,97 persen pada tahun 2024. Pada jenjang pendidikan PT terjadi fluktuasi dan cenderung sedikit meningkat dari tahun 2020 sebesar 22,11 persen menjadi sebesar 40,73 persen pada tahun 2022 dan menurun di tahun 2023 menjadi sebesar 26,34 persen. Angka Partisipasi Murni adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya (bersekolah tepat waktu). APM juga didefinisikan sebagai perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM pada jenjang pendidikan SD/MI menurun dari 99,91 persen pada tahun 2020 menjadi 99,27 persen pada tahun 2024. Kemudian APM pada jenjang SMP/MTs menurun dari 86,14 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 80,31 persen pada tahun 2024. serta APM pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA terjadi penurunan dari 80,27 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 84,17 persen pada tahun 2024. APM jenjang pendidikan PT mengalami penurunan dari 19,19 persen pada tahun 2020 menjadi 15,00 persen pada tahun 2024. Literasi dan numerasi di Kabupaten Tapanuli utara mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Untuk literasi SD dari tahun 2022 sebesar 45,72 menjadi sebesar 58,39 pada tahun 2024. Untuk literasi SMP dari tahun 2022 sebesar 49,94 menjadi sebesar 68,59 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu dalam hal membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara mengalami peningkatan untuk tingkat sekolah dasar (SD)d dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk numerasi SD dari tahun 2022 sebesar 23,59 menjadi sebesar 54,18 pada tahun 2024, untuk numerasi SMP dari tahun 2022 sebesar 37,59 menjadi sebesar 61,67 pada tahun 2024. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin baiknya kemampuan memahami dan menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol matematika dasar dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Tapanuli Utara mengalami fluktuasi cenderung menurun dari tahun 2020 sebesar 12,80 persen menjadi 8,81 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya proposi penduduk yang memiliki kualifikasi perguruan tinggi dibandingkan dengan seluruh usia angkatan kerja. serta rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi minat masyarakat untuk meraih pendidikan tinggi namun masih perlu menjadi perhatian karena capaian ini masih kategori kecil. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi merupakan indikator untuk melihat apakah penduduk yang bekerja sudah sesuai dengan kompetensinya.

1.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Upaya pembangunan dari sisi kesehatan salah satunya dilakukan melalui Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan

pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan : 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis resiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran serta kendali mutu dan kendali biaya. Untuk mendapatkan keadaan di mana masyarakat bisa sehat dan berkeadilan, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengaplikasikan kebijakan bidang kesehatan di antaranya adalah meningkatkan kuantitas jaringan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan (medis dan non medis). Pendekatan lain yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah dengan meningkatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat terutama terhadap golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin) dan yang tinggal di pedesaan. Upaya lain yang dilakukan termasuk tindakan pencegahan dan penyembuhan penyakit. Dengan demikian pembangunan yang sedang digiatkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat berakselerasi positif dan bersinergi terhadap kegiatan pembangunan di bidang lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di antaranya adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan dan konsumsi makanan bergizi masyarakat. Tetapi faktor yang terpenting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan tersebut terletak pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut. Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Kesehatan berimplikasi pada produktivitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya

yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya upaya yang telah dilaksanakan pada waktu sebelumnya.

Pada dasarnya pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah dan merata. Melalui peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih dini lagi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi/balita. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di setiap wilayah.

Selain itu, hal pokok yang juga harus diperhatikan adalah perluasan akses kesehatan, khususnya kepada masyarakat kurang mampu dan perempuan di wilayah perbatasan/terluar/terpencil. Berdasarkan dari data BPS, pada tahun 2020 hingga tahun 2024 hanya terdapat 2 rumah sakit yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian, untuk Puskesmas terdapat sebanyak 20 unit dan Puskesmas Pembantu relatif sama sebanyak 60 unit pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya untuk membangun fasilitas kesehatan di seluruh wilayah agar memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat. Dokter Umum yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami fluktuasi cenderung meningkat dari 34 Dokter pada tahun 2020 menjadi 46 Dokter pada tahun 2024. Kemudian Dokter Gigi mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 13 Dokter Gigi menjadi 21 Dokter Gigi pada tahun 2024. Perawat di Kabupaten Tapanuli Utara meningkat dari tahun 2020 sebanyak 117 orang menjadi 333 perawat pada tahun 2024. Bidan di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami

meningkat dari 426 orang pada tahun 2020 menjadi 977 orang pada tahun 2024. Ahli Farmasi mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 14 orang menjadi sebanyak 33 orang pada tahun 2024. Ahli Gizi mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 16 orang menjadi 38 Ahli Gizi pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan lainnya, serta melakukan pemerataan distribusi di seluruh kecamatan.

Secara nasional target AKI adalah 306 per 100.000 penduduk. berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan bahwa jumlah ibu melahirkan setiap tahunnya tidak mencapai angka 100.000 sehingga angka kematian ibu merupakan jumlah ibu meninggal per kelahiran bayi. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, jumlah kematian ibu semakin menurun dari 8 ibu meninggal pada tahun 2020 menjadi 1 orang pada tahun 2024. Adapun penyebab kematian ibu tersebut akibat kelainan jantung dan pembuluh darah. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapanuli Utara cukup rendah dan hal ini kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Faktor penyebab rendahnya AKB dimaksud diantaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan utamanya di daerah terpencil dan sangat terpencil, dan tenaga kesehatan utamanya bidan di desa. Pada tahun 2024, Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapanuli Utara ada sebanyak 14 bayi per 3.791 dengan angka konversi yakni 3,70. Adapun penyebab kematian bayi adalah BBLR, Prematuritas, Asfiksia, Infeksi dan lain-lain. Morbiditas atau angka kesakitan dapat menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. angka ini juga dapat berperan untuk menggambarkan keadaan kesehatan secara umum, mengetahui keberhasilan program pemberantasan penyakit, dan sanitasi lingkungan serta memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan.Angka Kesakitan di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan setiap tahunnya dari 32,96 pada tahun 2020 menjadi 19,41 pada tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

menyatakan bahwa Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. penyebaran Tuberkulosis terjadi melalui batuk atau bersin dari orang yang menghirup droplet yang dikeluarkan oleh penderita. Meskipun TB menyebar dengan cara yang sama dengan flu tetapi penularannya tidak mudah. Infeksi TB biasanya menyebar antar anggota keluarga yang tinggal serumah.

Bed Occupancy Rate (BOR) merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit dengan kondisi ideal adalah antara 60 85 persen. Kondisi BOR untuk RSUD Tarutung tahun 2024 adalah 69,76 persen. Average Lenght of Stay (ALOS) adalah rata-rata lama rawat seseorang pasien. indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi juga dapat memberikan gamabaran mutu pelayanan apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan lebih lanjut. secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari. kondisi ALOS untuk RSUD Tarutung tahun 2024 adalah 5,25 hari.

1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas penting dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pekerjaan umum mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur publik, sementara tata ruang adalah proses perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan. selama tahun 2020 hingga tahun 2024 persentase jalan dalam kondisi baik cenderung menurun dari 46,46 persen menjadi 30,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memperbaiki kondisi jalan belum optimal. Persentase irigasi dalam kondisi baik merupakan angka perbandingan antar luas jaringan irigasi dalam kondisi baik, terhadap keseluruhan sehingga diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan,

pengambilan, pembagian dan penggunaan air irigasi beserta pembuangannya. Persentase irigasi dalam kondisi baik meningkat dari 69,00 persen pada tahun 2020 menjadi 73,29 persen pada tahun 2023. Persentase drainase dalam kondisi baik merupakan persentase jumlah drainase di Kabupaten Tapanuli Utara dalam keadaan kondisi baik sehingga drainase dapat mengalirkan aliran dengan lancar. Berdasarkan data di atas terlihat persentase kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang terhadap RTRW meningkat dari tahun 2020 - 2022 namun mengalami penurunan pada tahun 2023. Hal ini dapat disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan akibat masih minimnya kecamatan yang memiliki RDTR.

Untuk Persentase Penduduk yang mendapatkan Akses Air minum aman ditahun 2020 berada pada persensentase 32,80 dan di tahun 2024 mengalamai kenaikan menjadi 34,28 persen, dikarenakan katagori aman merupakan Akses Air bersih yang memperoleh peolahan sedangkan persentase Rumah tangga yang mendapatkan Akses Aman di tahun 2020 dengan persentasi 10 persen dan ditahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 1 persen menjadi 11 persen, hal ini mengacu pada Sanitasi yang memiliki tangki septiktank.

1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk sebagai fasilitas penunjang antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman serta pertamanan. Pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan

perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, juga teratur. Indikasi rumah yang layak huni adalah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan sarana perumahannya maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya, seperti: lantai rumah, penggunaan air bersih, sanitasi dan sumber penerangan. Peningkatan jumlah rumah tinggal layak huni ini didukung dengan peningkatan persentase rumah tangga yang memenuhi persyaratan rumah layak huni, di antaranya rumah tinggal yang berakses sanitasi, rumah tinggal yang menggunakan air bersih, rumah tinggal yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan dan rumah tinggal yang menggunakan lantai (semen dan papan). Guna mendukung peningkatan akses air bersih Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan berbagai upaya dalam membantu masyarakat memberikan ketersediaan fasilitas air bersih dan sehat untuk kehidupan masyarakat. Persentase Rumah Layak Huni mengalami peningkatan dari 64,21 persen pada tahun 2020 menjadi 71,39 persen pada tahun 2022, lalu menurun pada tahun 2023 menjadi 69,24 persen. Lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2023 masih tersisa sebanyak 6,74 persen atau seluas 723 ha. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari tugas pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, melindungi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten menggambarkan berapa persen jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran terhadap luas wilayah kabupaten. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten pada tahun 2023 sudah mencapai 100 persen, artinya seluruh wilayah sudah tercakup pelayanan bencana kebakaran. Persentase aparatur pemadam

kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi menurun dari 60 persen pada tahun 2020 menjadi 54 persen pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa masih banyak aparatur pemadam kebakaran yang belum memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) menggambarkan berapa persen tingkat respon penanganan kebakaran dengan maksimal waktu 15 menit dari seluruh kasus kebakaran.

1.3.1.6 Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Sasaran pelayanan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS yaitu perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengurangi timbulnya permasalahan sosial, dimana keadaan di daerah ini menunjukkan masih banyak penduduk yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak. Pembangunan PMKS ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat

dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Persentase PMKS yang tertangani adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat layanan sosial berupa bantuan barang atau jasa, rehabilitasi, pemberdayaan maupun rujukan karena suatu hambatan, kesulitan ataupun gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Persentase PMKS yang tertangani mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 sebesar 2,98 persen menjadi sebesar 61,96 persen pada tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya sumber dana yang diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 berupa bantuan sosial.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD)

Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro Daerah

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak yang terkait dalam pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah secara khusus. Capaian kinerja makro Kabupaten Tapanuli Utara yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian IPM Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 meningkat sebesar 0,61 poin dibanding tahun 2024, artinya capaian IPM tahun 2025 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan karena seluruh dimensi dan variabel pembentuk IPM Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 meningkat, yaitu :

1) Dimensi Kesehatan (Variabel : Umur Harapan Hidup)
2) Dimensi Pendidikan/Pengetahuan (Variabel : Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
3) Dimensi Standar Hidup (Pengeluaran per Kapita per tahun yang disesuaikan).

2. Angka kemiskinan

Angka Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,74 poin persen, yaitu dari 8,21 persen atau sebanyak 25,51 ribu jiwa tahun 2024 menjadi 7,47 persen atau sebanyak 23,29 ribu jiwa tahun 2025. Turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025, sejatinya tidak lepas dari intervensi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara Yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan antara lain :

1) Memberikan pendidikan gratis
2) Memberikan pelatihan kerja kepada para pencari kerja
3) Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dalam memenuhi pelayanan dasar, dimana hal ini terbukti pada tahun 2025, Kabupaten

Tapanuli Utara telah mencapai UHC dengan capaian sebanyak 98.84 persen

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka Pengangguran Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,11 poin persen, yaitu dari 1,21 persen tahun 2024 menjadi 1,10 persen pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan mengalami perbaikan**,** karena semakin sedikit penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa kesempatan kerja semakin terbuka, baik melalui peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, maupun program pemerintah dalam mendorong penyerapan tenaga kerja. Secara umum, capaian ini mencerminkan kinerja positif dalam upaya menekan tingkat pengangguran**,** sehingga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta stabilitas ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 menurun sebesar 0,19 poin persen dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu dari 4,77 persen tahun 2024 menjadi 4,58 persen tahun 2025. PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Harga Berlaku tahun 2025 sebesar 12.051,74 milyar rupiah dan pada tahun 2024 sebesar 11.279,15 milyar rupiah, sedang PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada Tahun 2025 sebesar 7.248,51 milyar rupiah dan pada tahun 2024 sebesar 6.931,24 milyar rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara jika dilihat berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2025 sebesar 4,58 persen dan tahun 2024 sebesar 4,77 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor terbesar dalam membentuk PDRB Kabupaten Tapanuli Utara. Pada Tahun 2025 kontribusi sektor tersebut sebesar 45,11 persen, yang diikuti Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 16,62 persen, dan Lapangan Usaha Konstruksi sebagai kontributor terbesar ketiga yaitu sebesar 13.09 persen. Sedangkan sisanya sebesar 25,18 persen disumbangkan oleh empat belas lapangan usaha lainnya, dimana sektor penyumbang terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 0,07 persen.

5. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah/perkapita/tahun)

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025, dimana tahun 2024 : 34.493,54 ribu rupiah dan tahun 2025 : 36.435,94 ribu rupiah. Kenaikan sebesar 1.942,40 ribu rupiah atau sekitar Rp.1.942.400 per penduduk atau meningkat sebesar meningkat sekitar 5,63 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan per penduduk mengalami peningkatan, dan mengindikasikan adanya perbaikan kinerja perekonomian daerah dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun nilai ADHB masih dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi.

6. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 yang diukur dengan Gini Ratio mengalami kenaikan sebesar 0,007 poin dibanding tahun 2024, yaitu dari 0,242 menjadi 0,249 tahun 2025. Kenaikan Gini Ratio ini mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran antar kelompok penduduk. Namun secara umum ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 masih tergolong rendah.

Secara ringkas dapat kami sampaikan tabel capaian kinerja makro Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Satuan
1	Indeks Pembangunan Manusia	77,48	78,09	Poin
2	Angka Kemiskinan	8,21	7,47	Persen
3	Angka Pengangguran	1,21	1,10	Persen
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,77	4,58	Persen
5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah/perkapita/tahun)	34.493,54	36.435,94	(ribu rupiah/perkapita/tahun)
6	Ketimpangan Pendapatan	0,242	0,249	Persen

Ket. : * : Angka Sangat Sementara
** : Angka Sangat Sangat Sementara

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
1	Pendidikan	1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	5081	11021	46,1028945	%	-	Dinas Pendidikan
		1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	53637	62438	85,9044172	%	-	Dinas Pendidikan
		1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	118	1378	8,563135	%	-	Dinas Pendidikan
		1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet	806	1502	53,6617843	%	-	Dinas Pendidikan
		1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas	2430	3224	75,3722084	%	-	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
2	Kesehatan	1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	Jumlah ibu melahirkan tahun N	5	3320	0,1506024	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	1041	16458	6,3251914	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3320	3850	86,2337662	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3320	3850	86,2337662	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3349	3866	86,6270047	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	17027	18629	91,4005046	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
				2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3							
		1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	61752	62386	98,9837464	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	89229	201655	44,2483449	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	41595	42228	98,5009946	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	40685	74384	54,6959023	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota	2195	2195	100	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
				sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.						
		1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	464	464	100	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	6298	6298	100	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	6682	6765	98,7730968	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	12047,98	15905	75,7496385	%	-	Dinas PUTR dan Perhubungan
		1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	399,687	1074,009	37,2144926	%	-	Dinas PUTR dan Perhubungan
		1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan	Jumlah total penduduk kabupaten/kota	300	335039	0,0895418	%	-	Dinas PUTR dan Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
			Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N							
		1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah di kabupaten/kota	36	71559	0,0503081	%	-	Dinas PUTR dan Perhubungan
		1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	1,653	1174,99	0,140682	%	-	Dinas PUTR dan Perhubungan
		1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	1	-	%	-	Dinas PUTR dan Perhubungan
		1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	95	102	93,1372549	%	-	Dinas PUTR dan Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
		1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	1	1	100	%	Belum memiliki peraturan kepala daerah tentang pembebasan retribusi PBG unutk masyarakat berpenghasilan rendah	Dinas PUTR dan Perhubungan
		1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	0	787	-	%	-	Dinas PUTR dan Perhubungan
		1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	27	27	100	%	-	Dinas PUTR dan Perhubungan
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	239	239	100	%	Penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah korban bencana tahun 2025 tidak dilaksanakan, akibat anggaran dan lahan/tanah yang tidak mendukung. Sehingga dikompensasikan dalam bentuk pemberian uang tunai sebagai pengganti rumah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukian dan Lingkungan Hidup
		1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	17,5	19,43	90,0669068	%	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukian dan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
		1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	233	6754	3,4498075	%	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukian dan Lingkungan Hidup
		1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	0	1	-	%	Terdapat 6 perumahan di Kabupaten Tapanuli Utara, namun belum dilaksanakan PSU oleh Pemkab	Dinas Perumahan, Kawasan Permukian dan Lingkungan Hidup
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	1	3	33,3333333	%	-	BPBD
		1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	35	35	100	%	-	Satpol PP
		1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	2	2	100	%	-	Satpol PP
		1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	265	1000	26,5	%	-	BPBD

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
		1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	1250	1250	100	%	-	BPBD
		1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	57	80	71,25	%	-	Satpol PP
6	Sosial	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	126	565	22,300885	%	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	71	99	71,7171717	%	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	409	470	87,0212766	%	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	8	8	100	%	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada	1193	1193	100	%	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
			setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota		saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota						
		1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	614	37771	1,6255858	%	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
1	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	0	1	-	%	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 belum disusun oleh karena : 1. Keterbatasan anggaran 2. Pejabat fungsional yang berwenang menyusun RTKD promosi menjadi Kepala Bidang Maka telah direncakan RTKD akan disusun pada tahun 2026 pada P-APBD TA. 2026	Dinas Ketenagakerjaan

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
		2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah perusahaan	2	445	0,4494382	%	-	Dinas Ketenagakerjaan
		2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2631	10000	26,31	%	-	Dinas Ketenagakerjaan
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	32	32	100	%	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
		2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	32	32	100	%	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pangan	2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Target jumlah cadangan pangan	42,2	83,3	50,6602641	%	-	Dinas Ketahanan Pangan
4	Pertanahan	2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	2.766.456	2.766.456	100	%	-	Dinas PUTR dan Perhubungan
		2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	2.818.720.500	2.818.720.500	100	%	-	Dinas PUTR dan Perhubungan
		2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	437.035.600	3.786.694.884	11,5413471	%	-	Dinas PUTR dan Perhubungan
5	Lingkungan Hidup	2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan	Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	27	27	100	%	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukman, dan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
			undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	peraturan perundang-undangan							
		2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	60898,43	60898,43	100	%	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukman, dan Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan Akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	105175	106907	98,3799003	%	Mempedomani ketentuan : 1. pasal 58 ayat (1) dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang hak akses dan pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna 4. Surat Edaran Dirjen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
										Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 1170/18754/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 bahwa data perseorangan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disampaikan bahwa permintaan Data By Name By Address untuk Data perkawaninan, Akta Perceraian tidak dapat kami sajikan.	
		2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	64151	98512	65,1199854	%	Mempedomani ketentuan: 1. pasal 58 ayat (1) dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang hak akses dan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2 dokumen	2	2	100	%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	229974	235387	97,7003828	%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	15744	15744	100	%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
		2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	85903	85903	100	%	4. pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 1170/18754/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 bahwa data perseorangan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disampaikan bahwa permintaan Data By Name By Address untuk Data perkawaninan, Akta Perceraian tidak dapat kami sajikan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	43	43	100	%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	21	33	63,6363636	%	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	61	179	34,0782123	%	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.g.3	Persentase fasilitasi	Jumlah kerja	Jumlah kerja	12	16	75	%	-	Dinas

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
			kerja sama desa	sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	sama desa yang ditangani						Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	2,84	2,82	100,7092199	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun	45,9	32813	0,1398836	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.h.3	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	22,6	15,8	143,0379747	%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Perhubungan	2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL)	-	0,68	-	0,68	Rasio	-	Dinas PUTR dan Perhubungan
		2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	-	0,014	-	0,014	Rasio	-	Dinas PUTR dan Perhubungan
		2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen	Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	4	4	100	%	-	Dinas PUTR dan Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
				keselamatan							
10	Komunikasi dan Informatika	2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	2	44	4,5454545	%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik	3	6	50	%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penduduk	214.747	214.747	100	%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	65.772.318.790	63.722.592.201	3,2166403	%	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	Σ Usaha mikro	150	29.313	0,5117184	%	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
											Perdagangan
12	Penanaman Modal	2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N-Jumlah nilai investasi tahun N-1)	Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	258.067.262.778	354.077.277.714	-27,1155539	%	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	612.144.540.492	774.011.660.000	79,0872505	%	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	1920	1920	100	%		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	0	1	-	-	Surat Keterangan bahwa kegiatan pendataan pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan, tidak ditampung dalam DPA Dinas Pemuda dan Olahraga TA 2025 akibat efisiensi anggaran.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota	"Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat	6	30	20	%	-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
			yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)						Pemuda dan Olahraga
		2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	9	35	25,7142857	%	-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
14	Statistik	2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	0	1	-	%	Surat Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara yang menyatakan bahwa : 1. Belum terlaksananya forum satu data daerah tahun 2025, dan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 2. Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara masih menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Persandian	2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	0	918	-	%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
16	Kebudayaan	2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	13	13	100	%	-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	1152	1089	5,785124	%	-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
17	Perpustakaan	2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	TKM = ((0.15 × Pra Membaca) + (0.50 × Saat Membaca) + (0.35 × Pasca Membaca)) × 100	-	61,61	-	61,61	Nilai	-	Dinas Perpustakaan
		2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	IPLM = ((0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kinerja)) x 100	-	40,63	-	40,63	Nilai	-	Dinas Perpustakaan
18	Kearsipan	2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	T = (a + i + s + j)/4	-	60,34	-	60,34	%	-	Dinas Perpustakaan

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Pemerintahan Wajib

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
1	Perikanan dan Kelautan	3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	-	45,6	-	45,6	Kg / Kap / Tahun	-	Dinas Ketahanan Pangan
		3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	2961,17	2982	99,3014755	%	-	Dinas Ketahanan Pangan
2	Pariwisata	3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Realisasi investasi Tahun N	0	1	-	%	Investasi sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 dan tahun 2025 tidak dapat disajikan, karena tidak ada skala perusahaan yang wajib lapor LKPM kegiatan investasinya.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	Jumlah wisatawan asing tahun N-1	300	310	-3,2258065	%	-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	Jumlah wisatawan tahun N-1	180280	190751	-5,4893552	%	-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	Produksi tanaman pangan tahun N-1	349.993,66	370.122,11	-5,4383268	%	-	
3	Pertanian	3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	Produksi hortikultura tahun N-1	233.896,52	202.489,3	15,5105578	%	-	Dinas Pertanian
		3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	Produksi komoditas peternakan tahun N-1	2.181,24	1.943,97	12,2054353	%	-	Dinas Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
		3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	1.201,1	1.201,1	100	%	-	Dinas Pertanian
4	Perindustrian	3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi : 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	-	0	-	-	%	Tidak dapat disajikan karena Dokumen Rencana Pembangunan Indsutri Kawasan Kabupaten Tapanuli Utara tidak disusun tahun 2025, disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
		3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	9	118	7,6271186	%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	515	555	-7,2072072	%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	Total investasi seluruh sektor	15.344.860.000	612.144.540.492	2,506738	%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Perdagangan	3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	0	1	-	%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

2.2.4 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
1	Urusan Perencanaan	4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	17	17	100	%	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Urusan Keuangan	4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	288.075.025.009	1.394.378.083.539	20,6597499	%	-	BKAD
		4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pendapatan daerah	156.540.675.919	1.439.342.162.186	10,8758487	%	-	BKAD
		4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	818.194.391.999	1.338.924.060.441	61,1083493	%	-	BKAD
		4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada	47.722.610.416	1.170.687.663.062	4,0764597	%	-	BKAD

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
					daerah dan/atau desa						
3	Urusan Kepegawaian	4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1301	1815	71,6804408	%	-	BKPSDM
4	Urusan Pengawasan	4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	2	-	2	Nilai	-	Inspektorat Dareah
		4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	2	-	2	Nilai	-	Inspektorat Dareah
		4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	-	2	-	2	Nilai	-	Inspektorat Dareah
		4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	919	1067	86,1293346	%	-	Inspektorat Dareah
5	Pengadaan	4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	-	22,22	-	22,22	Poin		Bagian PBJ Sekretariat Daerah
		4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	-	20,89	-	20,89	Poin		Bagian PBJ Sekretariat Daerah
		4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	-	4,29	-	4,29	Poin		Bagian PBJ Sekretariat Daerah

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan	Sumber Data
6	Hubungan Dengan Perwakilan Daerah	4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	-	1	-	1	1. Tepat Waktu dan 2 Tidak Tepat Waktu	-	BKAD
		4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	5	9	55,5555556	%		Bagian Hukum Sekretariat Daerah & Sekretariat DPRD
7	Pelayanan Publik	4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	0	-	-	Nilai	Sebagaimana dimaksud pada Surat Ketua Ombudsman bahwa tahun 2025, Kabupaten Tapanuli Utara tidak menjadi lokus penilaian maladministrasi.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8	Penelitian dan Pengembangan	4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	1	1	100	%	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah "**Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan**" dengan 9 Misi, yakni

1. Memajukan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berdaya saing untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Memajukan ekonomi melalui pertanian yang maju dan berteknologi yang mampu memberikan produktivitas yang tinggi;
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, pencegahan stunting serta peningkatan peran generasi muda dan perempuan dalam pembangunan;
4. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan dan tanggap risiko bencana;
5. Penerapan kajian budaya dan kearifan lokal mulai dari pendidikan dasar untuk memperkuat karakter terbaik masyarakat sehingga mampu meminimalisir efek negatif arus informasi dan media sosial;
6. Pengembangan kebudayaan berdasarkan kekayaan budaya dan kearifan lokal;
7. Memperkuat Reformasi Birokrasi untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan;
8. Menjadikan desa mandiri yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia; dan
9. Meningkatkan pelestarian lingkungan serta peningkatan upaya penanggulangan mitigasi dan bencana.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan SAKIP mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja menggambarkan penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis melalui pencapaian target indikator kinerja sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang selanjutnya dinyatakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun 2025 sebagaimana mengacu dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025. Mempedomani Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja,pada poin 4 disebutkan *bahwa apabila terdapat kementerian/lembaga/pemerintah daerah melakukan penyesuaian atas Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja 2025 dengan dasar RPJMD dan Renstra periode terbaru, maka laporan kinerja 2025 tetap harus memuat analisa kinerja berdasarkan perencanaan periode sebelum dan sesudah perubahan*, maka capaian akuntabilitas kinerja ini menyajikan analisis kinerja sebelum dan sesudah (perubahan).

Dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 (sebelum) disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan turunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sebelum)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Milliar Rupiah	2.970,30
2	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	2,23
		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	16,05

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	2,40
4	Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi	Milliar Rupiah	450,00
5	Peningkatan Kapasitas Sistem Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Nilai	114,00
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	79,51
7	Peningkatan Kualitas Infrastuktur Jaringan Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	81,00
8	Peningkatan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Persen	67,00
9	Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	88,61
10	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	72,55
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	83,65
12	Mewujudkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	58,50
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,41
13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP
14	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	25,00
15	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	Persen	100,00
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,51
17	Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	43,08
18	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	70,05
		Survei Penilaian Integritas	Nilai	75,00

Dokumen perjanjian kinerja sesudah (perubahan), mengacu dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2029, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesudah)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Persen	8,00
2	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	10,00
3	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	2,40
4	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita	Rp Juta /Tahun	450,00
5	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	114,00
6	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor pertanian	PDRB sub sektor pertanian	Rp Milliar	4.916,10
7	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan	PDRB sub sektor perikanan	Rp Milliar	45,41
8	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,64
9	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,32
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,75
10	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,23
		Prevalensi Stunting	Persen	30,04
11	Meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan	Cakupan pembinaan pemuda	Persen	60,00
12	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,75

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
13	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	80,00
14	Meningkatnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	12,39
15	Meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan karakter yang berbasis budaya	Persen	60,00
16	Meningkatnya pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60,42
17	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	80,00
18	Terpeliharanya ekosistem kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	12,39
19	Meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang holistik	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	10,00
20	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Poin	65,00
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP
		Indeks Integritas Nasional	Persen	71,19
		Indeks Persepsi Korupsi	Nilai	36,00
		Indeks Reformasi Hukum	Poin	88,05
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	4,53
21	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah	Persen	100,00
22	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	10,95
23	Meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	Poin	200,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
24	Meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,55
25	Meningkatnya pembangunan teknologi informasi	Indeks Masyarakat Digital	Poin	45,00
26	Meningkatnya jumlah desa mandiri	Indeks Desa	Persen	64,00
27	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	79,51
		Energi Baru Terbarukan (EBT)	Nilai/MW	42,20
28	Meningkatnya kapasitas daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,36

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan perjanjian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun tersebut;
2. Pengumpulan data kinerja dilakukan berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari perangkat daerah/unit kerja Kabupaten Tapanuli Utara.

Metode/cara pengukuran kinerja dengan melakukan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja

(*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu:

1. Data internal yang berasal dari seluruh perangkat daerah baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan triwulanan, semesteran dan laporan kinerja perangkat daerah;
2. Data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara seperti data-data hasil pengukuran indikator kinerja makro dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagainya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja yakni :

1. Indikator bermakna positif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, digunakan rumus :

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \; \boldsymbol{x}\; \textbf{100\%}$$

2. Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, yang satuan indikatornya dalam persen (%), misalnya indikator kinerja *prevalensi stunting*, digunakan rumus :

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{(\textbf{100} - \textbf{Realisasi})}{(\textbf{100} - \textbf{Target})} \; \boldsymbol{x}\; \textbf{100\%}$$

3. Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, yang satuan indikatornya bukan dalam persen (%) misalnya indikator kinerja *indeks risiko bencana*, digunakan rumus

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{(\textbf{2 x Target}) - \textbf{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \; \boldsymbol{x}\; \textbf{100\%}$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja, mengacu interval realisasi kinerja mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. Pengukuran kinerja dibuat dalam skala pengukuran ordinal dengan pemberian kriteria berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	Kode Warna
91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi	Biru
76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Berdasarkan tabel 2.4 diatas, ditetapkan apabila capaian indikator kinerja lebih dari 100,00% maka persentase capaiannya tetap didefinisikan 100,00 % dengan kriteria sangat tinggi dan untuk capaian kinerja kurang dari atau sama dengan 50,00% didefinisikan kriteria kinerja sangat rendah. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Target Perjanjian Kinerja (sebelum)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Milliar Rupiah	2.970,30	5.436,41	100,00	
2	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	2,23	2,33	100,00	
		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	16,05	16,62	100,00	
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	2,40	2,54	100,00	
4	Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi	Milliar Rupiah	450,00	612,14	100,00	
5	Peningkatan Kapasitas Sistem Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Nilai	114,00	115,33	98,83	
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	79,51	82,43	100,00	
7	Peningkatan Kualitas Infrastuktur Jaringan Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	81,00	37,21	45,94	
8	Peningkatan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Persen	67,00	51,34	76,63	
9	Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	88,61	87,91	99,21	
10	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	72,55	73,12	100,00	
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	83,65	84,15	100,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
12	Mewujudkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	58,50	N/A	0,00	
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,41	N/A	0,00	
13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP*	100,00	
14	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	25,00	10,88	43,52	
15	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	Persen	100,00	100,00	100,00	
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,51	3,45	98,58	
17	Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	43,08	65,57	100.00	
18	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	70,05	64,07	91,46	
		Survei Penilaian Integritas	Nilai	75,00	63,05	84,07	

**) realisasi tahun 2024*

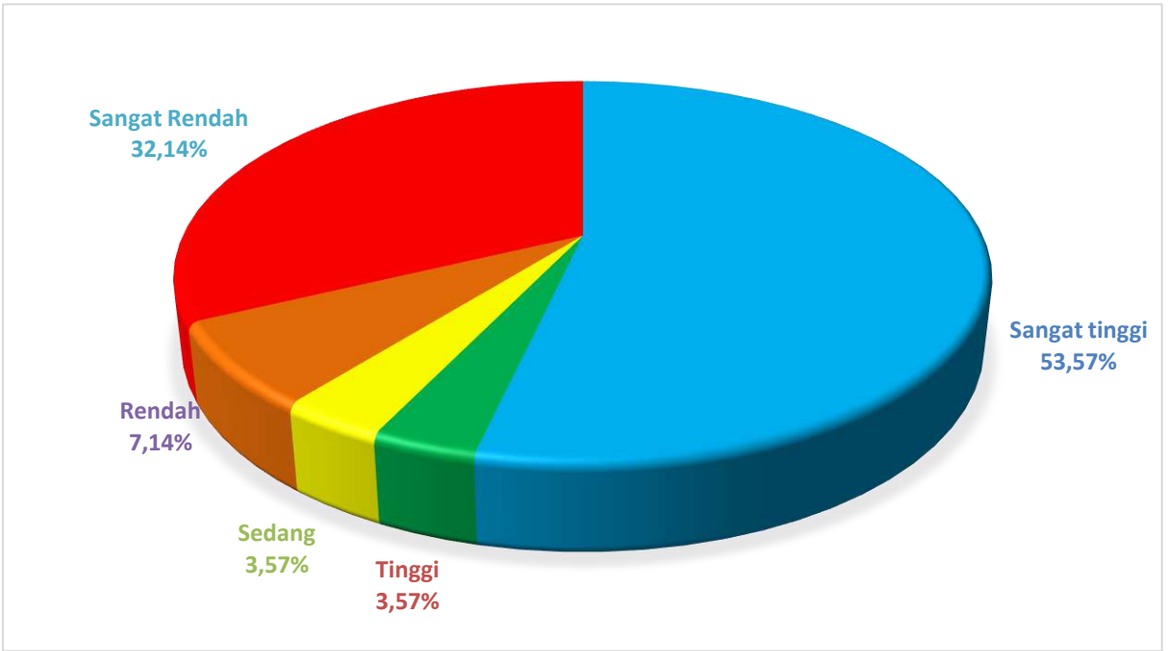
Tabel 2.6
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Target Perjanjian Kinerja (sesudah)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	Persen	8,00	72,88	100,00	100,00
2	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	10,00	N/A	0,00	0,00
3	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	16,44	16,62	100,00	100,00
4	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita	Rp Juta /Tahun	36,01	37,01	100,00	100,00
5	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	2,31	2,23	96,54	96,54
6	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor pertanian	PDRB sub sektor pertanian	Rp Milliar	4.916,10	5.436,41	100,00	100,00
7	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan	PDRB sub sektor perikanan	Rp Milliar	45,41	46,56	100,00	100,00
8	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,64	74,50	94,74	94,74
9	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,32	10,50	100,00	100,00
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,75	13,75	100,00	
10	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,23	74,70	100,00	98,24
		Prevalensi Stunting	Persen	30,40	32,50	96,48	
11	Meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan	Cakupan pembinaan pemuda	Persen	60,00	N/A	0,00	0,00
12	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,75	N/A	0,00	0,00
13	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	51,00	N/A	0,00	0,00
14	Meningkatnya pemenuhan akses	Persentase rumah tangga dengan akses	Persen	87,65	87,44	99,76	99,76

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
	hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan					
15	Meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan karakter yang berbasis budaya	Persen	60,00	N/A	0,00	0,00
16	Meningkatnya pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60,00	N/A	0,00	0,00
17	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	80,00	N/A	0,00	0,00
18	Terpeliharanya ekosistem kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	12,39	N/A	0,00	0,00
19	Meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang holistik	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	10,00	5,51	55,10	55,10
20	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Poin	65,00	64,07	98,57	**64,52**
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP*	100,00	
		Indeks Integritas Nasional	Persen	71,19	63,05	88,57	
		Indeks Persepsi Korupsi	Nilai	36,00	N/A	0,00	
		Indeks Reformasi Hukum	Poin	88,05	97,72	100,00	
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	4,53	N/A	0,00	
21	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	10,95	N/A	0,00	0,00
23	Meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	Poin	200,00	147,00*	73,50	73,50
24	Meningkatnya kualitas dan	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,55	3,45	97,18	97,18

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
	kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah						
25	Meningkatnya pembangunan teknologi informasi	Indeks Masyarakat Digital	Poin	45,00	35,22	78,27	78,27
26	Meningkatnya jumlah desa mandiri	Indeks Desa	Persen	64,00	67,50	100,00	100,00
27	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	79,51	82,43	100,00	100,00
		Energi Baru Terbarukan (EBT)	Nilai/ MW	42,20	42,50	100,00	
28	Meningkatnya kapasitas daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,36	0,43	100,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 sebesar 62,78%, diukur dari rata-rata pencapaian indikator kinerja 28 sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025. Berdasarkan capaian 28 sasaran strategis pada tabel diatas diketahui bahwa 15 sasaran strategis kriteria capaiannya sangat tinggi, 1 sasaran strategis kriteria capaiannya tinggi, 1 sasaran strategis capaian kinerjanya sedang, 2 sasaran strategis capaian kinerjanya rendah, dan 9 sasaran strategis capaian kinerjanya sangat rendah, sebagaimana digambarkan pada grafik.



c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya atau tahun 2024 tidak dapat dilakukan karena dokumen perencanaan yang menjadi acuan kinerja yakni Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2026 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 berlaku efektif mulai tahun 2025 serta capaian kinerja dapat diperoleh apabila indikator kinerja disertai angka target kinerja tahun 2024.

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Pengukuran capaian (realisasi) kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah hanya dilakukan pada perjanjian kinerja tahun 2025 (sesudah) yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Target 2029	Capaian
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	Persen	8,00	72,88	100,00	13,00	100,00
Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	10,00	N/A	0,00	11,50	0,00
Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	16,44	16,62	100,00	17,09	97,25
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita	Rp Juta /Tahun	36,01	37,01	100,00	36,93	100,00
Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	2,31	2,23	96,54	2,34	95,30
Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor pertanian	PDRB sub sektor pertanian	Rp Milliar	4.916,10	5.436,41	100,00	6.380,5	85,20
Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan	PDRB sub sektor perikanan	Rp Milliar	45,41	46,56	100,00	64,01	72,74
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,64	74,50	94,74	80,89	92,10
Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,32	10,50	100,00	10,67	98,41
	Harapan lama sekolah	Tahun	13,75	13,75	100,00	13,99	98,28
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,23	74,70	100,63	75,31	99,19
	Prevalensi Stunting	Persen	30,40	32,50	96,48	14,20	78,67

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Target 2029	Capaian
Meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan	Cakupan pembinaan pemuda	Persen	60,00	N/A	0,00	67,87	0,00
Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,75	N/A	0,00	97,99	0,00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	51,00	N/A	0,00	51,08	0,00
Meningkatnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	87,65	87,44	99,76	89,65	78,67
Meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggara kan pendidikan karakter yang berbasis budaya	Persen	60,00	N/A	0,00	82,99	0,00
Meningkatnya pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60,00	N/A	0,00	67,87	0,00
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat	Indeks Penyelenggara an Trantibumlin mas	Indeks	80,00	N/A	0,00	87,97	0,00
Terpeliharanya ekosistem kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	12,39	N/A	0,00	15,93	0,00
Meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembang an industri kepariwisata an dan ekonomi kreatif yang holistik	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	10,00	5,51	55,10	30,00	18,37
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Poin	65,00	64,07	98,57	72,88	87,91
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
	Indeks Integritas Nasional	Persen	71,19	63,05	100,00	78,50	80,32
	Indeks Persepsi Korupsi	Nilai	36,00	N/A	0,00	39,17	0,00
	Indeks Reformasi Hukum	Poin	88,05	97,72	100,00	91,53	100,00
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	4,53	N/A	0,00	4,59	0,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Target 2029	Capaian
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	10,95	N/A	0,00	11,88	0,00
Meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	Poin	200,00	147,00	73,50	300,00	66,65
Meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,55	3,45	97,18	3,83	90,08
Meningkatnya pembangunan teknologi informasi	Indeks Masyarakat Digital	Poin	45,00	35,22	78,27	52,84	66,65
Meningkatnya jumlah desa mandiri	Indeks Desa	Persen	64,00	67,50	100,00	68,00	99,26
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	79,51	82,43	100,00	80,20	100,00
	Energi Baru Terbarukan (EBT)	Nilai/MW	42,20	42,50	100,00	92,20	46,10
Meningkatnya kapasitas daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,36	0.43	100,00	0,40	100,00

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Poin ini akan menyajikan analisis kinerja sasaran strategis melalui pencapaian indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan (sesudah) sedangkan analisis kinerja sasaran strategis perjanjian kinerja sebelum, tidak disajikan karena dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyusunan perjanjian kinerja yakni Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 tidak digunakan lagi. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai, menyajikan analisis 28 sasaran strategis yang disesuaikan dengan 9 Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Misi 1	***Memajukan ekonomi rakyat yang inklusif dan berdaya saing untuk meningkatkan pendapatan masyarakat***

Misi pertama menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Tapanuli Utara dimaksudkan untuk menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Utara secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Ekonomi ini terdiri dari sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan), perdagangan, perindustrian, perhubungan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam ekonomi inklusif dilakukan secara kolaboratif dimana untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah daerah, pelaku ekonomi, dunia usaha dan investor) untuk secara bersama sama membangun ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam rangka perwujudan misi kesatu ditetapkan tujuan *meningkatnya pendapatan masyarakat,* yang keberhasilannya diukur melalui indikator *PDRB Per kapita (Rp Juta Per Tahun) serta 5 sasaran yakni terwujudnya iklim investasi yang kompetitif, meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian, meningkatnya nilai tambah perdagangan, meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja, dan meningkatnya daya saing industri.*

Sasaran 1

Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif

Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif memiliki relevansi yang sangat tinggi dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Iklim investasi yang kondusif, transparan dan kompetitif akan mendorong penanaman modal yang lebih tinggi dan menggerakkan roda perekonomian.

Iklim investasi yang kompetitif adalah lingkungan ekonomi, kebijakan dan institusional yang kondusif, aman serta efisien yang mendorong investor domestik maupun asing menanamkan modal dengan biaya dan risiko serendah mungkin tetapi memberikan keuntungan jangka panjang yang tinggi. Pengukuran keberhasilan sasaran ini dilihat dari indikator persentase peningkatan investasi di Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 2.8
Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	- 79,88	8,00	72,88	**100,00**

Sasaran terwujudnya iklim investasi yang kompetitif diukur melalui pencapaian indikator persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota, capaian tahun 2025 sebesar 100,00% dan kriteria capaian kinerja sangat tinggi. Formula penghitungan indikator yakni nilai investasi tahun 2025 dikurangi nilai investasi tahun 2024, dibagi nilai investasi tahun 2024 dikali 100,00%. Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) *Online,* Realisasi Nilai Investasi di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2025 adalah Rp 612.144.540.492,- dan realisasi investasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 354.077.277.714,-., maka diperoleh realisasi persentase peningkatan investasi di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 sebesar 72,88%.

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. **Pengawasan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)** yakni melalui penerapan layanan pendampingan pengisian LKPM secara

rutin setiap triwulan, dimana petugas secara aktif menghubungi dan mendatangi pelaku usaha yang belum melaporkan LKPM dan membantu menginput data realisasi modal mereka ke sistem OSS, sehingga investasi dapat tercatat resmi sebagai realisasi daerah.

2. **Layanan Perizinan Keliling dan OSS Mobile ("Jemput Bola" ke Kecamatan)** yakni melalui peluncuran layanan keliling ke pasar-pasar/ kegiatan usaha di kecamatan jauh seperti Pangaribuan, Garoga dan Parmonangan yang bertujuan untuk membantu Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) di tempat bagi pedagang dan petani, sehingga peningkatan drastis jumlah penerbitan NIB risiko rendah, yang secara agregat menyumbang nilai investasi sektor mikro-kecil.
3. **Integrasi Perizinan Tata Ruang (KKPR)** yakni melalui Dinas PMPTSP berkoordinasi intensif dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang guna mempercepat validasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
4. **Fasilitasi Kemitraan (Investor Besar dan UMKM)** yakni melalui Dinas PMPTSP memfasilitasi kemitraan dengan mewajibkan investor ritel modern (minimarket berjejaring) agar menjalin kemitraan dengan UMKM atau hotel agar menjalin kemitraan dengan pemasok lokal (petani sayur/buah atau pengrajin ulos).

Sasaran 2

Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian

Sasaran meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian diukur melalui pencapaian indikator kinerja kontribusi UMKM terhadap PDRB, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.9
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	N/A	10,00	N/A	**0,00**

Sasaran 3

Meningkatnya nilai tambah perdagangan

Meningkatnya nilai tambah perdagangan sebagai sasaran ketiga dalam mencapai tujuan meningkatnya pendapatan masyarakat diukur melalui pencapaian indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB artinya adalah persentase nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh aktivitas jual-beli barang dan jasa (perdagangan besar dan eceran) dibandingkan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Sektor perdagangan merupakan kontributor kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara setelah sektor pertanian. Semakin tinggi persentase sektor perdagangan menunjukkan semakin bergantungnya perekonomian suatu daerah pada aktivitas niaga. Aktivitas perdagangan yang tinggi mencerminkan perputaran uang yang cepat dan membantu menghubungkan sektor produksi dengan konsumen.

Tabel 2.10
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya nilai tambah perdagangan

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	16,29	16,44	16,62	**100,00**

Capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai tambah perdagangan sebesar 100,00% kriteria capaian sangat tinggi. Realisasi indikator kinerja sebesar 16,62% diperoleh dari Publikasi BPS, Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2026, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.11
Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Utara 2021-2025

	Lapangan usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43,91	44,91	45,16	44,85	45,11
B	Pertambangan dan penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
C	Industri pengolahan	2,31	2,25	2,20	2,18	2,23
D	Pengadaan listrik dan gas	0,10	0,09	0,09	0,08	0,09

	Lapangan usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	14,19	14,24	14,14	13,89	13,09
G	**Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor**	**15,84**	**15,79**	**15,91**	**16,29**	**16,62**
H	Transportasi dan pergudangan	4,80	4,87	5,13	5,23	5,63
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2,36	2,34	2,35	2,46	2,54
J	Informasi dan komunikasi	0,82	0,78	0,74	0,74	0,75
K	Jasa keuangan dan asuransi	1,59	1,57	1,53	1,49	1,46
L	Real estate	2,32	2,25	2,20	2,15	2,09
M,N	Jasa perusahaan	0,31	0,30	0,29	0,30	0,30
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	8,88	8,12	7,83	7,91	7,64
P	Jasa pendidikan	1,56	1,50	1,47	1,46	1,49
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,70	0,68	0,68	0,68	0,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

**) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*
Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2026.

Sasaran 4

Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja

Upaya keempat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatnya pendapatan masyarakat yakni meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja, diukur melalui pencapaian indikator kinerja tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita. Tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita adalah ukuran efisiensi yang menunjukkan jumlah output (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh setiap pekerja atau per jam kerja dalam suatu perekonomian, yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tenaga kerja.

Tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita merupakan data makro yang bersumber dari hasil perhitungan Badan Pusat Statistik diperoleh dari formula PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2025 dibagi jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2025. Data tingkat

produktivitas tenaga kerja per kapita Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 dan 2025 sebagaimana tabel berikut :

Uraian	Tahun	
	2024	2025
PDRB ADHK (*milliar rupiah*)	6.931,24	7.248,51
Jumlah penduduk yang bekerja (*orang*)	194.106	195.827
Tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita (*Rp Juta/tahun*)	**35,71**	**37,01**

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.12
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesempatan Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita	Rp Juta/ Tahun	35,71	36,01	37,01	**100,00**

Berdasarkan pengukuran kinerja diatas, diperoleh capaian kinerja sasaran meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja tahun 2025 sebesar 100,00 % dengan kriteria capaian sangat tinggi. Realisasi kinerja sebesar Rp 37,01 Juta/tahun melampaui target kinerja tahun 2025.

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja yakni pelaksanaan pelatihan-pelatihan di tahun 2025 telah relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga peserta yang telah mengikuti pelatihan akan dapat memulai usaha yang baru maupun semakin meningkatkan kemampuannya dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu tidak hanya Dinas Ketenagakerjaan saja yang melakukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat tetapi juga instansi maupun stakeholder yang lain; dimana tujuan dari pelatihan tersebut adalah peningkatan kemampuan dan kompetensi serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita adalah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan

Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, dengan pagu anggaran tahun 2025 senilai Rp. 295.312.200,00 meningkat 98,40% dibandingkan pagu anggaran tahun 2024 senilai Rp 148.844.800,00. Adapun pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebanyak 6 paket dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pelatihan	Sumber Dana	Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Menjahit	APBD Kab. Taput	12 Juni s/d 4 Juli 2025	16 Orang
2	Pelatihan Processing Pembuatan Roti dan Kue	APBD Kab. Taput	12 Juni s/d 4 Juli 2025	16 Orang
3	Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita	P-APBD Kab. Taput	13 s/d 31 Oktober 2025	16 Orang
4	Pelatihan Teknik Bangunan Meubelair	P-APBD Kab. Taput	13 s/d 31 Oktober 2025	16 Orang
5	Pelatihan Teknik Las	P-APBD Kab. Taput	13 s/d 31 Oktober 2025	16 Orang
6	Pelatihan Berbasis Proyek Pengoperasian *Tools Generative AI* untuk Konten dan Bisnis	APBN	13 Oktober s/d 7 November 2025	16 Orang
Total				**96 Orang**

Sasaran 5

Meningkatnya daya saing industri

Sasaran kelima Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatnya pendapatan masyarakat yakni meningkatnya daya saing industri, diukur melalui pencapaian indikator kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Badan Pusat Statistik mendefinisikan industri pengolahan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya daya saing industri sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.13
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya daya saing industri

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	2,18	2,31	2,23	**96,54**

Capaian kinerja sasaran meningkatnya daya saing industri sebesar 96,54% kriteria capaian sangat tinggi. Realisasi indikator kinerja sebesar 2,23% diperoleh dari Publikasi BPS, Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2026, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.14
Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Utara 2021-2025

	Lapangan usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43,91	44,91	45,16	44,85	45,11
B	Pertambangan dan penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
C	**Industri pengolahan**	**2,31**	**2,25**	**2,20**	**2,18**	**2,23**
D	Pengadaan listrik dan gas	0,10	0,09	0,09	0,08	0,09
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	14,19	14,24	14,14	13,89	13,09
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	15,84	15,79	15,91	16,29	16,62
H	Transportasi dan pergudangan	4,80	4,87	5,13	5,23	5,63
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2,36	2,34	2,35	2,46	2,54
J	Informasi dan komunikasi	0,82	0,78	0,74	0,74	0,75
K	Jasa keuangan dan asuransi	1,59	1,57	1,53	1,49	1,46
L	Real estate	2,32	2,25	2,20	2,15	2,09
M,N	Jasa perusahaan	0,31	0,30	0,29	0,30	0,30
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	8,88	8,12	7,83	7,91	7,64
P	Jasa pendidikan	1,56	1,50	1,47	1,46	1,49

	Lapangan usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,70	0,68	0,68	0,68	0,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2026.

Misi 2	***Memajukan ekonomi melalui pertanian yang maju dan berteknologi yang mampu memberikan produktivitas yang tinggi***

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan misi kedua ditetapkan tujuan meningkatnya produktivitas pertanian, diukur melalui capaian indikator PDRB ADHB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Upaya mewujudkan tujuan meningkatnya produktivitas pertanian dilakukan melalui 3 sasaran yakni meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor pertanian, meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan dan meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau.

Sasaran 6

Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor pertanian

Secara umum kemajuan suatu negara atau daerah biasanya diukur dari pertumbuhan pada sektor ekonominya. untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah provinsi, kabupaten atau kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan tulang punggung perekonomian daerah, sebagai penghasil nilai tambah dan devisa maupun sumber penghasilan utama dan penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sub sektor pertanian yang paling dominan dibudidayakan masyarakat adalah sektor tanaman bahan makanan mencakup tanaman padi, palawija dan hortikultura.

Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai

tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar tersebut umumnya ditetapkan selama periode 10 (sepuluh) tahunan. Penentuan PDRB atas harga berlaku, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi/deflasi akibat fluktuasi harga barang.

Sasaran meningkatknya PDRB (ADHB) sub sektor pertanian diukur melalui indikator kinerja PDRB sub sektor pertanian, capaian tahun 2025 sebesar 100,00 % kriteria capaian kinerja sangat tinggi dan melampaui target kinerja. Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.15
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor pertanian

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
PDRB Sub Sektor Pertanian	Rp Milliar	5.058,48	4.916,10	5.436,41	**100,00**

Realisasi indikator kinerja diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2025*, tabel berikut menggambarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha:

Tabel 2.16
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2021-2025

	Lapangan usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	**Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	**3.864,35**	**4.331,58**	**4.737,43**	**5.058,48**	**5.436,41**
B	Pertambangan dan penggalian	6,23	6,85	7,48	7,85	8,35
C	Industri pengolahan	203,35	216,90	230,83	246,19	269,29
D	Pengadaan listrik dan gas	8,44	8,85	9,30	9,43	10,66
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	8,70	9,18	9,82	10,21	10,66
F	Konstruksi	1.249,05	1.373,59	1.483,14	1.566,27	1.577,91
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1.394,25	1.522,75	1.668,84	1.837,17	2.002,81
H	Transportasi dan pergudangan	422,66	469,97	538,14	590,35	678,07

	Lapangan usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	207,85	226,05	246,98	277,64	306,11
J	Informasi dan komunikasi	71,81	75,52	77,44	83,30	89,95
K	Jasa keuangan dan asuransi	139,50	151,49	160,20	168,43	175,73
L	Real estate	204,41	217,34	230,46	242,33	251,50
M,N	Jasa perusahaan	27,39	29,25	30,76	33,45	36,35
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	781,81	783,60	821,07	892,62	920,30
P	Jasa pendidikan	137,65	144,90	153,89	164,70	179,62
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	61,41	65,61	70,84	76,17	82,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	11,21	12,20	13,07	14,55	15,52
Produk Domestik Regional Bruto		**8.800,08**	**9.645,64**	**10.489,70**	**11.279,15**	**12.051,74**

*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2026.

Sasaran 7

Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan

Upaya kedua dalam mencapai tujuan meningkatnya produktivitas pertanian diwujudkan melalui pencapaian sasaran meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Subsektor Perikanan merupakan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam subsektor perikanan di wilayah Tapanuli Utara dinilai atas dasar harga berlaku (ADHB), menggambarkan kinerja ekonomi riil sektor perikanan. Dalam mencapai produktivitas ini, diperlukan kontribusi ekonomi nyata dari sektor perikanan yang diukur melalui PDRB. Semakin tinggi PDRB subsektor perikanan, maka semakin tinggi nilai tambah ekonomi yang dihasilkan pelaku usaha perikanan. Sasaran strategis meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan diukur dengan pencapaian indikator kinerja PDRB sub sektor perikanan, capaian tahun 2025 sebesar 100% kriteria capaian sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.17
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
PDRB Sub Sektor Perikanan	Rp Milliar	43,99	45,41	46,56	**100,00**

Kinerja PDRB sub sektor perikanan di Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif, dilihat dari kenaikan PDRB tahun 2024 sebesar 43,99 miliar rupiah menjadi 46,56 miliar rupiah pada tahun 2025. Angka pencapaian di tahun 2025 ini naik sebesar 5,84% dari tahun sebelumnya dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 45,41 miliar rupiah dengan persentase capaian menyentuh level 100,00%. Peningkatan indikator kinerja yang signifikan ini merupakan manifestasi nyata dari keberhasilan sinergi program pemerintah daerah dalam mendorong efisiensi biaya produksi budidaya air tawar, seperti pemanfaatan pakan mandiri, pemberian benih ikan kepada masyarakat, pembukaan lahan tidur menjadi lahan produktif, penyuluhan perikanan serta budidaya ikan nila dan lele intensif sistem terpal yang diusahai BUMDes, masyarakat mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja PDRB sub sektor perikanan yakni program pengelolaan perikanan budidaya, kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan dengan sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, sub kegiatan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat, serta sub kegiatan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat pada dinas ketahanan pangan dengan pagu anggaran tahun 2025 senilai Rp2.279.705.214 meningkat 186,69% atau Rp1.484.511.566 dibandingkan pagu anggaran tahun 2024 senilai Rp795.193.648. Sebagian besar kenaikan alokasi anggaran tahun 2025 difokuskan pada pengadaan sarana prasarana dan teknologi perikanan seperti Optimalisasi Balai Benih Ikan yang memiliki karakteristik "*Time Lag*" (jeda waktu). Pengeluaran dilakukan tahun ini, namun manfaat ekonominya (peningkatan kapasitas produksi) baru akan menjadi nilai tambah ekonomi pada tahun berikutnya seiring dengan beroperasinya sarana prasarana yang dibangun pada tahun ini. Kegiatan pembagian benih

ikan dan pembukaan lahan perikanan membutuhkan waktu tumbuh sebelum dapat dipanen dan dihitung sebagai nilai produksi (PDRB), dimana pemberian bantuan dan pelatihan pada tahun anggaran sebelumnya mendongkrak kenaikan PDRB Perikanan tahun ini.

PDRB sub sektor perikanan memerlukan atensi khusus, pengadaan sarana prasarana perikanan, penyaluran benih ikan dan induk berkualitas serta pembukaan lahan perikanan menjadi modal utama untuk membangun infrastruktur perikanan yang hasilnya diharapkan mulai terlihat pada capaian tahun 2026 dan tahun berikutnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PDRB sub sektor perikanan yaitu dengan pengembangan pakan mandiri berbahan baku lokal (dedak, jagung), pakan alami (keong, cacing, belalang), budidaya maggot (BSF), budidaya Azolla, lemna dan lain-lain untuk menekan biaya produksi. Selain itu, intensifikasi teknologi bioflok, teknologi *nano bubble*, Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan umum selain Danau Toba, *aquaponic*, dan perikanan sistem RAS (*Recirculation Aquaculture System*) untuk meningkatkan padat tebar dan efisiensi lahan, penumbuhan dan pembangunan UPR (Unit Pembenihan Rakyat) lokal dan optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) untuk pemenuhan benih unggul.

Sasaran 8

Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau

Upaya ketiga dalam pencapaian tujuan meningkatnya produktivitas pertanian diwujudkan melalui pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau yang diukur melalui indikator kinerja indeks ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menjadi ukuran komprehensif apakah produktivitas pertanian berhasil dikonversi menjadi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang layak bagi masyarakat. Indeks ketahanan pangan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 diperoleh 74,50 indeks sebagaimana ditetapkan dalam

Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 223.1 Tahun 2025 tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional. Skor indeks ketahanan pangan 74,50 menggambarkan Kabupaten Tapanuli Utara termasuk dalam kategori wilayah tahan pangan.

Tabel 2.18
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,14	78,64	74,50	94,74

Target Indikator Kinerja untuk Indeks Ketahanan Pangan tidak tercapai disebabkan oleh beberapa aspek, yakni :

1. Aspek Ketersediaan: belum optimalnya peningkatan produksi pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian, rendahnya ketersediaan protein. Selain itu juga karena dampak perubahan iklim yang mempengaruhi jadwal panen di beberapa komoditas unggulan daerah dan lahan pertanian yang terdampak bencana yang mengakibatkan gagal panen.
2. Aspek Keterjangkauan: masih kurangnya akses terhadap infrastruktur jalan bahkan adanya akses jalan yang terputus akibat dampak bencana, harga pangan yang fluktuatif yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
3. Aspek Pemanfaatan Pangan: karena rendahnya persentase keamanan pangan dan meningkatnya persentase balita *stunting*.
4. Selain itu, dalam pemutakhiran metodologi beberapa indikator tidak digunakan lagi dan sejumlah indikator ditambahkan. Indikator yang tidak digunakan lagi, yaitu persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, angka harapan hidup, dan rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk. Sementara itu, indikator yang ditambahkan dalam metode baru, yaitu rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundangan, koefisien varian harga, *Prevalence of Undernourishment*

(PoU), persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar, dan skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Indeks Ketahanan Pangan yakni program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan, program penanganan kerawanan pangan, program pengawasan keamanan pangan, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian serta program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dengan pagu anggaran tahun 2025 senilai Rp5.683.105.214 meningkat 80,69% atau sebesar Rp2.537.911.566 dibandingkan pagu anggaran tahun 2024 senilai Rp3.145.193.648 dengan adanya anggaran DAK Non Fisik kegiatan Pengembangan Desa Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sebesar Rp2.500.000.000. Kenaikan pagu anggaran ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kenaikan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) karena skor IKP diperoleh juga dari persentase penduduk miskin, *Prevalence of Undernourishment* (PoU), tingkat pendidikan perempuan, akses terhadap air minum, dan stunting pada balita.

Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan tren stabilitas yang kuat dan diproyeksikan akan mencapai target akhir RPJMD yakni 80,89 lebih cepat atau tepat waktu dengan mempertahankan program prioritas ketersediaan dan keamanan pangan yang sudah berjalan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan kegiatan pengembangan desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) pada 25 Desa di 5 Kecamatan dan kegiatan Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan memastikan masyarakat berpendapatan rendah tetap memiliki akses pangan, penyaluran bantuan pangan secara langsung ke desa-desa yang teridentifikasi rawan pangan berdasarkan peta *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA), penyaluran ternak ayam serta penanggulangan penyakit hewan ternak yang mendukung cadangan pangan dan perekonomian masyarakat.

Misi 3	**Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, pecegahan stunting serta peningkatan peran generasi muda dan perempuan dalam pembangunan**

Dalam mewujudkan misi 3, ditetapkan 1 tujuan strategis yakni tujuan meningkatnya kualitas pembangunan manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi (standar hidup layak).

Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, yang mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat dan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Dimensi pendidikan diukur melalui rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). RLS menggambarkan jumlah tahun pendidikan yang ditempuh oleh penduduk dewasa, sedangkan HLS mengukur potensi pendidikan anak-anak usia sekolah. Dimensi ekonomi (standar hidup layak) diukur melalui pendapatan nasional brutto per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Pendapatan ini mencerminkan daya beli masyarakat dan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar.

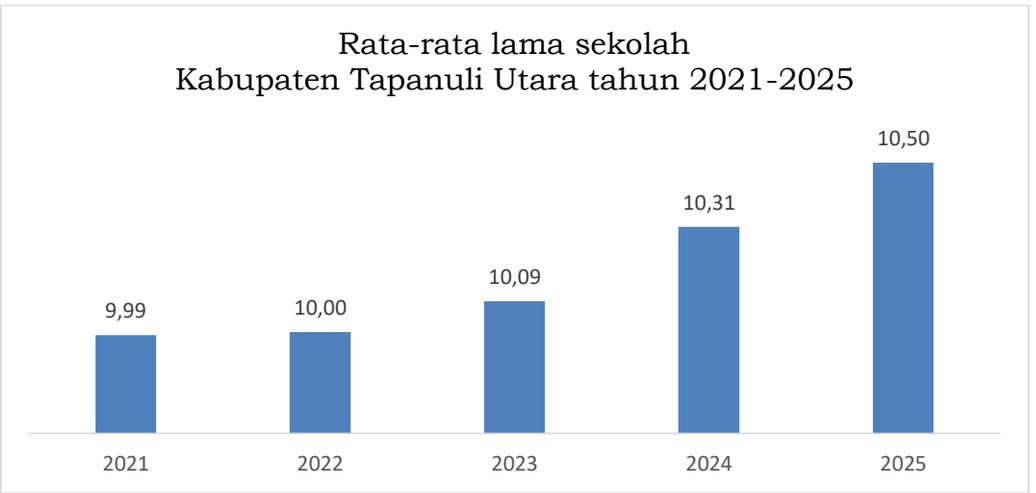
Sasaran 9
Meningkatnya kualitas pendidikan

Pendidikan merupakan dasar utama dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas merupakan kunci dalam pembentukan masyarakat yang terampil, inovatif dan siap menghadapi tantangan di tingkat global. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan pilar utama dalam mendongkrak pembangunan manusia yang berkualitas. Sasaran meningkatnya kualitas pendidikan diukur dengan pencapaian 2 indikator kinerja yakni rata-rata lama sekolah dan indikator harapan lama sekolah. Capaian sasaran tahun 2025 sebesar 100,00% kriteria capaian sangat tinggi sebagaimana disajikan pada tabel 2.28.

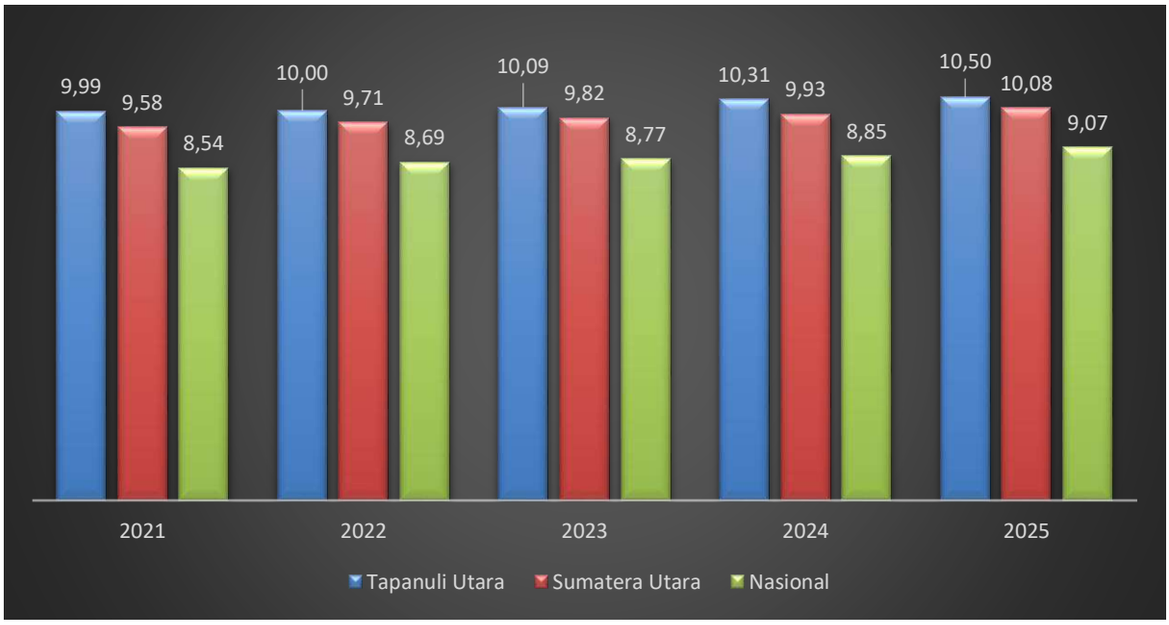
Tabel 2.19
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,31	10,32	10,50	**100,00**
Harapan lama sekolah	Tahun	13,74	13,75	13,75	**100,00**

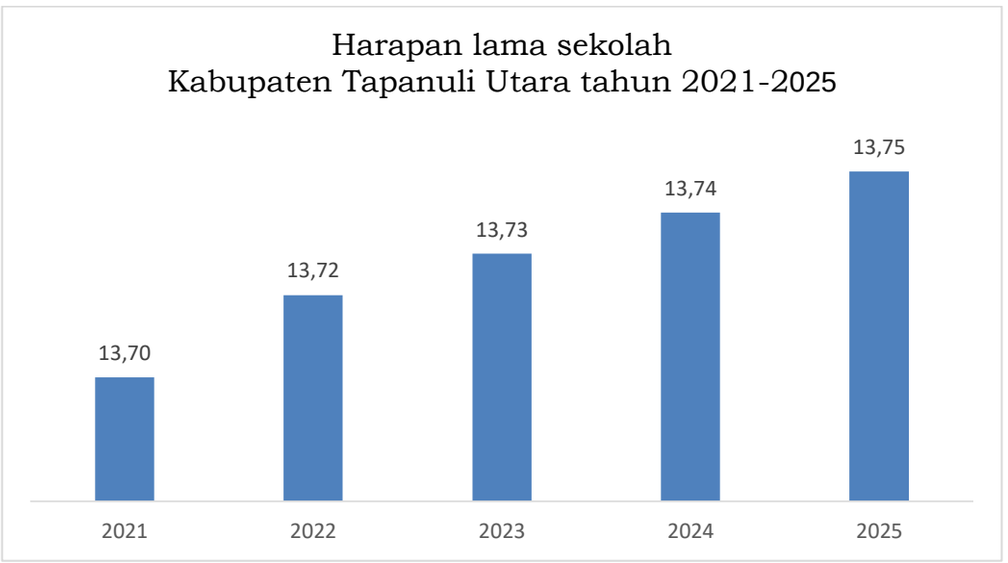
Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang telah diselesaikan penduduk dalam menjalani seluruh jenjang pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2025 adalah 10,50 tahun diperoleh dari data BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2026, artinya bahwa penduduk Kabupaten Tapanuli Utara yang telah berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,50 tahun atau telah bersekolah hingga kelas XI SMA. Realisasi rata-rata lama sekolah meningkat dibandingkan tahun 2024.



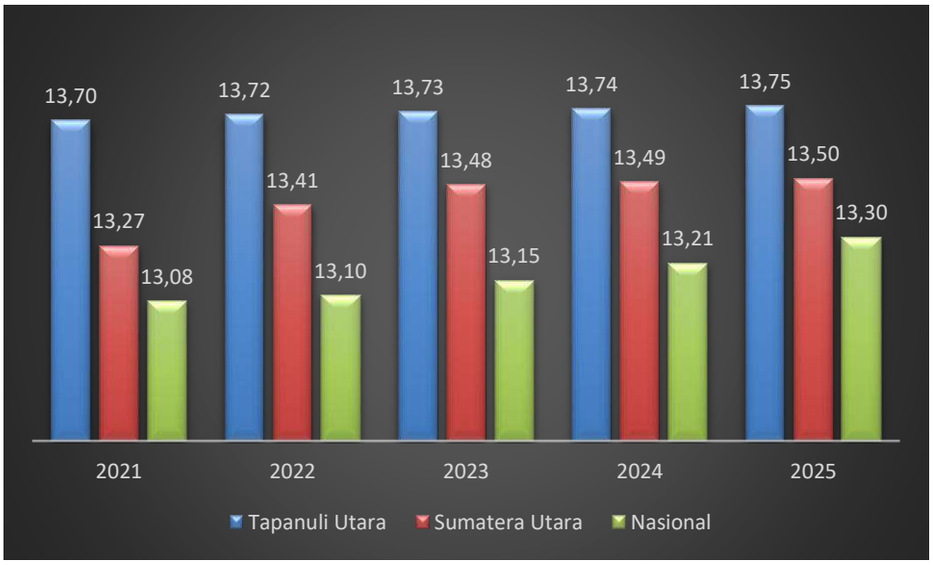
Berdasarkan grafik diatas diperoleh bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan tren yang meningkat dan positif. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara. Realisasi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara lebih baik dibandingkan provinsi Sumatera Utara dan tingkat nasional, sebagaimana grafik berikut :



Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Realisasi harapan lama sekolah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 adalah 13,75 tahun, kriteria capaian sangat tinggi dan sesuai target kinerja. Realisasi kinerja tahun 2025 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024. Realisasi kinerja harapan lama sekolah menggambarkan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal di tahun 2025 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,75 tahun atau setara dengan Diploma I.



Harapan lama sekolah Kabupaten Tapanuli Utara lebih baik dibandingkan provinsi Sumatera Utara dan tingkat nasional, sebagaimana grafik berikut :



Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja didukung oleh perangkat daerah terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni dengan adanya Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standard Sarana dan Prasarana SD, SMP dan SMA, yang mewajibkan adanya kriteria minimum setiap setiap sekolah harus memiliki perpustakaan, sehingga seluruh SMP dan SMA rata-rata sudah memiliki perpustakaan dan kebanyakan SD juga sudah mengupayakan untuk memiliki ruang perpustakaan yang dilaporkan pada data pokok pendidikan (Dapodik). Namun di tengah keberhasilan angka yang tinggi ini, masih terdapat persoalan yakni ketika ruang perpustakaan yang dilaporkan tersebut, belum maksimal peruntukannya atau pemanfaatannya untuk layanan perpustakaan.

Sasaran 10

Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan kesehatan masyarakat

Upaya mewujudkan tujuan meningkatnya kualitas pembangunan manusia ditetapkan sasaran meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan masyarakat, keberhasilan pencapaian sasaran diukur dengan 2 indikator kinerja yakni umur harapan hidup dan prevalensi stunting. Capaian sasaran tahun 2025 sebesar 98,24% kriteria sangat tinggi. Pengukuran capaian sasaran strategis sebagaimana tabel berikut :

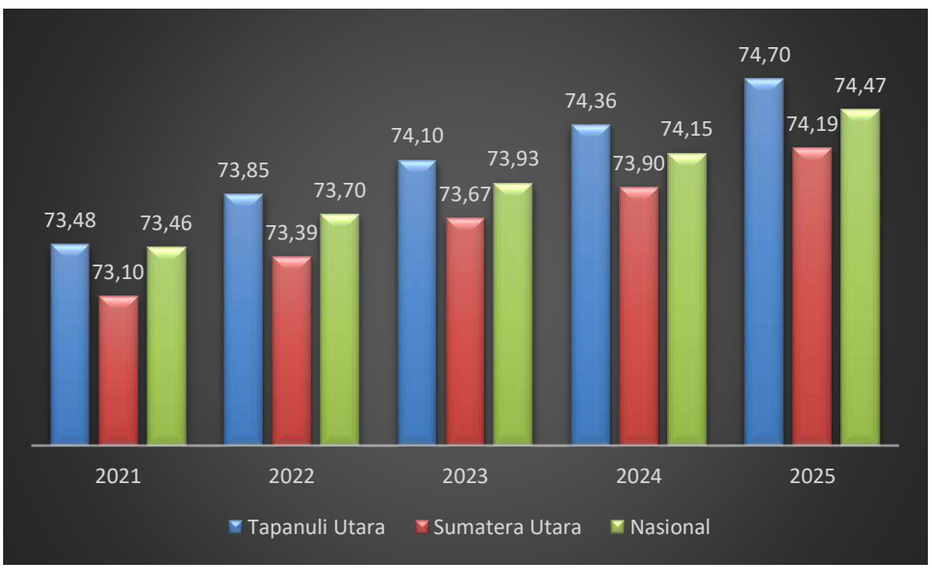
Tabel 2.20
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan layanan Kesehatan masyarakat

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Umur Harapan Hidup	Tahun	74,36	74,23	74,70	**100,00**
Prevalensi stunting	Persen	27,40	30,04	32,50	**96,48**

Umur Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Berdasarkan publikasi BPS, Umur Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 sebesar 74,70 tahun melampaui target kinerja. Realisasinya meningkat dibandingkan tahun 2024, menunjukkan bahwa semakin membaiknya kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Realisasi UHH Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 berada diatas realisasi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa program pembangunan kesehatan masih perlu terus ditingkatkan di tahun tahun berikutnya. Perbandingan realisasi UHH Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ditunjukkan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik diatas, bahwa umur harapan hidup Kabupaten Tapanuli Utara tren semakin meningkat dari tahun 2021 dan berada diatas realisasi Provinsi Sumatera Utara yang berada pada angka dan juga masih diatas Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan kesehatan terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Prevalensi stunting adalah persentase jumlah balita (0 - 59 bulan) di suatu wilayah yang mengalami gangguan pertumbuhan fisik (pendek/sangat pendek) akibat kekurangan gizi kronis, yang diukur sebagai indikator masalah gizi. Tabel berikut menggambarkan kinerja sektor kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara:

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Kematian Ibu (kasus)	5	4	2	1	
Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	9,79	3,64	5,66	5,011	
Angka Kesakitan	30,48	28,90	16,27	16,43	
Prevalensi Balita Gizi Buruk	14	12	0,27	0,2	
Universal Child Immunization (desa)	82,90	93,00	96,40	96,80	
Rasio dokter umum (per 100.000 penduduk)	20,94	21,46	21,76	24,73	
Rasio Fasyankes per satuan penduduk	69,79	68,73	72,96	69,48	
Persentase penduduk memiliki JKN	82,30	69,70	89,05	97,95	
Prevalensi stunting	26,70	27,40	27,40	27,40	32,50
Imunisasi Dasar Lengkap (bayi/balita)	56,20	93,90	92,20	97,70	

Sumber: Dinas Kesehaan

Faktor keberhasilan tercapainya target kinerja adalah melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan yang diarahkan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita, penurunan angka kesakitan, peningkatan rasio dokter per satuan penduduk, rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes per satuan penduduk dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Sasaran 11

Meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan

Sasaran meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan diukur melalui pencapaian indikator kinerja cakupan pembinaan pemuda, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.22
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan pembinaan pemuda	Persen	N/A	60,00	N/A	**0,00**

Sasaran 12

Meningkatnya kesetaraan gender

Sasaran meningkatnya kesetaraan gender yang diukur melalui pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.23
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kesetaraan gender

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	N/A	97,75	N/A	**0,00**

Misi 4	**Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan dan tanggap resiko bencana**

Pelaksanaan misi 4 bertujuan untuk meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang berkelanjutan yang diukur melalui pencapaian indikator kinerja indeks infrastruktur. Indeks infrastruktur adalah alat ukur komposit yang menilai ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas terhadap fasilitas dasar seperti jalan, air bersih, sistem drainase hingga pengelolaan sampah, yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan wilayah terutama dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar bagi rumah tangga. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada misi 4 ini yakni sasaran 13 dan 14 sebagai berikut :

Sasaran 13
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas

Sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas diukur melalui pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.24
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	N/A	51,00	N/A	**0,00**

Sasaran 14

Meningkatnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Sasaran meningkatnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan diukur melalui pencapaian indikator persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Pengukuran kinerja sasaran ini tahun 2025 sebesar 99,76% dengan kriteria capaian sangat tinggi, sebagaimana tabel :

Tabel 2.25
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	87,15	87,65	87,44	**99,76**

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan menggambarkan sejauhmana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui dinas terkait berdampak langsung pada kesejahteraan nyata masyarakat. Indikator ini mengukur rasio antara jumlah rumah tangga yang sudah memenuhi kriteria hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dibandingkan dengan total seluruh rumah tangga di Kabupaten Tapanuli Utara, dengan rumus penghitungan:

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan} \times 100\%}{\sum \text{Jumlah rumah tangga keseluruhan}}$$

Realisasi indikator kinerja sebesar 87, 44% diperoleh dari jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan tahun 2025 sebanyak 61.737 unit dibagi jumlah rumah tangga sebanyak 70.601 rumah tangga, yang digambarkan data berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (Unit)
1	Tarutung	9.890	8.902
2	Siatas Barita	3.227	2.604
3	Adiankoting	3.572	3.068

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (Unit)
4	Sipoholon	5.831	4.876
5	Pahae Julu	3.139	2.955
6	Pahae Jae	2.850	2.473
7	Simangumban	1.873	1.442
8	Purbatua	1.902	1.220
9	Siborongborong	10.666	9.758
10	Pagaran	4.191	3.608
11	Parmonangan	3.426	2.394
12	Sipahutar	6.043	5.615
13	Pangaribuan	6.639	6.505
14	Garoga	3.931	3.306
15	Muara	3.421	3.109
Total		**70.601**	**61.737**

Adapun faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja yakni:

1. Pembangunan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tidak berfokus pada penataan lokasi kawasan kumuh sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Tehadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 630 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 503 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni difokuskan pada lokasi kawasan permukiman kumuh. Sehingga peningkatan rumah layak huni tidak sepenuhnya diikuti dengan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umumnya.
2. Adanya pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebagai kebijakan efisiensi anggaran sehingga Dana Alokasi Khusus untuk tahun anggaran 2025 ditiadakan.

Upaya yang akan dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencapai target pada periode berikutnya adalah dengan memfokuskan program dan kegiatan dalam upaya menurunkan luas kawasan permukiman kumuh yang diikuti dengan peningkatan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni

yang didukung oleh PSU sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melalui Program Kawasan Permukiman dan Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar.

Hal ini perlu langkah evaluasi dan strategi yang harus dilakukan khususnya untuk kelurahan/desa yang masih jauh dari pelayanan pemenuhan PSU di Kabupaten Tapanuli Utara agar dilakukan pemerataan pemenuhan PSU dengan melihat skala prioritas khususnya pada wilayah yang strategis dan memiliki dampak langsung dalam pelaksanaan pembangunan.

Upaya yang akan dilakukan dalam keterbatas DAK yakni menyusun dan mempersiapkan dokumen *Readness Criteria* (RC) ataupun kesiapan pelaksanaan yang diperlukan dalam permohonan bantuan Dana Alokasi Khusus dari dana APBN/kementerian. Sekaitan hal tersebut, maka tahun anggaran 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menganggarkan pembuatan DED IPLT, dokumen FS dan Dokumen Lingkungan IPLT dalam rangka pembuatan IPLT di kabupaten Tapanuli Utara.

Misi 5	**Penerapan kajian budaya dan kearifan lokal mulai dari pendidikan dasar untuk memperkuat karakter terbaik masyarakat sehingga mampu meminimalisir efek negatif arus cepat informasi dan media sosial**

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki beberapa budaya dan kearifan lokal diantaranya Dalihan Natolu, nasionalisme, gotong royong, toleransi antar umat beragama. Seiring kemajuan globalisasi dan modernisasi seringkali budaya dan kearifan lokal terabaikan. Oleh karena itu satuan pendidikan formal dan informal sangat penting utuk memainkan peran aktif dalam mengajarkan budaya dan kearifan lokal kepada siswa dan masyarakat shingga mampu meminimalisir efek negatif arus cepat informasi dan meda sosial.

Misi 5 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dicapai dengan penetapan tujuan meningkatnya pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal dengan indikator kinerja cakupan nilai nilai budaya dan kearifan lokal yang diterapkan, dan tujuan kedua yakni terwujudnya keluarga berkualitas dengan indikator tujuan Indeks Peningkatan Kualitas Keluarga.

Tujuan meningkatnya pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal dengan indikator kinerja cakupan nilai nilai budaya dan kearifan lokal yang diterapkan, diwujudkan melalui pencapaian sasaran meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal

Sasaran 15

Meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal

Sasaran meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal diukur melalui pencapaian indikator kinerja persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan karakter yang berbasis budaya, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Dinas Pendidikan belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.26
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan karakter yang berbasis budaya	Persen	N/A	60,00	N/A	**0,00**

Tujuan kedua misi V yakni terwujudnya keluarga berkualitas dengan indikator tujuan Indeks Peningkatan Kualitas Keluarga diwujudkan melalui 2 sasaran strategis yakni meningkatnya pembangunan keluarga dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat dengan indikator kinerja indeks penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sasaran 16

Meningkatnya Pembangunan Keluarga

Sasaran meningkatnya pembangunan keluarga diukur melalui pencapaian indikator kinerja indeks pembangunan keluarga, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.27
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya pembangunan keluarga

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	N/A	60,42	N/A	**0,00**

Sasaran 17

Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat

Sasaran meningkatnya pembangunan keluarga diukur melalui pencapaian indikator kinerja indeks pembangunan keluarga, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Satuan Polisi Pamong Praja, belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.28
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penyelenggaraan Tratibumlinmas	Indeks	N/A	80,00	N/A	**0,00**

Misi 6	Pengembangan kebudayaan berdasarkan kekayaan budaya dan kearifan lokal

Misi 6 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bermaksud mewujudkan tujuan terjaganya kelestarian budaya dan kearifan lokal serta pengembangan pariwisata yang diukur dengan pencapaian indikator kinerja indeks pembangunan kebudayaan dan rasio PDRB sektor akomodasi dan makan-minum. Upaya pencapaian tujuan ditetapkan sasaran terpeliharanya ekosistem kebudayaan dan sasaran meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan kepariwisataan.

Sasaran 18

Terpeliharanya ekosistem kebudayaan

Sasaran terpeliharanya ekosistem kebudayaan diukur melalui pencapaian indikator kinerja persentase warisan budaya yang dilestarikan, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Dinas Pendidikan belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.29
Pengukuran kinerja sasaran terpeliharanya ekosistem kebudayaan

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	N/A	12,39	N/A	**0,00**

Sasaran 19

Meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan

Sasaran meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan diukur melalui pencapaian indikator kinerja persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan, capaian tahun 2025 sebesar 55,10% kriteria capaian rendah. Pengukuran kinerja sasaran ini sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.30
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	-	10,00	5,51	**55,10**

Target pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2025 sebesar 10 persen belum tercapai, dengan realisasi pertumbuhan sebesar 5,51 persen dibandingkan tahun 2024. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh dampak bencana alam yang terjadi pada tahun sebelumnya, yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan minat kunjungan wisatawan, gangguan aksesibilitas, serta keterbatasan operasional pada sebagian destinasi dan fasilitas pendukung pariwisata. Kondisi ini merupakan faktor eksternal di luar kendali pemerintah daerah. Namun demikian, pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah mitigasi dan pemulihan melalui perbaikan sarana prasarana, penguatan promosi, serta penyelenggaraan event pariwisata pada tahun 2025 sebagai upaya mendorong pemulihan kunjungan wisatawan secara bertahap.

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan kunjungan wisatawan tahun berikutnya difokuskan pada pembenahan destinasi wisata, penguatan promosi digital, penyelenggaraan event unggulan daerah, serta pengembangan produk wisata terintegrasi dengan sektor kuliner dan ekonomi kreatif. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan secara terukur dan bertahap guna meningkatkan kembali kepercayaan wisatawan, mendorong pertumbuhan kunjungan, serta memperkuat kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB daerah.

Misi 7	**Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata kelola Pemerintahan**

Misi 7 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bermaksud mencapai tujuan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang diukur melalui pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi. Terdapat 6 sasaran kinerja yang dilaksanakan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sasaran 20

Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja yakni Nilai SAKIP, Opini BPK atas Laporan Keuangan, Indeks Integritas Nasional, , Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Akses Keuangan Daerah. Capaian sasaran tahun 2025 sebesar 64,52% kriteria capaian rendah, disebabkan 2 indikator kinerja Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Akses Keuangan Daerah tidak tersedia data kinerja.

Realisasi indikator kinerja opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2025 masih menggunakan realisasi kinerja tahun 2024 sedangkan indikator kinerja indeks akses keuangan daerah, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja. Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah sebagaimana table berikut :

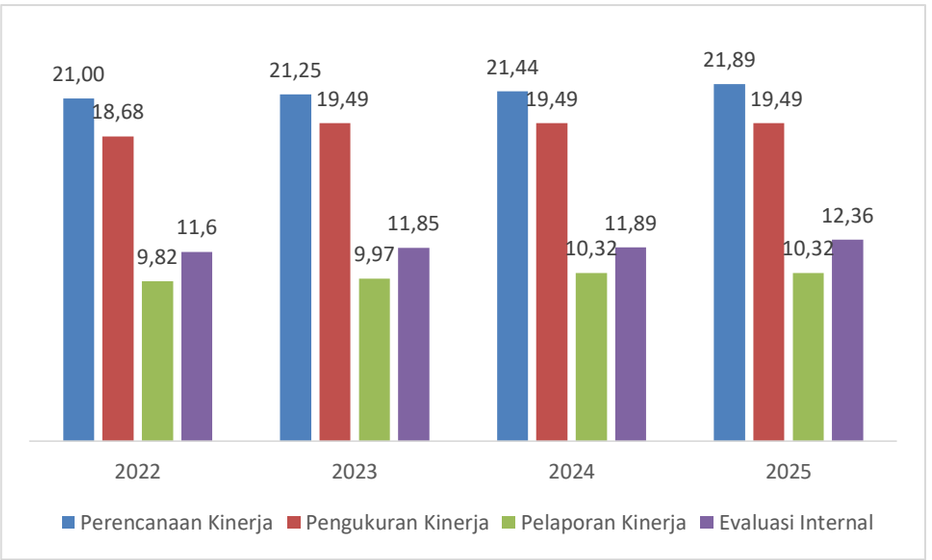
Tabel 2.31
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	Poin	63,14	65,00	64,07	**98,57**
Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP*	**100,00**
Indeks Integritas Nasional	Persen	68,64	71,19	63,05	**88,57**
Indeks Persepsi Korupsi	Nilai	N/A	36,00	N/A	**0,00**
Indeks Reformasi Hukum	Poin	87,18	88,05	97,72	**100,00**
Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	N/A	4,53	N/A	**0,00**

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 sebesar 64,07 poin. Realisasi ini diperoleh sebagaimana Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/250/AA.05/2025 tanggal 27 Desember 2025 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.

Nilai SAKIP adalah nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian PAN dan RB untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented goverment*). Hasil evaluasi tahun 2025 sebesar 64,07 dengan predikat B menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja baik, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namum masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Rekapitulasi komponen penilaian evaluasi AKIP Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana grafik berikut :



Realisasi indikator kinerja dalam pengukuran kinerja tahun 2025 menggunakan realisasi kinerja tahun 2024. Opini BPK terhadap laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa kriteria yaitu:

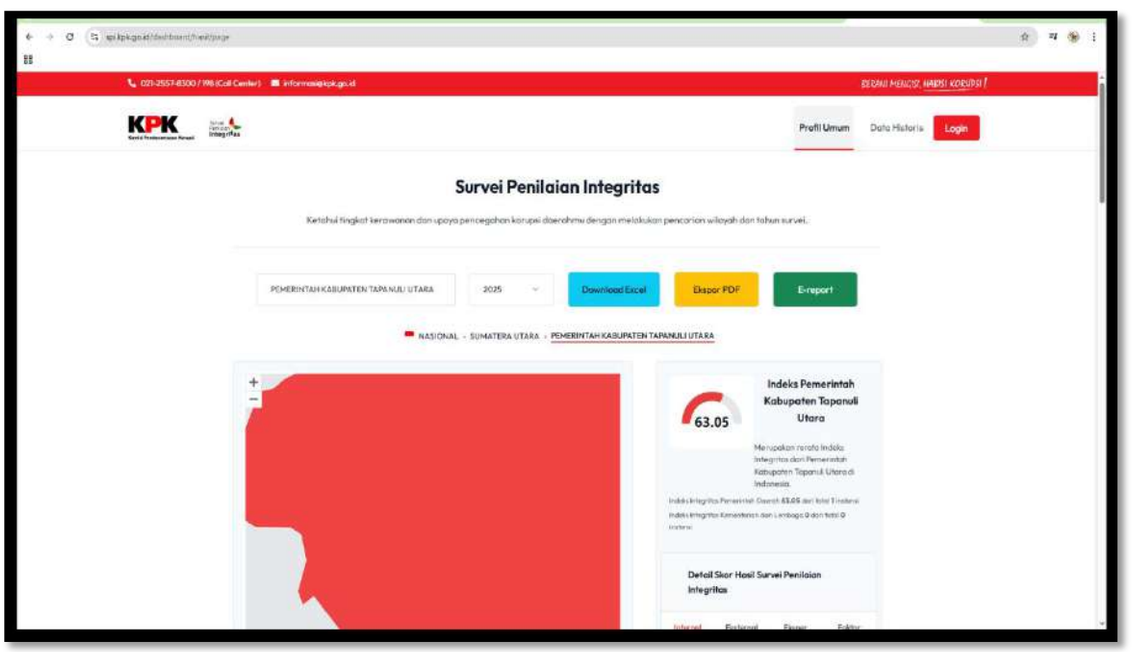
1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini WTP (*Unqualified Opinion*) adalah pendapat yang diberikan atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas pengendalian internal, kecukupan

pengungkapan informasi dan auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan pada laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, ketentuan tersebut menganut basis *accrual*, bahwa seluruh komponen Laporan Keuangan baik Laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disajikan dengan basis akrual.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan WTP ke 10 kali secara berturut sejak tahun 2014. Indeks Integritas Nasional adalah indikator yang memotret integritas sebuah lembaga pemerintah yang diperoleh dari hasil Survei Penilaian Integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengukur tingkat risiko korupsi, kepatuhan terhadap aturan, serta transparansi tata kelola pemerintahan. Hasil dari SPI KPK ini bertujuan sebagai alat deteksi dini bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan meminimalisir praktik korupsi.

Realisasi Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 sebesar 63,05 tergolong kategori rentan korupsi atau zona merah. Realisasi tahun 2025 menurun dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 68,64. Indek Integritas atau Hasil Survei Penilaian Integritas ini dapat diakses oleh publik pada portal https://spi.kpk.go.id.



Tabel berikut menggambarkan hasil Survei Penilaian Integritas Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024-2025 :

Dimensi	2024	2025
Internal	**71,34**	**76,22**
Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	73,28	75,67
Pengelolaan Anggaran	68,71	79,99
Pengelolaan PBJ	62,49	86,43
Pengelolaan SDM	63,89	72,83
Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)	79,07	74,4
Sosialisasi Antikorupsi	70,09	63,15
Transparansi	83,51	82,87
Eksternal	**88,14**	**81,24**
Integritas Pegawai	95,57	90,46
Transparansi dan Keadilan Layanan	82,61	78,7
Upaya Pencegahan Korupsi	85,24	73,56
Eksper	**62,44**	**62,85**
Integritas Instansi	62,44	62,85
Faktor Koreksi		
Pelaksanaan SPI	1,85	4,9
Fakta Korupsi	3,10	5,00

Indeks Persepsi Korupsi adalah indeks internasional/global yang dirilis oleh *Transparency Internasional*, sebuah organisasi nirlaba yang berpusat di Jerman. Penilaiannya melibatkan institusi dunia terkemuka seperti Bank Dunia, Forum Ekonomi Dunia dan lain – lain, berfokus pada tingkat persepsi korupsi di sektor publik dan bertujuan untuk menilai tingkat korupsi antar negara. Skor IPK berkisar antara 1 – 100, semakin tinggi nilainya semakin bersih negara tersebut dari korupsi. Indeks Persepsi Korupsi merupakan indikator skala nasional, tidak tepat digunakan pada level pemerintah daerah sehingga tidak dilakukan pengukuran kinerja. Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Integritas Nasional merupakan 2 indikator yang sama sama berkaitan dengan perilaku korupsi.

Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen pengukuran untuk menilai kualitas reformasi hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pemetaan, penataan regulasi dan tata kelola hukum. Penilaian ini bertujuan meningkatkan kualitas regulasi, menghindari tumpang tindih dan mendorong deregulasi. Realisasi Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 yakni 97,72 poin kategori AA (istimewa) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-4.OT.03.01 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2025.

Indeks Reformasi Hukum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Empat variabel penilaian dalam penilaian yakni

1. Harmonisasi regulasi : tingkat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan aturan baru tidak bertentangan dengan aturan diatasnya;
2. Kompetensi ASN : peningkatan kualitas dan jumlah Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*);
3. Kualitas regulasi : memastikan setiap kebijakan/peraturan yang lahir memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
4. Penataan database : kualitas pengelolaan data hukum dan pemutakhiran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Faktor keberhasilan pencapaian target kinerja disebabkan variabel unsur penilaian IRH secara umum dapat dipenuhi dan bukti dukung penilaian sesuai hasil dengan hasil verifikasi oleh tim penilai dari Kementerian Hukum dan HAM. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Indeks Reformasi Hukum yakni program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, kegiatan fasilitasi dan koordinasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Indeks Akses Keuangan Daerah merupakan alat ukur komperehensif untuk memantau inklusi keuangan di 562 kabupaten/kota, yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Mei 2025 dalam upaya meningkatkan literasi dan akses layanan keuangan formal, mendukung target inklusi nasional serta memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Realisasi indikator kinerja tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Sasaran 21

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur melalui pencapaian indikator persentase capaian indikator kinerja daerah, dengan capaian tahun 2025 sebesar 100,00% kriteria capaian sangat tinggi. Pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.32
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	**100,00**

Sasaran 22

Meningkatnya pendapatan asli daerah

Sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah diukur melalui pencapaian indikator kinerja Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Badan Pendapatan Daerah belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.33
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	N/A	10,95	N/A	**0,00**

Sasaran 23

Meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Indeks Sistem Merit merupakan ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Indeks Sistem Merit terdiri atas aspek, yaitu :

a. Perencanaan Kebutuhan ASN.
b. Pengadaan ASN;
c. Pengembangan Karir ASN;
d. Promosi dan Mutasi;
e. Manajemen Kinerja;
f. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin;
g. Perlindungan dan Pelayanan;
h. Sistem Informasi.

Penilaian Sistem Merit dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. BKN melaksanakan sistem merit yang meliputi:

1. Pengawasan pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN;
2. Pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
3. Menjaga netralitas Pegawai ASN; dan
4. Pengawasan atas pembinaan profesi ASN.

Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas tahun 2025 sebesar 73,50 % kriteria capaian sedang. Realisasi kinerja tahun 2025 masih menggunakan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 2.34
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Sistem Merit	Poin	147,00	200,00	147,00*	**73,50**

Sasaran 24

Meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah

Upaya terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel ditetapkan sasaran meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik. Sasaran meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah diukur melalui pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik. Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 yakni 3,45 kategori B- (B dengan catatan) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025. Secara umum definisi Kategori Baik Dengan Catatan yakni unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; sudah memiliki sarana prasaran yang cukup, memiliki beberapa media sebagai informasi pelayanan publik serta media konsultasi dan pengaduan; dan sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal. Interval nilai, kategori dan makna Indek Pelayanan Publik, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.35
Interval Nilai, Kategori dan Makna Indeks Pelayanan Publik

Interval Nilai	Kategori	Makna
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
3,51 – 4,00	B	Baik
3,01 – 3,50	**B-**	**Baik (Dengan Catatan)**
2,51 – 3,00	C	Cukup
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1,51 – 2,00	D	Prioritas Pembinaan

Interval Nilai	Kategori	Makna
1,01 – 1,50	E	Prioritas Pembinaan
0 – 1,00	F	Prioritas Pembinaan

Capaian kinerja sasaran ini tahun 2025 sebesar 97,18% kriteria capaian sangat tinggi, pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.36
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,47	3,55	3,45	**97,18**

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 sebesar 3,45 poin menurun dibandingkan IPP tahun 2024 yakni 3,47. Penurunan ini disebabkan sampling perangkat daerah PEKPP tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB berbeda dari evaluasi PEKPP tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik kepada perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Utara belum merata dan belum maksimal.

Dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik kepada seluruh Unit Pelayanan Publik dan pelaksanaan asistensi pengisian formulir Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Indeks Pelayanan Publik yakni program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, kegiatan penataan organisasi dan sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dengan pagu anggaran tahun 2025 senilai Rp 26.474.000, menurun 66,55 % dibandingkan pagu anggaran tahun 2024 senilai Rp 79.146.150,-. Sedangkan 3 program yang diplot sebagai program prioritas untuk mendukung pencapaian target kinerja ini yakni program pengelolaan komunikasi dan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada seluruh kecamatan dan program penanganan bencana sebagaimana diplot

pada dokumen perencanaan tidak signifikan mendukung pencapaian target kinerja.

Sasaran 25

Meningkatnya pembangunan teknologi informasi

Dalam rangka perwujudan misi ke VIII, ditetapan sasaran meningkatnya pembangunan tekologi informasi dengan indikator kinerja Indeks Masyarakat Digital.

Indeks Masyarakat Digital atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan instrumen strategis untuk mengukur tingkat perkembangan masyarakat digital. IMDI berfungsi sebagai indikator capaian transformasi digital nasional sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pengukuran IMDI dilakukan secara multidimensi melalui empat pilar utama yakni, infrastruktur dan ekosistem, literasi digital, pemberdayaan teknologi digital serta pekerjaan di bidang digital.

Indeks Masyarakat Digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Komunikasi Digital menandai babak baru dalam standarisasi pengukuran transformasi digital di Indonesia dengan menetapkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) sebagai instrumen yuridis yang wajib digunakan untuk mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan ini mengintegrasikan metodologi global dari *G20 Toolkit* ke dalam kerangka hukum nasional guna memastikan bahwa setiap kebijakan pengembangan kompetensi, literasi, dan pemberdayaan digital memiliki basis data yang akurat, terukur, dan selaras dengan target Visi Indonesia Digital 2045.

Capaian sasaran meningkatnya pembangunan teknologi informasi tahun 2025 sebesar 78,27% kriteria capaian tinggi. Pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.37
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya pembangunan teknologi informasi

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Masyarakat Digital	Poin	41,97	45,00	35,22	**78,27**

Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dapat dilihat secara terbuka melalui laman resmi *imdi.sdmdigital.id.* Portal tersebut menyediakan dashbord interaktif yang menyajikan skor nasional tahun 2025, serta rincian nilai per pilar dan persebarannya di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pencapaian **Indeks Masyarakat Digital (IMDI)** Kabupaten Tapanuli Utara yang berada pada Nilai **35,22** untuk tahun 2025 menunjukkan bahwa daerah ini sedang berada dalam fase transisi menuju transformasi digital. Nilai ini masuk dalam kategori rendah.

Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan dinamika yang kontras antara tahun 2024 dan 2025, terdapat penurunan skor yang cukup signifikan sebesar 6,75 poin. Pada tahun 2024, Tapanuli Utara mencatatkan angka **41,97**, sebuah capaian yang menempatkan daerah ini dalam kategori "Cukup" dan menunjukkan performa yang cukup bersaing di level regional. Namun, pada tahun 2025, indeks tersebut menurun menjadi **35,22**. Adapun penurunan nilai dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

Perbandingan Nilai Indeks Masyarakat Digital IMDI Tahun 2024 dan 2025

Nilai IMDI Tahun 2024



Nilai IMDI Tahun 2025



Komponen Pilar	Skor 2024	Skor 2025	Tren Perubahan
Pilar 1: Infrastruktur & Ekosistem	50,24	48,38	↘ Turun 1,86
Pilar 2: Keterampilan Digital	**59,27**	**30,58**	↘ **Turun Drastis 28,69**
Pilar 3: Pemberdayaan	23,81	27,09	↗ Naik 3,28
Pilar 4: Pekerjaan	35,19	38,43	↗ Naik 3,24

Program dan kegiatan yang mendukung Pencapaian Indeks Masyarakat Digital yakni 4 program yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dengan pagu anggaran Rp 4.284.257.729 untuk tahun 2025 dinilai masih belum mampu menjangkau seluruh parameter penilaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) secara komprehensif. Khususnya Pilar 2 (Keterampilan Digital) yang mengalami penurunan drastis, tidak mendapatkan intervensi program yang cukup kuat, mengingat anggaran yang ada belum diprioritaskan untuk pelatihan teknis berskala besar atau peningkatan kapasitas digital bagi Masyarakat. Adapun solusi untuk meningkatkan nilai indeks masyarakat digital untuk tahun 2026 diantaranya :

1. Perluasan Infrastruktur Digital Terintegrasi: Mengoptimalkan pemanfaatan menara telekomunikasi dan penyediaan titik Wi-Fi gratis di sentra ekonomi serta pendidikan untuk memperbaiki penurunan pada Pilar 1 (Infrastruktur dan Ekosistem).
2. Akselerasi Digitalisasi UMKM dan Pemberdayaan: Mengintegrasikan Pilar 3 (Pemberdayaan) dengan mendorong pelaku usaha lokal masuk ke dalam ekosistem e-commerce dan memberikan pendampingan intensif terkait literasi keuangan digital.
3. Mengalokasikan anggaran untuk pelatihan teknis berkelanjutan, seperti kursus digital marketing, pengelolaan data, dan dasar pemograman bagi pemuda dan pelaku usaha agar skor keterampilan digital kembali ke level di atas 50,00.

Misi 8	**Menjadikan desa mandiri yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia**

Misi ke VIII Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selaras dengan tujuan utama pembangunan desa yakni tercapainya desa mandiri, yakni desa yang kuat secara sosial, ekonomi dan lingkungan yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Tujuan yang ingin dicapai yakni meningkatnya kemandirian desa dengan memanfaatkan potensi lokal dengan indikator kinerja persentase desa mandiri. Sesuai Surat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2025, bahwa tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara telah memiliki 3 Desa Mandiri yakni Desa

Parbubu I dan Desa Hutatoruan IV Kecamatan Tarutung, serta Desa Aek Nauli II Kecamatan Sipahutar.

Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa, Indeks Desa merupakan indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mengidenfitikasi status perkembangan desa. Penginputan indeks desa dilaksanakan untuk menganalisis perkembangan desa yang didasari oleh 6 dimensi, 13 sub dimensi dan 48 indikator. Enam dimensi dimaksud adalah:

1. Dimensi Layanan Dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan dan air minum.
2. Dimensi Sosial yang terdiri dari aktivitas budaya dan fasilitas masyarakat.
3. Dimensi Ekonomi yang terdiri dari produksi desa dan fasilitas pendukung ekonomi.
4. Dimensi Lingkungan yang terdiri dari pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana.
5. Dimensi Aksesibilitas yang terdiri dari kondisi akses jalan dan kemudahan akses.
6. Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa yang terdiri dari kelembagaan dan pelayanan desa serta tata kelola keuangan desa.

Hasil dari penilaian 6 dimensi diatas akan menghasilkan status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana ditetapkan dengan besaran nilai hasil perhitungan Indeks Desa sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal mulai dari 0,00% (nol koma nol nol persen) sampai dengan 49,48% (empat puluh Sembilan koma empat puluh delapan persen);
2. Desa Tertinggal mulai dari 49,49% (empat puluh Sembilan koma empat puluh sembilan persen) sampai dengan 57,38% (lima puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen);
3. Desa Berkembang mulai dari 57,39% (lima puluh tujuh koma tiga puluh sembilan persen) sampai dengan 69,34% (enam puluh sembilan koma tiga puluh empat persen);
4. Desa Maju mulai dari 69,35% (enam puluh sembilan koma tiga puluh lima persen) sampai dengan 79,62% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh dua persen; dan

5. Desa Mandiri mulai dari mulai dari 79,63% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh tiga persen) sampai dengan 100% (seratus persen).

Pasal 13 ayat 1 Pada Permendes Nomor 9 Tahun 2024 disebutkan pelaksanaaan Pengimputan dilakukan oleh Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Kementrian. Penginputan ini dilakukan melalui Sosialisasi, Pelaksanaan Teknis, Musyawarah, Verifikasi dan Validasi. Hasil pengisian/penginputan Indeks Desa di Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tabel berikut :

Status Desa	Tahun		
	2023	2024	2025
Mandiri	0	0	3
Maju	9	27	86
Berkembang	171	179	138
Tertinggal	58	33	12
Sangat Tertinggal	3	2	2
Total Desa	**241**	**241**	**241**

Sasaran 26

Meningkatnya jumlah desa mandiri

Upaya meningkatnya kemandirian desa dengan memanfaatkan potensi lokal dengan indikator persentase desa mandiri ditetapkan sasaran meningkatnya jumlah desa mandiri dengan indikator kinerja Indeks Desa. Indeks Desa merupakan indikator tunggal yang mulai diterapkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia tahun 2025, untuk mengukur capaian pembangunan dan tingkat kemandirian desa di seluruh Indonesia. Indeks desa menggantikan Indeks Desa Membangun guna menyederhanakan dan menyatukan pengukuran pembangunan desa secara nasional. Capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah desa mandiri tahun 2025 sebesar 100,00% kriteria capaian sangat tinggi, realisasi kinerja melampaui target kinerja tahun 2025, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.38
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya jumlah desa mandiri

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Desa	Persen	N/A	64,00	67,50	**100,00**

Penghitungan Indeks Desa diperoleh dari rata rata dari indeks desa tahun 2025 pada 241 Desa di Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai Surat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, diperoleh Indeks Desa Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 67,50 %. Faktor keberhasilan pencapaian target kinerja yakni adanya pendampingan untuk pengisian data indeks desa dari tingkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan maupun TAPM di Kabupaten dan Kecamatan guna menfasilitasi pemahaman operator/pengentri sehingga pemerintah desa memahami tujuan pendataan.

Misi 9	**Meningkatkan pelestarian lingkungan serta peningkatan upaya penanggulangan mitigasi dan bencana**

Misi 9 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupaya mewujudkan tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana yang diukur melalui pencapaian indikator potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan indikator kinerja Indeks Risiko Bencana.

Sasaran 27

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur melalui pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan energi baru terbarukan. Capaian sasaran ini tahun 2025 sebesar 100,00% dan kriteria capaian sangat tinggi. Pegukuran kinerja sebagaimana tabel berikut:

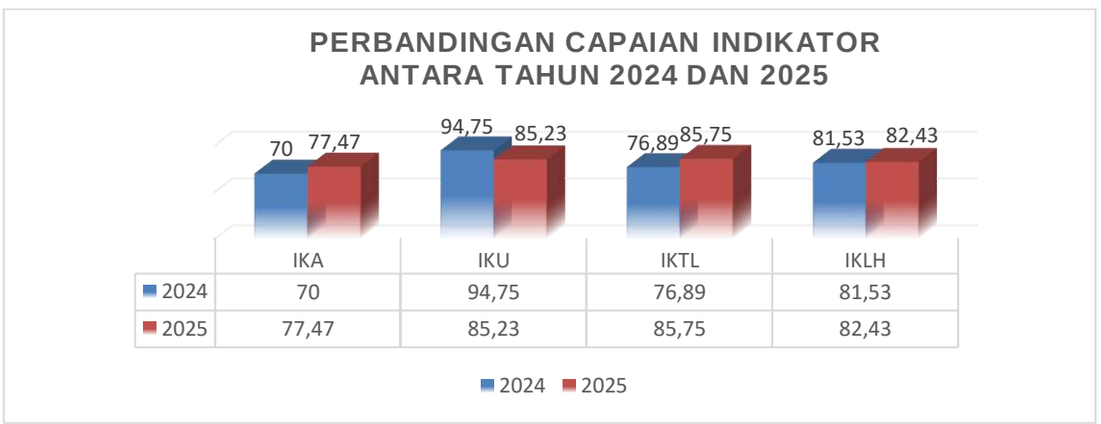
Tabel 2.39
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	81,53	79,51	82,43	**100,00**
Energi Baru Terbarukan (EBT)	Nilai/Mw	N/A	42,20	42,50	**100,00**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi lingkungan hidup di Lokasi tertentu pada waktu tertentu. Untuk perhitungan IKLHD Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan dengan menjumlahkan semua komponen indeks (IKA, IKU dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI No. 14 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

IKLH Kabupaten Tapanuli Utara = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)
=(0,376 x 77,47)+(0,405 x 85,23)+(0,219 x 85,75)
= 29,12872 + 34,51815 + 18,77925
= 82,42612
= 82,43

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Hidup Daerah (IKLHD) tahun 2025 menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dengan kondisi 'Sedang', dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 81,53. Grafik dibawah ini dapat menggambarkan perbandingan capaian indikator antara tahun 2024 dan 2025.



Energi baru terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam, sehingga bisa diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup besar. Terdapat sejumlah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi air yang telah beroperasional di Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan total produksi EBT sebesar 51,5 MW. Adapun daftar PLTA/PLTM yang saat ini beroperasional di Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain:

1. PLTA PT. Sumatera Pembangkit Mandiri 2x9 MW;
2. PLTM PT. Partogi Hidro Energi Kapasitas 2x5 MW;
3. PLTM PT. Seluma Clean Energy Kapasitas 2x5 MW;

4. PLTM PT. Bina Godang Energi Kapasitas 2x4,5 MW;
5. PLTM PT. Gading energiprima Kapasitas 2 x 1,5 MW;
6. PLTM Aek Raisan 1 Kapasitas 750 KwH; dan
7. PLTM Aek Raisan 2 Kapasitas 750 KwH.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara selaku Instansi Pengawas, telah melakukan kegiatan Pengawasan terhadap PLTA dan PLTM beroperasi. Kegiatan pengawasan yang dilakukan baik secara administratif (melalui Laporan Semester Pelaksanakan UKL-UPL) maupun dengan peninjauan lapangan untuk memastikan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sasaran 28

Meningkatnya kapasitas daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana

Sasaran meningkatnya kapasitas daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana diukur malalui pencapaian Indeks Ketahanan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100,00 % kriteria capaian sangat tinggi. Pengukuran kinerja sebagaimana table berikut :

Tabel 2.40
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kapasitas daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Daerah	Poin	N/A	0,36	0,43	**100,00**

Realisasi indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,43 poin, diperoleh dari rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Indeks Ketahanan Daerah digunakan untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah, yang dihitung berdasarkan 7 indikator ketahanan utama yang mencakup seluruh aspek penanggulangan bencana yakni :

1. Kebijakan dan kelembagaan, eksistensi regulasi daerah dan struktur organisasi penanganan bencana
2. Kajian dan perencanaan, ketersediaan dokumen Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana
3. Sistem Informasi, pengelolaan data dan penyebaran informasi terkait ancaman bencana kepada public
4. Tematik Kawasan Rawan Bencana, penanganan spesifik pada area-area dengan tingkat kerawanan tinggi
5. Efektivitas pencegahan dan mitigasi, implementasi tindakan nyata untuk mengurangi dampak fisik bencana
6. Kesiapsiagaan dan penanganan darurat, kesiapan personil, logistic dan prosedur saat bencana, dan
7. Sistem pemulihan bencana, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah menggunakan 71 indikator teknis dengan jumlah 284 pertanyaan kuesioner sebagaimana terdapat pada instrumen yang disediakan oleh BNPB. Nilai IKD berkisar antara 0 hingga 1, dengan ketentuan semakin tinggi nilai IKD semakin kuat kapasitas daerah dalam melakukan penanggulangan bencana. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) sasaran yang telah dicapai, diperoleh 10 sasaran strategis sudah efisien dalam mencapai target kinerja dan 18 sasaran strategis tidak efisien. Analisis efisiensi hanya dilakukan terhadap sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target kinerja atau capaian sebesar 100,00%.

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2025				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
						Program	Anggaran	Realisasi	%		
Misi I Memajukan ekonomi rakyat yang inklusif dan berdaya saing untuk meningkatkan pendapatan masyarakat											
1	**Meningkatnya pendapatan masyarakat**		**PDRB Per Kapita**								
	1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	100,00	100,00	Pengembangan iklim penanaman modal	25.639.105,00	23.297.600,00	90,87	90,37	Efisien
						Pelayanan penanaman modal	89.431.750,00	80.378.690,00	89,88		
	2	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	0,00	0,00	Pemberdayaan usaha menengah, kecil dan mikro	60.372.400,00	59.130.200,00	97,94	97,69	Tidak Efisien
						Pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi	46.956.000,00	45.749.583,00	97,43		
	3	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	100,00	100,00	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	281.834.980,00	260.128.056,00	92,30	92,30	Efisien
	4	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita	100,00	100,00	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	340.569.875,00	339.476.401,00	99,68	99,68	Efisien
	5	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	96,54	96,54	Perencanaan dan pembangunan industri	697.214.900,00	619.708.614,00	88,88	88,88	Tidak Efisien
Misi II Memajukan ekonomi melalui pertanian yang maju dan berteknologi yang mampu memberikan produktivitas yang tinggi											
1	**Meningkatnya produktivitas pertanian**		**PDRB ADHB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan**								

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2025				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
						Program	Anggaran	Realisasi	%		
	1	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor pertanian	PDRB sub sektor pertanian	100,00	100,00	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	5.932.357.500,02	5.920.758.563,21	99,80	98,85	Efisien
						Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.102.108.204,96	3.037.096.326,00	97,90		
	2	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan	PDRB sub sektor perikanan	100,00	100,00	Pengelolaan perikanan budidaya	1.450.006.614,00	1.212.810.130,00	83,64	83,64	Efisien
	3	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	94,74	94,74	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan masyarakat	2.745.000.000,00	2.378.600.117,00	86,65	63,01	Tidak Efisien
						Penanganan kerawanan pangan	125.000.000,00	23.612.000,00	18,89		
						Penyuluhan pertanian	3.640.099.170,00	3.038.683.432,89	83,48		
Misi III Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualtias dan merata, pecegahan stunting serta peningkatan peran generasi muda dan perempuan dalam pembangunan											
1	**Meningkatnya kualitas pembangunan manusia**		**Indeks Pembangunan Manusia**								
	1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	100,00	100,00	Pengelolaan pendidikan	53.910.558.602,00	52.819.917.529,00	97,98	62,67	Efisien
			Harapan lama sekolah	100,00		Pendidik dan tenaga pendidikan	24.631.000,00	0,00	0,00		
						Pembinaan perpustakaan	124.520.325,00	112.103.500,00	90,03		
	2	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan kesehatan	Umur Harapan Hidup	100,00	98,24	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	72.928.942.000,00	83.386.832.477,00	114,34	82,97	Tidak Efisien

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2025				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
						Program	Anggaran	Realisasi	%		
		masyarakat	Prevalensi Stunting	96,48		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1.259.114.000,00	552.279.483,00	43,86		
						Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	151.000.000,00	136.968.075,00	90,71		
	3	Meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan	Cakupan pembinaan pemuda	0,00	0,00	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	169.616.250,00	93.176.621,00	54,93	54,93	Tidak Efisien
	4	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	0,00	0,00	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	173.365.350,00	173.148.689,00	99,88	99,88	Tidak Efisien
Misi IV Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan dan tanggap resiko bencana											
1	**Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang berkelanjutan**		**Indeks Infrastruktur**								
	1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	0,00	0,00	Penyelenggaraan jalan	13.346.041.668,22	13.186.151.380,00	98,80	92,28	Tidak Efisien
						Pengelolaan sumber daya air	2.093.107.425,00	2.063.467.508,00	98,58		
						Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	584.924.140,00	464.816.741,00	79,47		
	2	Meningkatnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	99,76	99,76	Pengolahan dan pengembangan SPAM	1.502.490.160,00	1.197.383.324,00	79,69	95,30	Tidak Efisien
						Pengolahan dan pengembangan SPAL	710.775.000,00	708.985.069,19	99,75		
						Pengembangan perumahan	381.628.500,00	377.372.382,00	98,88		
						Kawasan permukiman	356.669.000,00	353.876.351,00	99,22		

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2025				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
						Program	Anggaran	Realisasi	%		
						Kawasan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	589.313.891,00	583.033.349,00	98,93		
Misi V Penerapan kajian budaya dan kearifan lokal mulai dari pendidikan dasar untuk memperkuat karakter terbaik masyarakat sehingga mampu meminimalisir efek negatif arus cepat informasi dan media sosial											
1	**Meningkatnya pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal**		**Cakupan nilai nilai budaya dan kearifan lokal yang diterapkan**								
	1	Meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan karakter yang berbasis budaya	0,00	0,00	Pengembangan kurikulum	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Efisien
						Pengembangan bahasa dan sastra	0,00	0,00	0,00		
2	**Terwujudnya keluarga berkualitas**		**Indeks Peningkatan Kualitas Keluarga**								
	1	Meningkatnya pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	0,00	0,00	Pengendalian penduduk	250.000.000,00	249.330.500,00	99,73	97,01	Tidak Efisien
						Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	1.410.884.350,00	1.301.651.551,00	92,26		
						Pembinaan keluarga berencana	6.651.362.650,00	6.588.432.750,00	99,05		
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	0,00	0,00	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1.835.109.400,00	1.749.660.373,00	95,34	95,34	Tidak Efisien
Misi VI Pengembangan kebudayaan berdasarkan kekayaan budaya dan kearifan lokal											
1	**Terjaganya kelestarian budaya dan kearifan lokal**		**Indeks Pembangunan Kebudayaan**								

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2025				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
						Program	Anggaran	Realisasi	%		
	serta pengembangan pariwisata		**Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan-Minum**								
	1	Terpeliharanya ekosistem kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	0,00	0,00	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Efisien
	2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang holistik	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	55,10	55,10	Peningkatan daya tarik destinasi wisata	55.000.000,00	53.555.812,00	97,37	86,89	Tidak Efisien
						Pemasaran pariwisata	664.608.206,00	507.767.982,00	76,40		
Misi VII Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata kelola Pemerintahan											
1	**Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel**		**Indeks Reformasi Birokrasi**								
	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	98,57	64,52	Penunjang urusan pemerintah daerah	96.398.695,00	95.185.780,00	98,74	97,91	Tidak Efisien
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	100,00		Pengelolaan keuangan daerah	3.139.965.456,00	3.012.667.560,00	95,95		
						Pengelolaan barang milik daerah	1.192.615.950,00	719.106.815,00	60,30		
			Indeks Integritas Nasional	88,57		Penyelenggaraan pengawasan	1.597.090.000,00	1.581.672.500,00	99,03		
			Indeks Persepsi Korupsi	0,00							
			Indeks Reformasi Hukum	97,72		Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	977.789.425,00	841.497.044,00	86,06		

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2025				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
						Program	Anggaran	Realisasi	%		
			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	0,00		Perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	268.857.000,00	192.028.631,00	71,42		
	2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah	100,00	100,00	Koordinasi perencanaaan dan pembangunan daerah	263.076.375,00	240.861.845,00	91,56	88,21	Efisien
						Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.274.302.350,00	998.268.727,00	78,34		
						Penelitian dan pengembangan daerah	24.150.300,00	22.882.200,00	94,75		
	3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	0,00	0,00	Pengelolaan pendapatan daerah	1.205.925.850,00	1.060.694.762,00	87,96	87,96	Tidak Efisien
	4	Meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	73,50	73,50	Kepegawaian daerah	945.534.975,00	706.680.969,00	74,74	87,02	Tidak Efisien
						Pengembangan sumber daya manusia	92.418.000,00	91.777.450,00	99,31		
	5	Meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Publik	97,18	97,18	Perlindungan dan jaminan sosial	10.810.000,00	4.790.000,00	44,31	83,43	Tidak Efisien
						Rehabilitasi sosial	147.183.400,00	139.966.608,00	95,10		
						Pendaftaran penduduk	357.650.150,00	356.214.096,00	99,60		
						Pencatatan sipil	26.796.250,00	25.632.237,00	95,66		
						Pengelolaan arsip	54.807.575,00	45.204.200,00	82,48		
	6	Meningkatnya pembangunan teknologi informasi	Indeks Masyarakat Digital	78,27	78,27	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	958.461.000,00	737.363.620,00	76,93	89,18	Tidak Efisien
						Pengelolaan aplikasi informatika	110.042.875,00	107.499.644,00	97,69		

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2025				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
						Program	Anggaran	Realisasi	%		
						Penyelenggaraan statistik sektoral	22.189.125,00	20.620.990,00	92,93		
Misi VIII Menjadikan desa mandiri yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia											
1	**Meningkatnya kemandirian desa dengan memanfaatkan potensi lokal**		**Persentase desa mandiri**								
	1	Meningkatnya jumlah desa mandiri	Indeks Desa	100,00	100,00	Penataan desa	0,00	0,00	0,00	58,40	Efisien
						Peningkatan kerjasama desa	2.440.250,00	1.995.503,00	81,77		
						Administrasi pemerintahan desa	135.655.696,00	126.741.786,00	93,43		
Misi IX Meningkatkan pelestarian lingkungan serta peningkatan upaya penanggulangan mitigasi dan bencana											
1	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana**		**Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)**								
			Indeks Risiko Bencana								
	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	100,00	100,00	Pengelolaan persampahan	746.859.125,00	705.326.498,00	94,44	92,73	Efisien
			Energi Baru Terbarukan (EBT)	100,00		Pengendalian, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	56.180.750,00	51.137.774,00	91,02		
	2	Meningkatnya kapasitas daerah untuk melakukan tindakan pengurangan	Indeks Ketahanan Daerah	100,00	100,00	Penanggulangan bencana	390.197.916,82	280.076.497,00	71,78	71,78	Efisien

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian sasaran	Anggaran Tahun 2025				Rata-rata capaian anggaran	Efisiensi
						Program	Anggaran	Realisasi	%		
		tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana									
		Rata-rata capaian kinerja sasaran			**62,78**	**Rata-rata capaian kinerja anggaran**				**79,94**	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD)

Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan

Tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kabupaten/Kota, dimana pelaksanaannya dapat tercermin dari adanya konstribusi Pusat atau Provinsi dalam hal pembiayaan pembangunan, maka besarnya konstribusi tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Utara dengan uraian sebagai berikut :

3.1.1 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat

1. Dinas Ketahanan Pangan

Tugas pembatuan yang diterima dari Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Gerakan Pangan Murah merupakan program Pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan pokok Masyarakat dengan menyediakan komoditas penting dengan harga terjangkau. Komoditas pangan yang diperdagangkan berupa beras, minyak goreng, gula, bawang merah dan telur. Pelakasanaan Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan dalam rangka merayakan hari jadi Kabupaten ke-80 dan semarak Dirgantara. Gerakan Pangan Murah dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober 2025. Berikut mitra produsen dan pemasok pangan Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Tapanuli Utara :

No.	Mitra	Pangan yang dijual	Volume
1	Perum BULOG	Beras SPHP	3.000 kg
2	Perum BULOG	Minyak kita	3.000 liter
3	Perum BULOG	Gula	1.000 kg
4	Roganda Jaya Farm	Telur	600 kg
5	Bawang Merah	Mutiara	-

a. Bidang urusan yang ditugas pembantuan

Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan.

b. Jumlah Kegiatan

1 (satu) kegiatan dengan anggaran Tugas Pembantuan : Rp.20.000.000.-

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan :

No	Pemerintah Pusat/ provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Kegiatan	Capaian (%)
1.	Badan Pangan Nasional	-	**Program** : Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat **Kegiatan:** Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan **Sub Kegiatan:** Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota **Output:** Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota **Rincian Kegiatan:** Gerakan Pangan Murah	Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Ketahanan Pangan	20.000.000	20.000.000	100	100	100
	Jumlah.....					**20.000.000**	**20.000.000**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2025

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Utara

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara antara lain :

1) Melaksanakan sosialisasi tentang Dana Desa;
2) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa bersama Tim Fasilitasi Kecamatan;
3) Membantu Pemerintah Desa dalam penyusunan administrasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa apabila ada kendala/kesulitan;
4) Memfasiltasi penyelesaian permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
5) Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan oleh Desa dalam mengelola Dana Desa dan melaporkan hasil pelaksanaan Dana Desa Kepada Bupati Tapanuli Utara.

a. Dasar Hukum

1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang alokasi dan penyaluran Dana Desa 2025 (dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025).

b. Capaian Kinerja

Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi keuangan desa tercapai sesuai dengan target serta penerimaan aduan Masyarakat difasilitasi dengan baik.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan :

No	Pemerintah Pusat/ Provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, kegiatan, outpout dan rincian kegiatan	Lokasi	PD Pelaksanaan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Kegiatan	Capaian (%)
1	Pusat	1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa; 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa; 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang alokasi dan penyaluran Dana Desa 2025 (dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025)	Dana Desa	Kabupaten Tapanuli Utara	DPMD	193.023.433.000	164.250.884.434	85,09	241 Desa	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2025

3.1.2 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawah

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara antara lain :

1) Merumuskan besarnya ADD yang diterima oleh setiap Desa, menyusun dan membuat Pedoman Umum pelaksanaan ADD Kabupaten;
2) Melaksanaan sosialisasi tentang ADD;
3) Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk, memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana ADD di Tingkat Desa;
4) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
5) Membantu Pemerintahan Desa dalam penyusunan administrasi pelaksanaan penggunaan dana ADD apabila ada kendala/kesulitan;
6) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
7) Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan oleh Desa dalam mengelola ADD dan melaporkan hasil pelaksanaan ADD kepada Bupati.

a. Dasar Hukum

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2025.

b. Capaian Kinerja

Besar ADD Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2025 sebesar Rp. 74.671.554.100 dan seluruh ADD tersebut tesalurkan seluruhnya dengan tepat waktu.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan :

No	Pemerintah Pusat/ Provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, kegiatan, outpout dan rincian kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Kegiatan	Capaian (%)
1	Kabupaten	Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2025	Alokasi Dana Desa	Kabupaten Tapanuli Utara	DPMD	74.671.554.100	74.671.554.100	100	241 Desa	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2025

3.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

3.2.1 Dinas Ketahanan Pangan

1) Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

- Biaya transportasi bahan pangan yang tinggi
- Sarana penyimpanan produk pangan terbatas
- Dana pelaksanaan GPM terbatas
- Tidak ada subsidi pangan yang mampu menekan harga pangan secara signifikan

2) Upaya Penyelesaian

- Pemanfaatan subsidi transportasi dan pemilihan lokasi GPM yang strategis
- Pengembangan gudang dan *cold storage*
- Penambahan anggaran stabilisasi harga dan insentif bagi pedagang dan UMKM yang terlibat
- Pendampingan dan fasilitasi pengusaha pangan lokal

3.2.2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan yaitu penyampaian laporan/dokumen dari desa tidak tepat waktu, sehingga mengganggu pelaksanaan tugas pembantuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara dari Pemerintah Pusat.

2) Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan supaya Desa dapat tepat waktu dalam menyampaikan laporan/dokumen yang diperlukan.

4.2.3 Urusan Alokasi Dana Desa

Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

a. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

- Permasalahan yaitu Kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi kegiatan.
- Terlambat penyampaian dan penetapan regulasi pelksanaan kegiatan.

b. Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berkoordinasi dengan Tim Pendamping Desa tingkat Kecamatan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada perangkat dan Pemerintah Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD)

Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan penerima pelayanan adalah peserta didik yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
2. Pendidikan Dasar dengan penerima pelayanan adalah peserta didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
3. Pendidikan Kesetaraan dengan penerima pelayanan adalah peserta didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun ke atas.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Layanan Dasar	Target (Orang)
1	Pendidikan Anak Usia Dasar (PAUD)	10.877
2	Pendidikan Dasar	62.386
3	Pendidikan Kesetaraan	30

4.1.3 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Layanan Dasar	Target (Orang)	Capaian	Persentase
1	Pendidikan Anak Usia Dasar (PAUD)	10.877	7.069	64,99
2	Pendidikan Dasar	62.386	59.637	95,59
3	Pendidikan Kesetaraan	30	30	100

4.1.4 Alokasi Anggaran

No	Jenis Layanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Pendidikan Anak Usia Dasar (PAUD)	6.302.710.000
2	Pendidikan Dasar	66.763.840.474
3	Pendidikan Kesetaraan	814.680.000

4.1.5 Dukungan Personil

Data personil Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 41 orang dengan uraian :

Eselon II : 1 orang

Eselon III : 5 orang

Jabatan fungsional : 7 orang

Jabatan pelaksana : 28 orang

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih banyak ada lembaga PAUD Yang belum terakreditasi Minimal B	Sudah melalukan Sosialisasi dan pemdampingan Akreditasi ke pemilik satuan Lembaga PAUD
2	Masih banyak Lembaga Satuan PAUD yang belum terdaftar di DAPODIK dan belum memiliki izin Operasional	Sudah melalukan Sosialisasi dan pemdampingan ke pemilik satuan Lembaga PAUD supaya di entri ke Dapodik dan mengurus Izin Operasional

4.1.7 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
1	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				
1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	1.677.550.000	659.600.000	98,93%
2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kegiatan	60.000.000	58.774.701	97,96%
3	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	4.505.160.000	3.389.111.779	75,23%
4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kegiatan	60.000.000	58.752.300	97,92%
2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				
1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SD)	Paket	578.400.000	560.966.936	96,99%
2	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	150.000.000	149.489.250	99,66%
3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	144.779.400	144.744.455	99,98%
4	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	57.326.000	53.896.000	94,02%
5	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	72.868.950	53.190.925	73,03%
6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	97.155.350	80.970.685	88,34%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
7	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	48.639.800	37.233.404	76,55%
8	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	200.000.000	0	0%
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	300.000.000	0	0%
10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SD)	Sekolah	38.243.896.374	37.926.414.898	99,17%
11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	150.000.000	144.968.594	96,65%
12	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (SD)	Paket	150.000.000	144.097.653	96,07%
13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kegiatan	63.298.600	60.487.973	95,56%
3	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	237.000.000	222.000.000	93,67%
2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	600.000.000	484.284.778	80,71%
3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	130.000.000	121.964.031	93,82%
4	Pengadaan mebel Sekolah (SMP)	Satuan Pendidikan	79.999.750	75.593.382	94,49%
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana	Paket	100.000.000	0	0%
6	Pengadaan mebel Sekolah (SMP)	Paket	200.000.000	194.815.652	97,41%
7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP)	Kegiatan	69.999.950	65.873.413	94,10%
8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SMP)	Sekolah	25.370.476.300	25.200.925.470	99,33%
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	170.000.000	168.292.179	99%
4	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				
1	Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	Lembaga	814.680.000	764.245.500	93,81%

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Layanan Dasar	Target (Orang)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.850
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.850
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.866
4	Pelayanan Kesehatan Balita	18.629
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	62.386
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	201.655
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	44.594
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	74.384
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.195
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	464
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.298
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	6.765

4.2.3 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Layanan Dasar	Target (Orang)	Capaian	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.850	3.620	94,03
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.850	3.320	86,23

No	Jenis Layanan Dasar	Target (Orang)	Capaian	Persentase
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.866	3.349	86,63
4	Pelayanan Kesehatan Balita	18.629	17.027	91,40
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	62.386	61.752	98,98
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	201.655	89.229	44,25
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	44.594	43.950	98,56
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	74.384	40.635	54,63
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.195	2.195	100
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	464	464	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	6.298	6.298	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	6.765	6.682	98,77

4.2.4 Alokasi Anggaran

No	Jenis Layanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.044.101.600
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	132.408.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	499.084.644
4	Pelayanan Kesehatan Balita	5.809.133.600
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	304.780.000
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.767.921.139
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	554.232.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	388.122.800
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	868.265.400
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	748.740.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberculosis	1.606.835.900
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	118.290.000

4.2.5 Dukungan Personil

No	Jenis Layanan Dasar	Jumlah SDM Tersedia
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter/Dokter Sp. Obstetri dan Ginekologi (23), Bidan (294), Perawat (273), Tenaga Farmasi (21), Tenaga Gizi (21)
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter/Dokter Sp. Obstetri dan Ginekologi (23), Bidan (294), Perawat (273), Tenaga Farmasi (21), Tenaga Gizi (21)
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dokter/dokter Sp. Anak (23), Bidan (294), Perawat (273), Tenaga Kefarmasian (21), Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (21), Tenaga Gizi (21), Kader Kesehatan (2206)
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Dokter (21), Bidan (294), Perawat (273), Tenaga Gizi (21), Guru PAUD (639), Kader Kesehatan (2206)
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dokter/Dokter gigi (21), Bidan (294), Perawat (273), Tenaga Gizi (21), Tenaga Kefarmasian (21), Tenaga Kesehatan Masyarakat (21), Guru (467), Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/ peer conselor (2151)
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dokter (21), Bidan (294), Perawat (273), Tenaga Gizi (21), Tenaga Kesmas (21), Kader Kesehatan (1260)
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dokter (21), Bidan (294), Perawat (273), Tenaga Gizi (21), Tenaga Kesmas (21), Kader Kesehatan (2206)
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dokter (21), Bidan (546), Perawat (273), Tenaga Gizi (21), Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku (21), Tenaga Kefarmasian (21), Tenaga Kesehatan Masyarakat (21)
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dokter (21), Bidan (546), Perawat (273), Tenaga Kefarmasian (21), Tenaga Kesehatan Masyarakat (21), Tenaga Gizi (21), Analis Teknik Laboratorium Medik (21)
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dokter (2), Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (29), Tenaga Profesional Lainnya (2), Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa (21)
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru (24), Perawat (23), Tenaga Kefarmasian (23), Tenaga Kesehatan Masyarakat (21), Analis Teknik Laboratorium Medik (23), Radiografer (2), Kader Kesehatan (21)

No	Jenis Layanan Dasar	Jumlah SDM Tersedia
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin (23), Bidan (21), Perawat (23), Analis Teknik Laboratorium Medik (23), Tenaga Kesehatan Masyarakat (21), Kader Kesehatan (21)

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kurangnya kesadaran ibu hamil dan keluarga terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin, sehingga kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan belum optimal, terutama untuk pemeriksaan kehamilan (K1 dan K4)	Harus adanya penguatan dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat khususnya Ibu hamil dan keluarga tentang penting nya pemeriksaan kehamilan teratur di fasilitas kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Capaian penerima layanan dasar kesehatan ibu bersalin masih rendah dikarenakan jumlah ibu bersalin yang belum banyak pada priode tersebut sebahagian besar ibu hamil masih dalam masakehamilan trimester I - III sehingga belum masuk priode persalinan	Melanjutkan pemantauan ibu hamil aktif sehingga akhir tahun untuk memastikan semua ibu hamil mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Capaian penerima layanan dasar bayi baru lahir rendah karenakan persalinan yang belum berlangsung	Melanjutkan pemantauan pada ibu hamil yang akan bersalin dan melahirkan bayi yang sehat
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Masih ada balita yang tidak dibawa ke posyandu untuk dilakukan penimbangan dan pengukuran dan ada balita yang sudah lulus umur diatas 5 tahun sehingga tidak bisa dilakukan pengentrian	Melakukan home visit pada balita yang tidak datang ke posyandu untuk melakukan penimbangan dan pengukuran
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Masih kurangnya pengetahuan Petugas pengelola UKS di puskesmas dalam mengentri laporan manual ke aplikasi ASIK, Jumlah stik untuk pemeriksaan Hb rematri masih terbatas.	Membuat pertemuan dengan petugas puskesmas tentang Pelaporan dengan aplikasi ASIK dan pengusulan penambahan jumlah stik Hb ke bagian pengadaan

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Petugas pengelola program PTM Dinas Kesehatan yang sangat terbatas membuat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ke lapangan sangat terbatas, Belum semua Posbindu memiliki alat Posbindu KIT, jumlah Stik pemeriksaan Kolesterol dan Asam Urat terbatas mengakibatkan kurangnya minat sasaran usia produktif datang ke Posbindu, Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) sering maintanance sehingga pencatatan pelaporan terhambat.Petugas pengelola program PTM Dinas Kesehatan yang sangat terbatas membuat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ke lapangan sangat terbatas, Belum semua Posbindu memiliki alat Posbindu KIT, jumlah Stik pemeriksaan Kolesterol dan Asam Urat terbatas mengakibatkan kurangnya minat sasaran usia produktif datang ke Posbindu, Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) sering maintanance sehingga pencatatan pelaporan terhambat.	Mengusulkan untuk menambah jumlah staf pengelola PTM Dinkes, Membuat workshop dengan petugas PTM Puskesmas tentang pelaporan di ASIK, mengusulkan ke bagian pengadaan untuk pengadaan stik kolesterol dan asam urat
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Capaian Pengelola Program Lansia Masih rendah dikarenakan Petugas sering Berganti dan Petugas Kesehatan Harus melakukan kunjungan rumah utuk mendapatkan Sasaran lansia yang tdk bisa datang ke Posyandu lansia	Harus adanya penguatan dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat khususnya lanjut Usia dan keluarga lansia tentang penting nya Pemeriksaan Kesehatan teratur di fasilitas kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Petugas pengelola program PTM Dinas Kesehatan yang sangat terbatas membuat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ke lapangan sangat terbatas, Belum semua Posbindu memiliki alat Posbindu KIT, jumlah Stik pemeriksaan Kolesterol dan Asam Urat terbatas	Mengusulkan untuk menambah jumlah staf pengelola PTM Dinkes, Membuat workshop dengan petugas PTM Puskesmas tentang pelaporan di ASIK, mengusulkan ke bagian pengadaan untuk pengadaan stik

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
		mengakibatkan kurangnya minat sasaran usia produktif datang ke Posbindu, Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) sering maintanance sehingga pencatatan pelaporan terhambat.Petugas pengelola program PTM Dinas Kesehatan yang sangat terbatas membuat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ke lapangan sangat terbatas, Belum semua Posbindu memiliki alat Posbindu KIT, jumlah Stik pemeriksaan Kolesterol dan Asam Urat terbatas mengakibatkan kurangnya minat sasaran usia produktif datang ke Posbindu, Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) sering maintanance sehingga pencatatan pelaporan terhambat.	kolesterol dan asam urat
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Petugas pengelola program PTM Dinas Kesehatan yang sangat terbatas membuat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ke lapangan sangat terbatas, Belum semua Posbindu memiliki alat Posbindu KIT, jumlah Stik pemeriksaan Kolesterol dan Asam Urat terbatas mengakibatkan kurangnya minat sasaran usia produktif datang ke Posbindu, Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) sering maintanance sehingga pencatatan pelaporan terhambat.Petugas pengelola program PTM Dinas Kesehatan yang sangat terbatas membuat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ke lapangan sangat terbatas, Belum semua Posbindu memiliki alat Posbindu KIT, jumlah Stik pemeriksaan Kolesterol dan Asam Urat terbatas mengakibatkan kurangnya minat sasaran usia produktif	Mengusulkan untuk menambah jumlah staf pengelola PTM Dinkes, Membuat workshop dengan petugas PTM Puskesmas tentang pelaporan di ASIK, mengusulkan ke bagian pengadaan untuk pengadaan stik kolesterol dan asam urat

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
		datang ke Posbindu, Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) sering maintanance sehingga pencatatan pelaporan terhambat.	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kolaborasi lintas sektor yang masih kurang dalam upaya penanganan ODGJ dan Ketersediaan Obat yang masih kurang.	Mengadakan Rapat Koordinasi dengan Lintas Sektor dalam Upaya penanganan ODGJ dan Pengusulan Obat ODGJ
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Catridge TCM masih kurang, Pot Sputum masih kurang, dan mikroskopis masih kurang di puskesmas serta SDM Analis laboratorium masih kurang. Semua logistik masih berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi	Pengadaan Catridge TCM, Pengadaan Mikroskopis, Pengadaan Pot Sputum dan penambahan tenaga analis laboratorium di setiap puskesmas
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	SDM Analis laboratorium (ATLM) masih kurang, Rapid Skrining HIV masih berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi	Penambahan tenaga analis laboratorium di setiap puskesmas serta Pengadaan rapid skrining HIV

4.2.7 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.109.700.000	1.071.561.815	96,56%
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	94.139.200	94.139.200	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.372.560.000	1.371.657.000	99,93%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	348.420.000	171.274.300	49,16%
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	119.282.400	-	0%
2	**PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	132.408.000	111.498.000	84,21%
3	**PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	55.336.344	55.215.000	99,78%
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	52.000.000	51.342.800	98,74%
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	170.000.000	98.250.655	57,79%
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
4	**PELAYANAN KESEHATAN BALITA**	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	221.748.300	-	0%
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	69.000.000	64.179.376	93,01%
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	24.061.800	21.501.800	89,36%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.047.890.000	2.992.187.696	98,17%
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	131.897.800	131.897.800	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.853.964.000	1.785.499.000	96,31%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	682.320.000	682.073.000	99,96%
5	**PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	304.780.000	293.334.637	96,24%
6	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	529.809.139	526.750.000	99,42%
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	65.000,000	64.316.800	98,95%
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	143.942.000	4.000.000	2,78%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	355.940.000	355.825.000	99,97%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Reproduksi	673.230.000	598.230.000	88,86%
7	**PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingk at Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	217.672.000	217.281.300	99,82%
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	336.560.000	336.373.000	99,94%
8	**PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	70.000.000	68.378.000	97,68%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	318.122.800	317.839.800	99,91%
9	**PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
	MELITUS	untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	793.265.400	789.785.366	99,56%
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	75.000.000	74.851.000	99,80%
10	**PERSENTASE ODGJ BERAT YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA SESUAI STANDAR**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	713.740.000	696.204.100	97,54%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	35.000.000	33.110.000	94,60%
11	**PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengadaan Obat, Bahan Medis habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	931.655.900	866.673.000	93,03%
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	675.180.000	624.457.000	92,49%
12	**PELAYANAN KESEHATAN**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
	ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAH KAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFI CIENCY VIRUS)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	73.000.000	33.328.000	45,65%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	45.290.000	45.085.000	99,55%

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang pekerjaan umum

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Layanan Dasar	Target (Orang)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	318.424
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	318.424

4.3.3 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Layanan Dasar	Target (Orang)	Capaian	Persentase
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	318.424	273.544	85,91
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	318.424	297.340	93,38

4.3.4 Alokasi Anggaran

No	Jenis Layanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1.502.490.160
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	710.775.000

4.3.5 Dukungan Personil

No	Jenis Layanan Dasar	Jumlah SDM Tersedia
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2 Orang
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2 Orang

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	a. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, serta kurangnya Dana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan b. Sulitnya pengumpulan data yang disebabkan oleh Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan prasarana pendukung yang tidak memadai, serta kurangnya Dana yang tersedia sehingga sampai pada saat ini Kabupaten Tapanuli Utara belum memiliki Database penerima manfaat Air minum yang jelas.	a. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian yang sesuai, Sarana dan prasarana pendukung yang memadai, serta Dana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan. b. Membuat kegiatan pendataan agar memiliki Database yang jelas dalam hal penerima manfaat Air minum. c. Perlunya dukungan ataupun Kerjasama yang baik dari para Aparat Desa maupun kecamatan dalam pengumpulan data.
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	a. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, serta kurangnya Dana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan b. Belum tersedianya Database yang jelas tentang capaian ketersediaan sarana dan prasarana Air Limbah	a. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian yang sesuai, Sarana dan prasarana pendukung yang memadai, serta Dana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan. b. Membuat kegiatan pendataan agar memiliki Database

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
			yang jelas dalam hal penerima manfaat Air minum. c. Perlunya dukungan ataupun Kerjasama yang baik dari para Aparat Desa maupun kecamatan dalam pengumpulan data.

4.3.7 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
	URUSAN PEKERJAAN UMUM				**2.213.265.160**	**1.870.344.214**	**84,51%**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				**1.502.490.160**	**1.167.634.324**	**77,71%**
	1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**			**1.502.490.160**	**1.167.634.324**	**77,71%**
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan /peningkatan/ perluasan/per baikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik	0	0	0%
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik	0	0	0%
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Liter/ Detik	1.502.490.160	1.167.634.324	77,71%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Perdesaan				
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan	Penyelenggara SPAM	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
			SPAM				
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem	Lembaga	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Penyediaan Air Minum (SPAM)				
		24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
		25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0%
		26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/ Detik	0	0	0%
		27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
		28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/ Detik	0	0	0%
		29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0	0	0%
		30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Unit	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Kabupaten/Kota				
		31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	0	0%
		33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				**710.775.000**	**702.709.890**	**98,87%**
	1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**710.775.000**	**702.709.890**	**98,87%**
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan /rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		3	Pembangunan /penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		6	Pembangunan /penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		10	Operasi dan pemeliharaan	Unit	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M^3/Hari	0	0	0%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M^3/Hari	0	0	0%
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
		18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan	Unit	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu				
		19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
		20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M^3/Hari	0	0	0%
		21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M^3/Hari	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M^3/Hari	0	0	0%
		23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M^3/Hari	0	0	0%
		24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Terpusat Skala Perkotaan				
		25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M³/Hari	0	0	0%
		26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M³/Hari	0	0	0%
		28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M³/Hari	0	0	0%
		29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M³/Hari	0	0	0%
		31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M³/Hari	0	0	0%
		32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	0	0	0%
		33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
		34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
		35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%
		36	Pembangunan Instalasi Pengolahan	M³/Hari	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Lumpur Tinja (IPLT)				
		37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
		38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	0	0	0%
		39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	710.775.000	702.709.890	98,87%
		40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0%
		41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0	0	0%

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang perumahan rakyat :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Layanan Dasar	Target (Orang)
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250

4.4.3 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Layanan Dasar	Target (Orang)	Capaian	Persentase
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250	0	0

4.4.4 Alokasi Anggaran

No	Jenis Layanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	234.823.500
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0

4.4.5 Dukungan Personil

Data personil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara urusan Perumahan Rakyat sebanyak 6 orang dengan uraian :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 1 orang
- Jabatan fungsional : 1 orang
- Jabatan pelaksana : 3 orang

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kerusakan rumah akibat bencana alam yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal atau menghuni rumah tidak aman.	Pemberian bantuan sosial bagi korban bencana melalui Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 682 Tahun 2025
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah belum pernah melaksanakan program relokasi	-

4.4.7 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persen**	**0**	**0**	**0%**
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Kegiatan**	**146.805.000**	**142.572.382**	**97,12%**
	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	75.855.000	71.622.382	94,42%
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
	3. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
	4. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	70.950.000	70.950.000	100%
	5. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban	Dokumen	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota				
	6. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
	7. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	8. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	9. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	10. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		**234.823.500**	**234.800.000**	**99,99%**
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	234.823.500	234.800.000	99,99%
	2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	3. Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
	4. Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	5. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	6. Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	7. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	8. Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Tangga			
	9. Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	10. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	11. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	12. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Layanan Dasar	Target (Orang)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	63	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)	80	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	323.652	BPBD Kabupaten

No	Jenis Layanan Dasar	Target (Orang)	Perangkat Daerah Pelaksana
4	Pelayanan Pencengahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	323.652	BPBD Kabupaten
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	538	BPBD Kabupaten

4.5.3 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Layanan Dasar	Target (Orang)	Capaian	Persentase	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	63	63	100	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)	80	80	100	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	323.652	14.033	4,34	BPBD Kabupaten
4	Pelayanan Pencengahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	323.652	14.033	4,34	BPBD Kabupaten
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.565	1.565	100	BPBD Kabupaten

4.5.4 Alokasi Anggaran

No	Jenis Layanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.345.669.650	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	259.992.795	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	0	BPBD Kabupaten
4	Pelayanan Pencengahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	128.293.825	BPBD Kabupaten
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	155.675.992	BPBD Kabupaten

4.5.5 Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	58	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	78	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	26 PNS dan 3 PPPK Penuh Waktu, 12 Orang PPPK Paruh Waktu (5 Orang S2, 20 Orang S1, 2 Orang D3, Dan 14 Orang SMA/SMK	BPBD Kabupaten
4	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		BPBD Kabupaten
5	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		BPBD Kabupaten

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Banjir di beberapa kecamatan saat curah hujan tinggi, hal ini berdampak pada Rumah warga terendam, kerusakan infrastruktur, aktivitas masyarakat terganggu	Normalisasi sungai, perbaikan drainase, pembangunan tanggul, serta peningkatan sistem peringatan dini banjir di Lokasi-lokasi yang sering terjadi banjir utamanya dipemukiman penduduk dan sarana Pendidikan di Tapanuli Utara	BPBD Kabupaten
2	Tanah longsor di wilayah perbukitan dan daerah rawan	Pemetaan daerah rawan longsor utamanya Revisi Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Kordinasi terkait zona Rawan Pergerakan Tanah dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), pembangunan tembok penahan tanah, reboisasi/penghijauan, serta sosialisasi mitigasi kepada masyarakat	BPBD Kabupaten
3	Angin kencang yang merusak rumah dan fasilitas umum dan Kemarau berkepanjangan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)	Penanaman pohon penahan angin, peningkatan kualitas konstruksi rumah, serta penyebaran informasi cuaca dari BMKG baik terkait cuaca ekstrim maupun kemarau	BPBD Kabupaten

No	Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah Pelaksana
		berkepanjangan. Untuk kebakaran hutan dan lahan diperlukan sarana dan prasana yang mumpuni untuk meminimalisasi sebaran lahan akibat dampak kebakaran khususnya disekitar lahan masyarakat dan pemukiman masyarakat.	
4	Keterbatasan data kebencanaan yang terintegrasi	Penguatan sistem informasi kebencanaan daerah, integrasi data lintas OPD, dan pemanfaatan teknologi GIS serta peningkatan SDM terlatih untuk mengoptimalisasi Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Kebencanaan di Tapanuli Utara.	BPBD Kabupaten
5	Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Penguatan dukungan anggaran, pengadaan peralatan kebencanaan, dan kerja sama dengan pemerintah pusat	BPBD Kabupaten
6	Rendahnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana	Peningkatan edukasi kebencanaan secara berkala melalui sosialisasi dan pelatihan simulasi kebencanaan.	BPBD Kabupaten

4.6.7 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
				Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)				**3.345.669.650**	**3.228.879.653**	**96,51%**
1	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**3.021.120.500**	**2.958.438.560**	**97,93%**
	1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
				Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
	2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
	3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0	0	0%
	4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
	5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
	6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
	7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
	8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
	9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
	10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan	Orang	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
				Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan				
	11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
	12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
	13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	1.510.560.250	1.479.219.280	97,93%
	14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	1.510.560.250	1.479.219.280	97,93%
	15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	0	0	0%
	16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui	Kasus	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
				Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa				
	17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan	0	0	0%
	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%
2	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			**324.549.150**	**270.441.093**	**83,33%**
	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah	Dokumen	0	0	0%
	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
				Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
	7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	87.565.000	86.490.643	98,77%
	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	171.007.850	123.844.200	72,42%
	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	65.976.300	60.106.250	91,10%
3	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**			**0**	**0**	**0%**
	1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%
	2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
	5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)			**Persen**	**519.985.590**	**514.580.090**	**98,96%**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
				Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
1	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**519.985.590**	**514.580.090**	**98,96%**
	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	259.992.795	257.290.045	98,96%
	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	180.000.000	180.000.000	100%
	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0%
	4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
	6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
	8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
	9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	0	0	0%
	10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
				Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
	11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%
	13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	79.992.795	77.290.045	96,62%
	15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
	16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
2	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**			**0**	**0**	**0%**
	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
3	**Investigasi Kejadian Kebakaran**			**0**	**0**	**0%**
	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
4	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**			**0**	**0**	**0%**
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan	Orang	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
				Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat				
	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	0	0	0%
	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
5	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**			**0**	**0**	**0%**
	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
	2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
	3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Layanan Dasar	Target
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	126
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	71
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	404
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	8
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	276

4.6.3 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Layanan Dasar	Target	Capaian	Persentase
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	126	126	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	71	71	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	404	404	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	8	8	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	276	231	83,70

4.6.4 Alokasi Anggaran

No		Jenis Layanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)
1		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial**	147.183.400
	1)	Penyediaan Permakanan	51.380.000
	2)	Penyediaan Sandang	23.920.000

No		Jenis Layanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)
	3)	Penyediaan Alat Bantu	48.140.000
	4)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	920.000
	5)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	10.000.000
	6)	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	7.715.400
	7)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Infuk Kependudukan, Akta Lahir, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	0
	8)	Pemberian Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	790.000
	9)	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	0
	10)	Pemberian Layanan Kedaruratan	920.000
	11)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	390.000
	12)	Pemberian Layanan Rujukan	3.008.000
2		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota**	**1.729.036.399**
	1)	Penyediaan Permakanan	475.443.599
	2)	Penyediaan Sandang	372.588.250
	3)	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	528.202.650
	4)	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	352.801.900
	5)	Pelayanan Dukungan Psikososial	0

4.6.5 Dukungan Personil

No	Jenis Layanan Dasar	Jumlah SDM Tersedia
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	4 Orang (3 PNS, 1 PPPK)
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	4 Orang (3 PNS, 1 PPPK)
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	4 Orang (3 PNS, 1 PPPK)
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	4 Orang (3 PNS, 1 PPPK)
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4 Orang ASN, 15 Orang TAGANA

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Tidak adanya data PMKS terbaru	Melakukan koordinasi dengan PSM untuk pendataan PMKS
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Tidak adanya data PMKS terbaru	Melakukan koordinasi dengan PSM untuk pendataan PMKS
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Tidak adanya data PMKS terbaru	Melakukan koordinasi dengan PSM untuk pendataan PMKS
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Tidak adanya data PMKS terbaru	Melakukan koordinasi dengan PSM untuk pendataan PMKS
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Adanya ketergantungan Daerah kepada Pusat dalam hal Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten Tapanuli Utara	- Permohonan penambahan anggaran - Menjalin koordinasi dengan Kementerian dan NGO - Melaksanakan penggalangan donasi

4.6.7 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**1.876.219.799**	**1.734.138.117**	**92,43%**
	1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti SosiaL**			**147.183.400**	**139.966.608**	**95,10%**
		1	Penyediaan permakanan	Orang	51.380.000	51.370.000	99,98%
		2	Penyediaan sandang	Orang	23.920.000	23.870.000	99,79%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	48.140.000	41.640.000	86,50%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	920.000	910.000	98,91%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	10.000.000	9.612.696	96,13%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	7.715.400	7.511.912	97,36%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	790.000	790.000	100%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	920.000	910.000	98,91%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	390.000	390.000	100%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	3.008.000	2.962.000	98,47%
	2	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**			**1.729.036.399**	**1.594.171.509**	**92,20%**
		1	Penyediaan makanan	Orang	246.102.699 (APBD)	241.407.700 (APBD)	98,09%
					475.443.599	401.416.599	84,43%
		2	Penyediaan sandang	Orang	372.588.250	368.939.450	99,02%
		3	Penyediaan tempat	Unit	528.202.650	478.672.760	90,62%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan (%)
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
			penampungan pengungsi				
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	352.801.900	345.142.700	97,83%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD)

Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025

BAB V
PENUTUP

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 disusun dan disesuaikan dengan sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Ealuasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kami menyadari bahwa capaian kinerja yang tersaji dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 masih belum sepenuhnya memenuhi harapan Pemerintah Atasan serta kebutuhan dan harapan masyarakat karena berbagai keterbatasan baik sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sumber daya finansial dan berbagai faktor lain. Namun kami akan tetap berusaha dengan segala daya upaya yang ada untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara pada masa yang akan datang.

Kami berharap Pemerintah Atasan dapat memberikan evaluasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk memperbaiki penyelenggaraaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada tahun-tahun yang akan datang. Demikian penyampaian penyampaian LPPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD)

Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Sisingamangaraja No.100 Tarutung 22411 Provinsi Sumatera Utara
Telp.(0633) 21580 Faksimile (0633) 215810
Post el : inspektur@taputkab.go.id, Laman http:/www.taputkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
Nomor : 700.1.2.1/599/INSP-1/III/2026

Kami telah melakukan reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi Infromasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggungjawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini,

Tarutung, 31 Maret 2026

Plt. Inspektur Daerah,

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA INSPEKTORAT DAERAH

Manapang Simamora, ST
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 197703052005021005

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Sisingamangaraja Nomor 100 Tarutung, Sumatera Utara 22411,
Telepon (0633) 21580, Faksimile (0633) 21580,
Laman inspektorat.taputkab.go.id, Pos-el inspektur@taputkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 000.1.2.3/ 68 /INSP/III/2026

Dasar : 1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2026 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026.
2. Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor :007 Tahun 2026 tanggal 09 Pebruari tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

MENUGASKAN:

Kepada :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Manapang Simamora, S.T NIP. 197703052005021005	Penanggung Jawab/Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2.	Jekson Levis Sianturi, SP, M.Si NIP. 197306261994021004	Pengandali Teknis/Inspektur Pembantu Khusus
3.	Gugun Fatar, SE NIP. 197803092005021001	Ketua Tim/ PPUPD Ahli Madya
4.	Johannes, SE NIP. 196901202003121002	Anggota/ PPUPD Ahli Madya
5.	Meyly Simatupang, S.H., M.H 197109212006042010	Anggota/ PPUPD Ahli Madya
6.	Tiar Friska Sihombing, S.E 196904062007012036	Anggota/ PPUPD Ahli Madya
7.	Mariapul Marisi Sinurat, S.E 197106052006042003	Anggota/ PPUPD Ahli Madya
8.	Derliana Tampubolon,S.S.T., M.Kes 1973110125022002	Anggota/ Auditor Ahli Madya
9.	Jonson Nainggolan,S.H 19730319940310005	Anggota/ PPUPD Ahli Muda
10.	Robinson H. Silalahi, S.E 198801282015070l	Anggota/ PPUPD Ahli Muda
11.	Indramarto Sidauruk, S.T 19781227201000110O2	Anggota/ Auditor Ahli Muda
12.	Trino Nadapdap,S.Tr 199411012019031010	Anggota/ Auditor Ahli Muda
13.	Hendra Pasaribu, S.E 198804282019031011	Anggota/ Auditor Ahli Muda
14.	Elly Joice Aritonang,S.Tr 199108102019032014	Anggota/ Auditor Ahli Muda
15.	Cresby Lihardo Manik, S.Tr. 199104172019031007	Anggota/ Auditor Ahli Muda

Tujuan : 1. Urusan Dinas dalam rangka melakukan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026;
2. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Kegiatan Dilaksanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 26 s.d 28 Maret 2026 dan Tanggal 30 s.d 31 Maret 2026.

Tarutung, 26 Maret 2026

Inspektur Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara,

Manapang Simamora,S.T
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197703052005021005

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1	URUSAN PEMUDA	2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	1,920	100.00%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga	1,920	valid	Data telah sesuai
					Jumlah Target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	1,920		Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga	1,920	valid	Data telah sesuai
		2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	0	0.00%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga	-	Tidak valid	Data telah sesuai
					Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	1		Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga	1	valid	Data telah sesuai
		2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk pemusatan latihan daerah provinsi	%	Jumlah atlet daerah di Kabupaten/kota yang masuk pemusatan latihan daerah/provinsi	6	20.00%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga	6	valid	Data telah sesuai
					Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang olahraga)	30		Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga	30	valid	Data telah sesuai
		2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	%	Jumlah atlet peraih medali	9	25.714%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga	9	valid	Data telah sesuai
					Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	35		Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga	35	valid	Data telah sesuai

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jeckson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiur Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonsor Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Siburuk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Hadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031..0
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031..1
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1.	Urusan Wajib Non Dasar Olah Raga (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga)	2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	3.277	3,71%			tidak valid	tidak disajikan pada bukti dukung terkait elem data
					jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	88.382				tidak valid	tidak disajikan pada bukti dukung terkait elem data
		2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	-	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	478	0,54%			tidak valid	tidak disajikan pada bukti dukung terkait elem data
					Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	88.382				tidak valid	tidak disajikan pada bukti dukung terkait elem data
		2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	%	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang msuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	6	20,00%	Surat pernyataan dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	6	valid	Sumber data sesuai
					Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	30			30	valid	Sumber data sesuai
		2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	%	Jumlah atlet peraih medali	9	25,71%	Surat pernyataan dari Dinas Pariwisata.	9	valid	Sumber data sesuai
					Jumlah atlet yang iktu event nasional dan internasional	35			35	valid	Sumber data sesuai

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.SI
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002

8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1.	Urusan Penunjang: Perencanaan (Bappelitbang)	1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	%	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	17	100,00%	Data Yang disajikan Bappedalitbang	Sesuai	valid	Sesuai
					Progran kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	17			Sesuai	valid	
		2	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan		Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	1	100,00%	Data Yang disajikan Bappedalitbang	Sesuai	valid	Sesuai
					Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	1			Sesuai	valid	

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
	Urusan Penunjang										
1	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)**	1	**Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	....%	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.301	71,68044077	BKPSDM	1.301	Data Pembilang telah divalidasi oleh Kepala BKPSD dan telah dibubuhi dengan stempel	Data pendukung untuk pembilang dan penyebut yang disajikan telah lengkap karena data yang disajikan lengkap dengan jumlah pegawai lulusan perguruan tinggi per perangkat daerah dan capaian yang disajikan telah sesuai dengan hasil reviu yaitu 71,6804408 %
					Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.815		BKPSDM	1.815	Data Penyebut telah divalidasi oleh Kepala BKPSD dan telah dibubuhi dengan stempel	

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Jolse Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Sisingamangaraja No. 100 Tarutung, Sumatera Utara 22411,
Telepon (0633)21580 Faksimile (0633) 21580,
Laman : inspektorat.taputkab.go.id Pos-el : inspektur@taputkab.go.id

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN PILIHAN PARIWISATA
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1	Pariwisata	3.b.1	Persentase investor sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	%	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	0	0%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Sesuai	Valid	Data investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum tidak dapat disajikan sesuai surat keterangan Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Realisasi investasi Tahun N	1			Sesuai	Valid	Sumber Data Sesuai
		3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	%	Jumlah wisatawan asing Tahun N - Jumlah wisatawan asing Tahun N-1	-10	-3,23%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Sesuai	Valid	Jumlah wisatawan asing mengalami penurunan sehingga pertumbuhan minus
					Jumlah wisatawan asing Tahun N-1	310			Sesuai	Valid	
		3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	Jumlah wisatawan Tahun N - Jumlah wisatawan Tahun N-1	-10471	-5,49%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Sesuai	Valid	Jumlah wisatawan nusantara mengalami penurunan sehingga pertumbuhan minus
					Jumlah wisatawan Tahun N-1	190.751			Sesuai	Valid	

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 197803092005021001
3. Johannes, SE
   NIP 196901202003121002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 199108102019032014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	%	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	288.075.025.009	20,66%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	288.075.025.009	valid	Data telah sesuai
					Anggaeran belanja dalam Anggaran Pendapatan Daerah	1.394.378.083.539		Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.394.378.083.539	valid	Data telah sesuai
		4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	%	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	156.540.675.919	10,88%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	156.540.675.919	valid	Data telah sesuai
					Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1.439.342.162.186		Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.439.342.162.186	valid	Data telah sesuai
		4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	%	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	818.194.391.999	61,11%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	818.194.391.999	valid	Data telah sesuai
					Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	1.338.924.060.441		Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.338.924.060.411	valid	Data telah sesuai
		4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	%	Aloksi belanja infrastruktur pelayanan publik	47.722.610.416	4,076%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	47.722.610.416	valid	Data telah sesuai
					Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	1.170.687.663.062		Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.170.687.663.062	valid	Data telah sesuai

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.SI
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Jolse Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Output		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan (Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara)**	1	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa (UKPBJ) (4.f.1)	**Poin**	Skor Indikator Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	22	22,22	https://lookerstudio.google.com	22,22	valid	Bahwa tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) Kabupaten Tapanuli Utara dengan capaian 22,22% dinyatakan valid sesuai dengan keterangan yang disajikan
					-	-		-	-	-	
		2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan (4.f.2)	Poin	Skor Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	20,89	20,89	https://lookerstudio.google.com	20,89	valid	Bahwa indikator pemanfaatan sistem pengadaan dengan capaian 20,89% dinyatakan valid sesuai dengan keterangan yang disajikan
					-	-		-	-	-	
		3	Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) (4.f.3)	Poin	Skor Indikator Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	4,29	4,29	https://lookerstudio.google.com	4,29	valid	Bahwa indikator kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dengan capaian 4,29 dinyatakan valid sesuai dengan keterangan yang disajikan
	Urusan Pemerintahan Bidang Hubungan dan Perwakilan Daerah (Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara)	1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N (4.g.1)	Tepat Waktu (1)/ Tidak Tepat Waktu (2)	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	1	1,00	Data yang disajikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah			Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dinyatakan valid dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2024
					-	-		-	-	-	
		2	Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N (4.g.2)	%	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	5	55,50	Data yang disajikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Nomor Surat 100.1.4.2/263/SETWAN/III/2026 perihal Penyampaian Data Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025 (lampiran)	5	valid	Bahwa persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 dinyatakan valid, dengan telah terbitnya 5 Peraturan Daerah yang telah ditetapkan di tahun 2025 sesuai dengan Lampiran Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Yang Tertuang Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun N	9		Data yang disajikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Nomor Surat 100.3/84/HUKUM/II/2026 perihal Penyampaian Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	9	valid	Tapanuli Utara Nomor 100.1.4.2/263/SETWAN/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 dengan total Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 9 Peraturan Daerah sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 100.3/84/HUKUM/II/2026 tanggal 27 Februari
Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Publik	**1**	Penilaian mal-administrasi penyelenggaraan pelayanan publik (4.h)	Nilai	Nilai penilaian mal-administrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	-	Surat Ketua Ombudsman RI No. T/2201/PC.05/IX/2025 tanggal 2 September 2025 tentang Hal Penilaian Mal-Administrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang menyatakan bahwa Kabuoaten Tapanuli Utara tidak termasuk lokus penilaian tahun 2025	-	valid	Sumber data sesuai
				-	0			0		

Tarutung, Maret 2026

Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGAWASAN)	1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dari BPKP Deputi Bidang Pengawasan	2	2	Inspektorat	2	Data telah ditanda tangani oleh Inspektur	Valid
		2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	Hasil Pengawasan Evaluasi Kapabilitas APIP dari BPKP Provinsi Sumatera Utara	2	2	Inspektorat	2	Data telah ditanda tangani oleh Inspektur	Valid
		3	Manajemen Resiko Indeks	Nilai	Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dari BPKP Deputi Bidang Pengawasan	2	2	Inspektorat	2	Data telah ditanda tangani oleh Inspektur	Valid
		4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	%	Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Prov Sumatera Utara Tahun Anggaran N-1	86,12	86,12	Inspektorat	2	Data telah ditanda tangani oleh Inspektur	Valid

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
								Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1.	Urusan Pelayanan dasar trantib bencana dan pengamanan	1 Persentase Dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	1.00	33.3333%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.00	valid	Sumber Data Sesuai
				Jumlah dokumen kebencanaan (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, dan rencana kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota=3	3.00			3.00	valid	Sumber Data Sesuai
		2 Persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja	%	Jumlah pengaduan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	35.00	100.0000%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.00	valid	Sumber Data Sesuai
				Jumlah pengaduan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	35.00			35.00	valid	Sumber Data Sesuai
		3 Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	%	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	2.00	100.0000%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.00	valid	Sumber Data Sesuai
				Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	2.00			2.00	valid	sumber data sesuai
		4 Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	265.00	26.5000%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	265.00	valid	Sumber Data Sesuai
				Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	1000.00			1000.00	valid	Tidak dirincikan nama warga yang tinggal di kawasan rawan bencana
		5 Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1250.00	100.0000%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1250.00	valid	Sumber Data Sesuai
				Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	1250.00			1250.00	valid	Sumber Data Sesuai
		6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	57.00	71.2500%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57.00	valid	Sumber Data Sesuai
				Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	80.00			80.00	valid	Sumber Data Sesuai

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Urusan	IKK OUTCAME		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
								Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PELAYANAN DASAR (DINAS KESEHATAN)	1.b.1.	Persentase kematian ibu	%	Jumlah kematian ibu tahun N	5	0,1505117	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	Valid	Sumber data sesuai
				Jumlah ibu melahirkan tahun N	3322			3322	Valid	Sumber data sesuai
	1.b.2.	Pravalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	1041	6,325191	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1041	Valid	Sumber data sesuai
				Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	16458			16458	Valid	Sumber data sesuai
	1.b.3.	Persentase Pelayanan Kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	3320	86,233766	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3320	Valid	Sumber data sesuai
				Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3850			3850	Valid	Sumber data sesuai
	1.b.4	Persentase Pelayanan Kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	3320	86,233766	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3320	Valid	Sumber data sesuai
				Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3850			3850	Valid	Sumber data sesuai
	1.b.5.	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang 1.b.5 Persentase pelayanan kesehatan bayi mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	3349	86,627005	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3349	Valid	Sumber data sesuai
				Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3866			3866	Valid	Sumber data sesuai

Urusan	IKK OUTCAME		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
								Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
	1.b.6.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	17027	91,400505	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17027	Valid	Sumber data sesuai
				Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	18629			18629	Valid	Sumber data sesuai
	1.b.7.	Persentase pelayanan kesehatan pada usian pendidikan sesuai standar	%	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	61752	98,983746	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	61752	Valid	Sumber data sesuai
				Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	62386			62386	Valid	Sumber data sesuai
	1.b.8.	Persentase pelayanan kesehatan pada usian produktif sesuai standar	%	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	89229	44,248345	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89229	Valid	Sumber data sesuai
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	201655			201655	Valid	Sumber data sesuai
	1.b.9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	41595	98,500995	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	41595	Valid	Sumber data sesuai
				Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	42228			42228	Valid	Sumber data sesuai
	1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	40685	54,695902	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40685	Valid	Sumber data sesuai
				Jumlah estimasi penderita hipertensi usia 215 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	74.384			74384	Valid	Sumber data sesuai
	1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	Jumlah penderita diabetes melitus usia 215 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2195	100,000000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan	2195	Valid	Sumber data sesuai

Urusan	IKK OUTCAME		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
								Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
				Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia 215 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dala	2195		Keluarga Berencana	2195	Valid	Sumber data sesuai
	1.b.12	**Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat jiwa sesuai standar**	%	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	464	100,000000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	464	Valid	Sumber data sesuai
				Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	464			464	Valid	Sumber data sesuai
	1.b.13	**Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar**	%	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	6298	100,000000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6298	Valid	Sumber data sesuai
				Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	6.298			6298	Valid	Sumber data sesuai
	1.b.14	**Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar**	%	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	6682	98,773097	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6682	Valid	Sumber data sesuai
				Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	6765			6765	Valid	Sumber data sesuai

Tarutung, Maret 2026

Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
NIP 197303261994021004
Gugun Fatar, SE, Ak
NIP 19780309 200502 1 001
Johannes, SE
NIP 19690120 200312 1 002
Meyli Simatupang, S.H,M.H
NIP 197109212006042010
Tiar Friska Sihombing,S.E
NIP 196904062007012036
Marlapul Marisi Sinurat,S.E
NIP 197106052006042003
Deriliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
NIP 197311012005022002

8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Output		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada Tahun N	239.00	100.0000%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	239.00	valid	Sumber Data Sesuai
					Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada Tahun N	239.00			239.00	valid	Sumber Data Sesuai
		2	Persentase Luas kawasan pemukiman kumuh 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	%	Luas kawasan pemukiman kumuh 10 Ha yang ditangani (Ha)	17.50	90.0669%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	17.50	valid	Sumber Data Sesuai
					Luas kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 Ha	19.43			19.43	valid	Sumber Data Sesuai
		3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	Jumlah Rumah tidak layak huni yang tertangani pada Tahun N	233.00	3.4498%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	233.00	valid	Sumber Data Sesuai
					Jumlah Rumah tidak layak huni yang tertangani pada Tahun N	6754.00			6754.00	valid	sumber data sesuai
		4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum	%	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Tahun N	0.00	0.0000%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0.00	tidak valid	Tidak dilaksanakan Jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum
					Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas Umum di Tahun N	1.00			1.00	tidak valid	jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum di Tahun N Tidak ada disajikan

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 19730703199403 1005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Jokse Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1.	Urusan Lingkungan Hidup	1	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/kota	%	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan	27.00	100.0000%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	27.00	Valid	sumber data sesuai
					Jumlah Target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	27.00			27.00	Valid	sumber data sesuai
		2	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	%	Jumlah sampah yang diangkut, pemilihan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	60898.43	100.0000%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	60898.43	Valid	sumber data sesuai
					Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	60898.43			60898.43	Valid	sumber data sesuai

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
	Urusan Wajib Dasar (Dinas Pendidikan)	1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	%	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan anak usia dini	5.081	46,103%	Data yang disampaikan Dinas Pendidikan	Sesuai	valid	Sesuai
					Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	11.021			Sesuai	valid	
		2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	%	Jumlah anak usia 7 (Tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	53.637	85,904%	Data yang disampaikan Dinas Pendidikan	Sesuai	valid	Sesuai
					Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	62.438			Sesuai	valid	
		3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	%	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	118	8,563%	Data yang disampaikan Dinas Pendidikan	Sesuai	valid	Sesuai
					Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	1.378			Sesuai	valid	

	4	**Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik**	%	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	806	53,662%	Data yang disampaikan Dinas Pendidikan	tidak Sesuai	tidak valid	jumlah toilet kondisi Baik sebanyak 925 buah seharusnya 925/1502=61,58 %
				Jumlah seluruh toilet	1.502			Sesuai	valid	
	5	**Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik**	%	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	2.430	75,372%	Data yang disampaikan Dinas Pendidikan	Sesuai	valid	Sesuai
				Jumlah ruang kelas	3.224			Sesuai	valid	

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1.	Urusan Wajib Non Dasar (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	(Jumlah nilai investasi tahun N-Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	258.067.262.778	72,884%	Data Dinas Penanaman Modal	Sesuai	valid	Sesuai
					Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	354.077.277.714			Sesuai	valid	
		2	Realisasi total terhadap target investasi	%	Total realisasi investasi kabupaten/kota	612.144.540.492	79,087%	Data Dinas Penanaman Modal	Sesuai	valid	Sesuai
					Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	774.011.660.000			Sesuai	valid	

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1.	Urusan Wajib Non Dasar Ketenagakerjaan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan)	2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%	I Volume Usaha koperasi tahun berjalan - I Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	65.772.318.790	103,22%	Surat pernyataan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan	65.772.318.790	valid	Sumber data sesuai
					I Volume Usaha koperasi tahun sebelumnya	63.722.592.201			63.722.592.201	valid	Sumber data sesuai
		2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%	I Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	150	0,51%	Surat pernyataan dari Dinas Koperasi, Usaha	150	valid	Sumber data sesuai
					I Usaha Mmikro	29.313			29.313	valid	Sumber data sesuai
		3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	0	0,00%	Surat pernyataan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0	valid	Sumber data sesuai
					Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	1			1	valid	Sumber data sesuai
		3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan	%	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yagn ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	0	#DIV/0!	Surat pernyataan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0	valid	Sumber data sesuai
						0			0		
		3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional	%	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional	9	7,63%	Surat pernyataan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	9	valid	Sumber data sesuai
					Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	118			118	valid	Sumber data sesuai
		3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menegah di kabupaten/kota	%	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N - Jumlah industri kecil dan menengah N-1	515	92,79%	Surat pernyataan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-40	tidak valid	Penjumlahan terhadap Jumlah industri kecil dan menengah tahun N - Jumlah industri kecil dan menengah N-1 tidak sesuai (Jumlah industri kecil dan menengah Tahun 2025 sebanyak 515 sedangkan Tahun 2024 sebanyak 555)
					Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	555			555	valid	Sumber data sesuai
		3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan	%	Nilai investasi sektor industri	15.344.860.000	2,51%	Surat pernyataan dari Dinas	0	valid	Sumber data sesuai
					Total investasi seluruh sektor	612.144.540.492			1	valid	Sumber data sesuai

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.SI
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200912 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Martsi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042008
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 196801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Output		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1	Urusan Wajib Non-Dasar (Pertanahan)	1	Persentase ditetapkannya Hak atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (2.d.1)	%	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	2.766.456	100%	Data Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang telah diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum , Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	2.766.456	valid	Bahwa Persentase ditetapkannya Hak atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah dengan capaian 100% dinyatakan valid sesuai dengan Data yang telah diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum , Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025
					Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	2.766.456		Data Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah yang telah diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum , Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	2.766.456	valid	
		2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (2.d.2)	%	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	2.818.720.500	100%	Data Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting yang telah diberikan Dinas Pekerjaan Umum , Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	2.818.720.500	valid	Bahwa Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dinyatakan valid sesuai dengan data yang telah diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan
					Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	2.818.720.500		Data Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah diberikan Dinas Pekerjaan Umum , Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	2.818.720.500	valid	
		3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan (2.d.3)	%	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	437.035.599,9	11,54%	Data Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal yang telah diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum , Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	437.035.599,9	valid	Bahwa terdapat perbedaan nilai elemen data pada Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam RTRW yang telah disampaikan yaitu sebesar 3.786.694.554
					Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	3.786.694.884		Data Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum , Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	3.786.694.554	Tidak Valid	
	Urusan Wajib Non-Dasar (Perhubungan)	1	Konektivitas Kabupaten/Kota (2.i.1)	Rasio	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL)	0,68	0,68	Data Konektivitas Transportasi Darat	0,68	valid	Bahwa capaian Konektivitas Kabupaten/Kota sesuai dengan sumber yang disajikan
					-	-		-	2.766.456	valid	
		2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota (2.i.2)	Rasio	V/C Ratio di jalan kabupaten/kota	0,014	0,014	Data V/C Ratio di jalan kabupaten/kota dari Dinas PUTR dan Perhubungan	0,014	valid	Bahwa Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota dengan capaian Rasio 0,014 telah valid sesuai dengan data yang disajikan
					-	-		-	-	valid	

	3	Persentase jumlah perusahaan angkutan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan (2.i.3)	%	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	4	100%	Data Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan dari Dinas PUTR dan Perhubungan	4	valid	Bahwa persentase jumlah perusahaan angkutan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan telah valid sesuai dengan data yang
				Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	4		Data Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata dari Dinas PUTR dan Perhubungan	4	valid	
Urusan Wajib PUTR	1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota (1.c.1)	%	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	12.047,98	75,75%	Data Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha) dari Dinas PUTR dan Perhubungan	12.047,98	valid	Bahwa Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota telah dinyatakan valid sesuai dengan data yang disajikan
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	15.905		Data Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha) dari Dinas PUTR dan Perhubungan	15.905	valid	
	2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota (1.c.2)	%	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota	399,69	37%	Data kondisi jalan kewenangan kabupaten (km) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	399,69	valid	Bahwa persentase kemantapan jalan kabupaten/kota sudah dinyatakan valid sesuai dengan data yang disajikan
				Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota	1.074,01			1.074,01		
	3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota (1.c.3)	%	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	300,0	0,09%	Data Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N dari Dinas PUTR dan Perhubungan	300,0	Valid	Bahwa Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota dinyatakan valid sesuai dengan data yang
				Jumlah total penduduk kabupaten/kota	335.039		Data Jumlah total penduduk kabupaten/kota dari Dinas PUTR dan Perhubungan	335.039		
	4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di pengolahan lumpur tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di instalasi pengolahan air limbah domestik	36	0,0503%	Data jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di pengolahan lumpur tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di instalasi pengolahan air limbah domestik dari Dinas PUTR dan Perhubungan	36	Valid	Data Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dinyatakan valid sesuai dengan data yang disajikan
				Jumlah rumah di kabupaten/kota	71.559		Data jumlah rumah di kabupaten/kota dari Dinas PUTR dan Perhubungan	71.559	Valid	
	5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	%	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	1,653	0,14068%	Data Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha) dari Dinas PUTR dan Perhubungan	1,653	Valid	Sumber data sesuai
				Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah dotentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	1.175		Data Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah dotentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha) dari Dinas PUTR dan Perhubungan	1.175	Valid	

			Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (ha)	0		pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai dikarenakan			
7	Persentase kepatuhan persetujuan bangunan gedung kabupaten/kota	%	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	95,00	93,14%	Data Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang digunakan sesuai peruntukanny dari Dinas PUTR dan Perhubungan	95,00	Valid	Sumber data sesuai
			Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku	102		Data Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku dari Dinas PUTR dan Perhubungan	102	Valid	
8	Persentase persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	%	Jumlah pembebasan retribusi [ersetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	1,00	100%	Surat Keterangan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Nomor 600.1/551/PUTRP/III/2026 yang menyatakan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara belum memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebagai turunan regulasi Surat Keputusan Bersama tentang Dukungan percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah sehingga belum dapat dilaksanakan penerbitan persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tapanuli Utara	-	Tidak Valid	Bahwa Persentase persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah dinyatakan tidak valid sesuai dengan data yang disajikan
			Jumlah permohonan persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepada Daerah atau pejabat yang ditunjuk	1,00			-		
9	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	0,0	-	Data Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis Tahun 2025 dari Dinas PUTR dan Perhubungan	0,0	Valid	Sumber data sesuai
			Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	787		Data Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota Tahun 2025 dari Dinas PUTR dan Perhubungan	787		
10	Persentase penilaian pelaksanaan kesesuai kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	%	Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	27,0	100,00%	Data Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun dari Dinas PUTR dan Perhubungan	27,0	Valid	Sumber data sesuai
			Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	27		Data Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun dari Dinas PUTR dan Perhubungan	27		

Tarutung, Maret 2026

Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampuboion, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 19880128201507100l
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 19880428201903101l
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
Urusan Pilihan											
1	Pertanian	1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	Produksi tanaman pangan tahun N- produksi tanaman pangan tahun N-1	- 20.128,43	-5,4383216	Dinas Pertanian	- 20.128,43	Dokumen pembilang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan dibubuhi dengan stempel	Dokumen Pendukung untuk indikator kunci Peningkatan produksi tanaman pangan telah disajikan dengan 6 (enam) jenis produksi tanaman pangan Tahun N dan Tahun N-I per kecamatan. Dan hasil capaian IKK telah sesuai dengan hasil reviu.
					Produksi tanaman pangan tahun N-1	370.122,10		Dinas Pertanian	370.122,10	Dokumen pembilang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan dibubuhi dengan stempel	
		2	Peningkatan produksi hortikultura	%	Produksi hortikultura tahun N- Produksi hortikultura tahun N-1	15.026,47	6,8654757	Dinas Pertanian	15.026,47	Dokumen pembilang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan dibubuhi dengan stempel	Dokumen Pendukung untuk indikator kunci Peningkatan produksi hortikultura telah didukung dengan jumlah 7 (tujuh) jenis produksi hortikultura Tahun N dan Tahun N-I per kecamatan dan hasil capaian kinerja telah sesuai dengan hasil reviu.
					Produksi hortikultura tahun N-1	218.870,05		Dinas Pertanian	218.870,05	Dokumen pembilang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan dibubuhi dengan stempel	
		3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	%	Produksi komoditas peternakan tahun N- Produksi komoditas peternakan tahun N-I	237,27	12,20543527	Dinas Pertanian	237,27	Dokumen pembilang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan dibubuhi dengan stempel	Dokumen pendukung untuk indikator kunci Peningkatan produksi komoditas peternakan telah disajikan dengan 3 (tiga) jenis produksi komoditas peternakan tahun N dan Tahun N-1 dan hasil capaian kinerja telah sesuai dengan hasil reviu
					Produksi komoditas peternakan tahun N- Produksi komoditas peternakan tahun N-I	1.943,97		Dinas Pertanian	1.943,97	Dokumen pembilang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan dibubuhi dengan stempel	
		4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	1.201,10		Dinas Pertanian	1.201,10	Dokumen pembilang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan dibubuhi dengan stempel	Dokumen Pendukung untuk indikator kunci wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 penyakit hewan menular strategis (PHMS) telah disajikan dengan

No	Urusan	IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
								Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
		(diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 penyakit hewan menular strategis (PHMS)		luas wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	1.201,10	100	Dinas Pertanian	1.201,10	Dokumen pembilang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan dibubuhi dengan stempel	(PHMS) telah disajikan dengan baik, data disajikan dari desa yang terdampak dan terkendali untuk semua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara dan perhitungan hasil capaian indikator telah sesuai dengan hasil reviu.

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1.	Urusan Wajib Dasar (Sosial)	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	126	22,301%	Data yang disampaikan Dinas Sosial ,PPPA	Sesuai	valid	Sesuai
					Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	565			Sesuai	valid	
		2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	71	71,717%	Data yang disampaikan Dinas Sosial ,PPPA	Sesuai	valid	Sesuai
					Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	99			Sesuai	valid	
		3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	409	87,021%	Data yang disampaikan Dinas Sosial ,PPPA	Sesuai	valid	Sesuai
					Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	470			Sesuai	valid	

		4	**Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	%	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	8	100,000%	Data yang disampaikan Dinas Sosial ,PPPA	Sesuai	valid	Sesuai
					Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	8			Sesuai	valid	
		5	**Persentase korban bencana alam,sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota**	%	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.193	100,000%	Data yang disampaikan Dinas Sosial ,PPPA	Sesuai	valid	Sesuai
					Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	1.193			Sesuai	valid	
		6	**Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar**	%	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	614	1,626%	Data yang disampaikan Dinas Sosial ,PPPA	Sesuai	valid	Sesuai
					Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	37.771			Sesuai	valid	

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 19710921 2006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 19710605 2006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002

8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1.	**Urusan Wajib Non Dasar Ketenagakerjaan (Dinas Ketenagakerjaan)**	1	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD (Rencana Tenaga Kerja Daerah)	0	0,00%	Surat pernyataan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara	0		
					Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota	1			0	Tidak valid	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota tidak ada ditampilkan
		2	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).**	%	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	2	0,45%	Surat dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara tentang jumah perusahaan yang menetapkan tata kelola kerja yang layak yaitu PT POS Indonesia Tarutung dan PT MedcoGeothermal Indonesia	2	Valid	Sumber data sesuai
					Jumlah Perusahaan	445		Surat dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten	445	valid	Sumber data sesuai

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
		3	**Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan**	%	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	2.631	26,31%	Surat keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan tentang rincian jumlah pekerja bukan penerima upah dan/atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara BNBA (By Name By Adress)	2631	Valid	Sumber data sesuai
					Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	10.000		Surat keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan	10000	Valid	Sumber data sesuai

Tarutung, Maret 2026

Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.SI
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Sisingamangaraja No. 100 Tarutung, Sumatera Utara 22411
Telepon (0633)21580 Faksimile (0633) 21580,
Laman : inspektorat.taputkab.go.id Pos-el : inspektur@taputkab.go.id

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB NON DASAR BUDAYA
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1	Budaya	2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	%	Jumlah cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan	13	100%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Sesuai	Valid	Sumber Data Sesuai
					Jumlah cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	13			Sesuai	Valid	Sumber Data Sesuai
		2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	%	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah Tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah Tahun N-1	63	5,79%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Sesuai	Valid	Sumber Data Sesuai
					Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah Tahun N-1	1.089			Sesuai	Valid	Sumber Data Sesuai

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 197803092005021001
3. Johannes, SE
   NIP 196901202003121002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampuboion, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 199108102019032014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Sisingamangaraja No. 100 Tarutung, Sumatera Utara 22411,
Telepon (0633)21580 Faksimile (0633) 21580,
Laman : inspektorat.taputkab.go.id Pos-el : inspektur@taputkab.go.id

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB NON DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	32	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sesuai	Valid	Sumber Data Sesuai
					Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 Tahun)	32			Sesuai	Valid	Sumber Data Sesuai
		2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif	%	Jumlah perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif	32	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sesuai	Valid	Sumber Data Sesuai
					Jumlah perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang	32			Sesuai	Valid	Sumber Data Sesuai

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 197803092005021001
3. Johannes, SE
   NIP 196901202003121002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampuboion, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 199108102019032014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Sisingamangaraja No. 100 Tarutung, Sumatera Utara 22411.
Telepon (0633)21580 Faksimile (0633) 21580.
Laman : inspektorat.taputkab.go.id Pos-el : inspektur@taputkab.go.id

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB NON DASAR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	%	Total Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota	2,84	100,71%	Kemendukbangga/BKKBN	Sesuai	Valid	Sumber Data Sesuai
					Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	2,82			Sesuai	Valid	Sumber Data Sesuai
		2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	%	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	45,9	0,14%	Kemendukbangga/BKKBN	Sesuai	Valid	Sumber Data Sesuai
					Total pasangan usia subur usia 15-49 tahun	32.813			Sesuai	Valid	Sumber Data Sesuai
		2.h.3	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	22,6	143,04%	Kemendukbangga/BKKBN	Sesuai	Valid	Sumber Data Sesuai
					Target Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	15,8			Sesuai	Valid	Sumber Data Sesuai

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 197803092005021001
3. Johannes, SE
   NIP 196901202003121002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 199108102019032014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Sisingamangaraja No. 100 Tarutung, Sumatera Utara 22411.
Telepon (0633)21580 Faksimile (0633) 21580.
Laman : inspektorat.taputkab.go.id Pos-el : inspektur@taputkab.go.id

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB NON DASAR PANGAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1	Pangan	2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42,2	53,16%	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai	Valid	Sumber data sesuai
					Target jumlah cadangan pangan	79,39			Sesuai	Valid	

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 197803092005021001
3. Johannes, SE
   NIP 196901202003121002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 199108102019032014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Sisingamangaraja No. 100 Tarutung, Sumatera Utara 22411
Telepon (0633)21580 Faksimile (0633) 21580,
Laman : inspektorat.taputkab.go.id Pos-el : inspektur@taputkab.go.id

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN PILIHAN PERIKANAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1	Perikanan	3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Ton	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	2961,17	99,30%	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai	Valid	Sumber data sesuai
					Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	2982			Sesuai	Valid	Sumber data sesuai
		3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Kg / Kap / Tahun	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	40,35+4,91+0,34	45,60	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai	Valid	Sumber data sesuai

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 197803092005021001
3. Johannes, SE
   NIP 196901202003121002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 2019032014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1.	Urusan Wajib dan Non Dasar (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	21	63,6363636	Dinas PMD Kab. Tapanuli Utara	21	Valid	Bahwa persentase pengentasan desa tertinggal dengan capaian 63,6363636 % dinyatakan valid sesuai data dari Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025
					Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	33		Dinas PMD Kab. Tapanuli Utara	33	Valid	
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	61	34,0782123	Dinas PMD Kab. Tapanuli Utara	61	Valid	Bahwa persentase peningkatan status desa mandiri dengan capaian 34,0782123 % dinyatakan valid sesuai data dari Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025
					Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	179		Dinas PMD Kab. Tapanuli Utara	179	Valid	

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
		3	**Persentase fasilitasi kerja sama desa**	%	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	12	17,647	Dinas PMD Kab. Tapanuli Utara	12	Valid	Bahwa persentase fasilitasi kerjasama desa dengan capaian 17,64 % dinyatakan valid sesuai data dari Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025
					Jumlah kerja sama desa yang ditangani	68		Dinas PMD Kab. Tapanuli Utara	68	Valid	

Tarutung, Maret 2026

Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi, S.P.,M.Si
   NIP. 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP. 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP. 19690120 200312 1 002
4. Meyly Simatupang, S.H., M.H.
   NIP. 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing, S.E.
   NIP. 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat, S.E.
   NIP. 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T., M.Kes.
   NIP. 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan, S.H.
   NIP. 197307031994031005
9. Robinson H. Silalahi, S.E.
   NIP. 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk, S.T.
    NIP. 197812272011011002
11. Trino Nadapdap, S.Tr.
    NIP. 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu, S.E.
    NIP. 198804282019031011
13. Elly Joice Aritonang, S.Tr.
    NIP. 199108102019032014
14. Cresby Manik, S.Tr.
    NIP. 199104172019031007

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1	**Urusan Wajib Non Dasar (Perpustakaan)**	1	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat**	Nilai	TKM= ((0.15x Pra Membaca) + (0.50x Saat Membaca) + (0.35 x Pasca Membaca)) x 100	61,61	61,61	Perpustakaan Nasional RI	61,61	Valid	Bahwa nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat nilai 61,61 telah valid sesuai data dari Dinas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		2	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**	Nilai	IPLM= ((0.30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kinerja) x 100	40,63	40,63	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	40,63	Valid	Bahwa nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nilai 40,63 telah valid sesuai data dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
	Urusan Wajib Non Dasar (Arsip)	1	**Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabillitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional**	%	T = (a + I + s + j)/4	60,34	60,34	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	60,34	Valid	Bahwa Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional dengan capaian 60,34% telah valid sesuai data Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara

Tarutung, Maret 2026

Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi, S.P.,M.Si
   NIP. 197303261994021004 _____
2. Gugun Fatar, SE. Ak
   NIP. 19780309 200502 1 001 _____
3. Johannes, SE
   NIP. 19690120 200312 1 002 _____
4. Meyly Simatupang, S.H., M.H.
   NIP. 197109212006042010 _____
5. Tiar Friska Sihombing, S.E.
   NIP. 196904062007012036 _____
6. Mariapul Marisi Sinurat, S.E.
   NIP. 197106052006042003 _____
7. Derliana Tampubolon, S.S.T., M.Kes.
   NIP. 197311012005022002 _____
8. Jonson Nainggolan, S.H.
   NIP. 197307031994031005 _____
9. Robinson H. Silalahi, S.E.
   NIP. 198801282015071001 _____
10. Indramarto Sidauruk, S.T.
    NIP. 197812272011011002 _____
11. Trino Nadapdap, S.Tr.
    NIP. 199411012019031010 _____
12. Hendra Pasaribu, S.E.
    NIP. 198804282019031011 _____
13. Elly Joice Aritonang, S.Tr.
    NIP. 199108102019032014 _____
14. Cresby Manik, S.Tr.
    NIP. 199104172019031007 _____

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1.	Urusan Wajib Non Dasar Ketenagakerjaan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan)	2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%	I Volume Usaha koperasi tahun berjalan - I Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	65.772.318.790	103,22%	Surat pernyataan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan	65.772.318.790	valid	Sumber data sesuai
					I Volume Usaha koperasi tahun sebelumnya	63.722.592.201			63.722.592.201	valid	Sumber data sesuai
		2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%	I Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	150	0,51%	Surat pernyataan dari Dinas Koperasi, Usaha	150	valid	Sumber data sesuai
					I Usaha Mmikro	29.313			29.313	valid	Sumber data sesuai
		3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	0	0,00%	Surat pernyataan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0	valid	Sumber data sesuai
					Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	1			1	valid	Sumber data sesuai
		3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan	%	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yagn ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	0	#DIV/0!	Surat pernyataan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0	valid	Sumber data sesuai
						0			0		
		3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional	%	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional	9	7,63%	Surat pernyataan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	9	valid	Sumber data sesuai
					Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	118			118	valid	Sumber data sesuai
		3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menegah di kabupaten/kota	%	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N - Jumlah industri kecil dan menengah N-1	515	92,79%	Surat pernyataan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-40	tidak valid	Penjumlahan terhadap Jumlah industri kecil dan menengah tahun N - Jumlah industri kecil dan menengah N-1 tidak sesuai (Jumlah industri kecil dan menengah Tahun 2025 sebanyak 515 sedangkan Tahun 2024 sebanyak 555)
					Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	555			555	valid	Sumber data sesuai
		3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan	%	Nilai investasi sektor industri	15.344.860.000	2,51%	Surat pernyataan dari Dinas	0	valid	Sumber data sesuai
					Total investasi seluruh sektor	612.144.540.492			1	valid	Sumber data sesuai

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jakson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 19730826199402100 4
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 19710921200604201 0
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 19690406200701203 6
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 19710605200604200 3
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 19731101200502200 2

8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 19730703199403100 5
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 19880128201507100 1
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 19781227201001100 2
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 19941101201903101 0
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 19880428201903101 1
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 19910417201903100 7

KERTAS KERJA REVIU LPPD
IKK OUTCOME URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN, DAN FUNGSI PENUNJANG
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Urusan	IKK Outcome		Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Hasil Reviu APIP		
									Elemen Data	Validitas	Catatan Hasil Reviu
1.	Urusan Wajib Non Dasar Ketenagakerjaan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	%	Akta kelahiran yang diterbitkan	105.175	98,38%	Surat pernyataan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	105.175	Valid	Sumber data sesuai
					Jumlah anak 0-17 tahun	106.907			106.707	Valid	Sumber data sesuai
		2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identtitas Anak	64.151	65,12%	Surat pernyataan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98.512		Jumlah anak yang memiliki Kartu Identtitas Anak tidak sesuai
					Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	98.512			64.151		Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak tidak sesuai
		2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang dipublikasikan	%	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2	100,00%	Surat pernyataan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	Valid	Sumber data sesuai
					2 dokumen	2			2	valid	Sumber data sesuai
		2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	%	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	229.974	97,70%	Surat pernyataan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	229.974	Valid	Sumber data sesuai
					Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	235.387			235.387	valid	Sumber data sesuai
		2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	Akta kematian yang diterbitkan	15.744	100,00%	Surat pernyataan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.744	Valid	Sumber data sesuai
					Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	15.744			15.774	valid	Sumber data sesuai
		2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	Akta perkawinan yang diterbitkan	85.903	100,00%	Surat pernyataan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85846	Tidak valid	Jumlah Akta perkawinan yang diterbitkan tidak sesuai
					Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	85.903			85846	Tidak valid	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan tidak sesuai
		2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	Akta perceraian yang diterbitkan	43	100,00%	Surat pernyataan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	43	Valid	Sumber data sesuai
					Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	43			43	valid	Sumber data sesuai

Tarutung, Maret 2026
Tim Reviu LPPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026

1. Jekson Levis Sianturi,S.P.,M.Si
   NIP 197303261994021004
2. Gugun Fatar, SE, Ak
   NIP 19780309 200502 1 001
3. Johannes, SE
   NIP 19690120 200312 1 002
4. Meyli Simatupang, S.H,M.H
   NIP 197109212006042010
5. Tiar Friska Sihombing,S.E
   NIP 196904062007012036
6. Mariapul Marisi Sinurat,S.E
   NIP 197106052006042003
7. Derliana Tampubolon, S.S.T,M.Kes
   NIP 197311012005022002
8. Jonson Nainggolan,S.H
   NIP 197307031994031005
9. Robinson H.Silalahi,S.E.
   NIP 198801282015071001
10. Indramarto Sidauruk,S.T.
    NIP 197812272010011002
11. Trino Nadapdap,S.Tr.
    NIP 199411012019031010
12. Hendra Pasaribu,S.E.
    NIP 198804282019031011
13. Elly Joise Aritonang, S.Tr.
    NIP 19910810 201903 2 014
14. Cresby Manik,S.Tr.
    NIP 199104172019031007